

Dr. Moh. Dulkihah, M.Si.

SISTEM SOSIAL DI INDONESIA

Dr. Moh. Dulkihah, M.Si.



Penerbit :

LP2M UIN SGD BANDUNG



SISTEM SOSIAL DI INDONESIA

Penulis:

Dr. H. Moh. Dulkihah, M.Si

ISBN: 978-623-6070-16-1

Desain Sampul dan Tata letak:

Widodo Dwi Ismail A.W.

Penerbit:

LP2M UIN SGD Bandung

Jl. H.A. Nasution No. 105 Bandung

Tlp. (022) 7800525, Fax. (022)7800525

<http://lp2m.uinsgd.ac.id>

vi + 185 hlm.; 25,7 cm.

Cetakan pertama, Nopember 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang- undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah Swt. Yang telah mengkaruniai berbagai macam nikmat dan keberkahan dalam menjalani kehidupan ini.

Sebagai manusia, kehidupan tidak terlepas dari sistem. Tentu saja, sistem ini memiliki korelasi dengan berbagai aspek, termasuk dalam kehidupan sosial. Sistem sosial sendiri bisa dikenali dari perilaku organisasi dan institusi sosial kemasyarakatan dalam berbagai ranah kehidupan manusia. Peran manusia di sini lebih dilihat sebagai makhluk sosial dan bagian dari kelompok kepentingan, bukan sebagai individu. Pada saat mengamati suatu fenomena sosial, maka kita sebetulnya sedang mencerna realitas kehidupan yang membawakan kondisi sistem masyarakat tertentu yang sedang bekerja dan seringkali berbenturan dengan sistem-sistem lainnya. Sistem ini mencirikan karakteristik sifat, tata nilai, ukuran, kualitas dan kedudukan relasional di dalam dan antarsistem. Oleh karenanya, fenomena sosial pada hakikatnya adalah proses dialog, transaksi dan negosiasi sejumlah sistem sosial pada konteks waktu dan tempat tertentu.

Perspektif sosiologi melihat bahwa sistem sosial dapat bersifat fungsional. Empat persyaratan fungsional fundamental yang digambarkan dalam skema AGIL menurut Parson merupakan kerangka untuk menganalisis gerakan-gerakan tahap (*phase movements*) yang dapat diramalkan. Keempat persyaratan ini berlaku untuk setiap sistem tindakan apa saja, termasuk dalam bidang pendidikan.

Sistem sosial sebagai suatu keseluruhan juga terlibat dalam saling tukar dengan lingkungannya. Lingkungan sistem sosial itu terdiri dari lingkungan fisik, sistem

kepribadian, sistem budaya dan organisme perilaku. Sistem tindakan ini dilihat sebagai berada dalam suatu hubungan hirarki dan bersifat tumpang tindih. Sistem budaya merupakan orientasi nilai dasar dan pola normatif yang dilembagakan dalam sistem sosial dan diinternalisasikan dalam struktur kepribadian para anggotanya. Norma diwujudkan melalui peran-peran tertentu dalam sistem sosial yang juga disatukan dalam struktur kepribadian anggota sistem tersebut. Organisasi perilaku merupakan energi dasar yang dinyatakan dalam pelaksanaan peran dalam sistem sosial.

Dengan hadirnya buku ini setidaknya mengenalkan bahwa analisis sistem dapat dikatakan melalui proses perumusan akademik yang tidak mudah. Kajian sistem sosial cenderung berorientasi pada apa yang terjadi (*what is*). Bagi para mahasiswa, akademisi, dan profesional perumusan akademik sebagaimana dinyatakan di atas berimplikasi positif bagi pengembangan *scientific social*, termasuk kajian yang kemudian melahirkan sistem sosial dalam perspektif sosiologi. Pembahasan sosiologi kriminalitas secara garis besar digunakan untuk melengkapi teori, konsep, metodologi, dan paradigma yang telah ada sehingga dapat semakin memperkaya horizon ilmu sosial.

Besar harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi sidang pembaca meski kami sadari ada kekuarangan dalam penyusunannya. Terima kasih kepada Jajaran LP2M yang sudah memfasilitasi terbitnya buku ini.

Bandung, Nopember 2020

ttd

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Pembelajaran.....	3
C. Peta Konsep.....	3
BAB II TEORI SOSIAL DALAM SISTEM SOSIAL...	11
A. Standar Kompetensi.....	11
B. Uraian Materi.....	13
C. Rangkuman/Ringkasan.....	23
D. Suggested Reading.....	23
E. Latihan.....	24
F. Daftar Istilah.....	24
BAB III SISTEM SOSIAL DALAM INDIVIDU, KELUARGA, DAN KELOMPOK	34
A. Standar Kompetensi.....	34
B. Uraian Materi.....	25
C. Rangkuman/Ringkasan.....	35
D. Suggested Reading.....	36
E. Latihan.....	36
F. Daftar Istilah.....	36
BAB IV SISTEM STRATIFIKASI SOSIAL.....	40
A. Standar Kompetensi.....	40
B. Uraian Materi.....	40
C. Rangkuman/Ringkasan.....	47
D. Suggested Reading.....	49
E. Latihan.....	49

F. Daftar Istilah.....	49
BAB V SISTEM SOSIAL KEBUDAYAAN DAN AGAMA	
A. Standar Kompetensi.....	82
B. Uraian Materi.....	82
C. Rangkuman/Ringkasan.....	54
D. Suggested Reading.....	55
E. Latihan.....	55
F. Daftar Istilah.....	56
BAB VI SISTEM SOSIAL POLITIK DI INDONESIA	96
A. Standar Kompetensi.....	96
B. Uraian Materi.....	96
C. Rangkuman/Ringkasan.....	71
D. Suggested Reading.....	72
E. Latihan.....	75
F. Daftar Istilah.....	75
BAB VII SISTEM SOSIAL TEKNOLOGI.....	
A. Standar Kompetensi.....	103
B. Uraian Materi.....	103
C. Rangkuman/Ringkasan.....	103
D. Suggested Reading.....	82
E. Latihan.....	82
F. Daftar Istilah.....	82
BAB VIII SISTEM SOSIAL EKONOMI.....	116
A. Standar Kompetensi.....	116
B. Uraian Materi.....	116
C. Rangkuman/Ringkasan.....	92
D. Suggested Reading.....	93
E. Latihan.....	93
F. Daftar Istilah.....	94

BAB IX KONFLIK SOSIAL SEBAGAI ACUAN	
ANALISIS SISTEM SOSIAL.....	134
A. Standar Kompetensi.....	134
B. Uraian Materi.....	134
C. Rangkuman/Ringkasan.....	102
D. Suggested Reading.....	103
E. Latihan.....	103
F. Daftar Istilah.....	104
BAB X SISTEM KOMUNIKASI SOSIAL.....	137
A. Standar Kompetensi.....	137
B. Uraian Materi.....	137
C. Rangkuman/Ringkasan.....	115
D. Suggested Reading.....	116
E. Latihan.....	116
F. Daftar Istilah.....	116
BAB XI TIPOLOGI MASYARAKAT INDONESIA	
117143Standar Kompetensi.....	117
A. Uraian Materi.....	117
B. Rangkuman/Ringkasan.....	125
C. Suggested Reading.....	126
D. Latihan.....	126
E. Daftar Istilah.....	126
BAB XII SISTEM INSTITUSI SOSIAL INDONESIA	127
A. Standar Kompetensi.....	127
B. Uraian Materi.....	127
C. Rangkuman/Ringkasan.....	137
D. Suggested Reading.....	138
E. Latihan.....	138
F. Daftar Istilah.....	138

BAB XIII PERUBAHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT	
A. Standar Kompetensi.....	139
B. Uraian Materi.....	139
C. Rangkuman/Ringkasan.....	144
D. Suggested Reading.....	144
E. Latihan.....	144
F. Daftar Istilah.....	144
BAB XIV SISTEM SOSIAL MASYARAKAT SIPIL..	145
A. Standar Kompetensi.....	145
B. Uraian Materi.....	145
C. Rangkuman/Ringkasan.....	152
D. Suggested Reading.....	152
E. Latihan.....	152
F. Daftar Istilah.....	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem sosial bisa dikenali dari perilaku organisasi dan institusi sosial kemasyarakatan dalam berbagai ranah kehidupan manusia. Peran manusia di sini lebih dilihat sebagai makhluk sosial dan bagian dari kelompok kepentingan, bukan sebagai individu. Pada saat mengamati suatu fenomena sosial, maka kita sebetulnya sedang mencerna realitas kehidupan yang membawakan kondisi sistem masyarakat tertentu yang sedang bekerja dan seringkali berbenturan dengan sistem-sistem lainnya. Sistem ini mencirikan karakteristik sifat, tata nilai, ukuran, kualitas dan kedudukan relasional di dalam dan antarsistem. Oleh karenanya, fenomena sosial pada hakikatnya adalah proses dialog, transaksi dan negosiasi sejumlah sistem sosial pada konteks waktu dan tempat tertentu.

Dalam perspektif sosiologi, sistem sosial dapat bersifat fungsional. Empat persyaratan fungsional fundamental yang digambarkan dalam skema AGIL menurut Parson merupakan kerangka untuk menganalisis gerakan-gerakan tahap (*phase movements*) yang dapat diramalkan. Keempat persyaratan ini berlaku untuk setiap sistem tindakan apa saja, termasuk dalam bidang pendidikan.

Runutannya diawali dengan adanya suatu tipe ketegangan, yang merupakan kondisi ketidaksesuaian antara keadaan suatu sistem yang ada (nyata) dan suatu keadaan yang diharapkan (*expectation*). Ketegangan ini menstimulasi penyesuaian (*adaptation*) dari suatu tujuan tertentu (*goal*

maintenance) serta mendorong semangat yang diarahkan kepada pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan itu memberikan kepuasan (*satisfy*) yang mereduksi atau bahkan menghilangkan ketegangan. Namun, sebelum suatu tujuan dapat tercapai, maka harus ada suatu tahap penyesuaian terhadap keadaan genting dari situasi dimana tenaga harus dikerahkan dan alat yang perlu untuk mencapai tujuan itu harus disiapkan. Selama tahap ini, pemuasan belum bisa dirasakan.

Dalam sistem sosial harus paling kurang ada suatu tingkat solidaritas minimal diantara para anggota sehingga sistem itu dapat bergerak sebagai satu satuan menuju tercapainya tujuan itu. Jadi tahap pencapaian tujuan secara unik diikuti oleh suatu tekanan pada integrasi (*integration*) dimana solidaritas keseluruhan diperkuat, terlepas dari usaha apa saja untuk tercapainya tugas instrumental. Akhirnya, tahap ini akan diikuti oleh tahap mempertahankan pola tanpa interaksi atau bersifat laten (*laten pattern maintenance*).

Sistem sosial sebagai suatu keseluruhan juga terlibat dalam saling tukar dengan lingkungannya. Lingkungan sistem sosial itu terdiri dari lingkungan fisik, sistem kepribadian, sistem budaya dan organisme perilaku. Sistem tindakan ini dilihat sebagai berada dalam suatu hubungan hirarki dan bersifat tumpang tindih. Sistem budaya merupakan orientasi nilai dasar dan pola normatif yang dilembagakan dalam sistem sosial dan diinternalisasikan dalam struktur kepribadian para anggotanya. Norma diwujudkan melalui peran-peran tertentu dalam sistem sosial yang juga disatukan dalam struktur kepribadian anggota sistem tersebut. Organisasi perilaku merupakan energi dasar yang dinyatakan dalam pelaksanaan peran dalam sistem sosial.

Parsons melihat hubungan antara pelbagai sistem tindakan ini berdasarkan kontrol sibernetik (*cybernetic control*) yang didasarkan pada arus informasi dari sistem budaya ke

sistem sosial, ke sistem kepribadian dan ke organisasi perilaku. Energi yang muncul dalam arus tindakan adalah dari arah yang sebaliknya, yang bermula dari organisme perilaku.

Pemeliharaan pola-pola yang laten (*laten pattern maintenance*) dihubungkan dengan sistem budaya, karena fungsi ini menekankan nilai dan norma budaya yang dilembagakan dalam sistem sosial. Masalah integrasi berhubungan dengan interelasi antara pelbagai satuan dalam sistem sosial. Pencapaian tujuan dihubungkan dengan sistem kepribadian dalam arti bahwa tujuan sistem-sistem sosial mencerminkan titik temu dari tujuan-tujuan individu dan memberikan mereka arah sesuai dengan orientasi nilai bersama. Hubungan antara pencapaian tujuan dengan sistem kepribadian ini mencerminkan perspektif Parsons bahwa tindakan selalu diarahkan pada tujuannya. Kemudian, sifat dari masalah penyesuaian ditentukan sebagian besar oleh sifat-sifat biologis individu sebagai organisme yang berperilaku dengan persyaratan biologis dasar tertentu yang harus dipenuhi oleh mereka agar tetap hidup.

B. Tujuan Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran Sistem Sosial di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menekankan proses pembelajaran berbasis *student centered Learning*, dengan perpaduan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif berbasis kelompok.
2. Menggunakan sarana pembelajaran multi media.
3. Menggunakan *e-learning* dalam menunjang proses pembelajaran.

C. Peta Konsep

Teori sosial adalah kajian tentang masyarakat yang ciri-ciri khasnya mulai muncul dalam tulisan-tulisan Montesquieu,

tokoh-tokoh sezamannya, sesudahnya dan mencapai puncaknya pada karya Marx, Durkheim dan Weber. Awalnya teori social membangun identitas dengan cara membuat kontras dengan pemikiran politik tokoh-tokoh zaman kuno dan tokoh-tokoh skolastik (*Schoolmen*). Ada dua ciri pokok yang membedakan teori social dengan tradisi sebelumnya: pertama, berhubungan dengan konsepnya tentang tujuan dan metodenya sendiri, kedua berhubungan dengan pandangan terhadap relasi antara watak dasar manusia (human nature) dan sejarah. Teori sosial terlibat dalam upaya pencarian pemahaman bermacam-macam bentuk kesadaran manusia terhadap sesamanya, terhadap alam, dan terhadap dirinya sendiri yang berlaku pada setiap jenis kehidupan sosial.

Perspektif evolusionisme banyak didasarkan pada karya Auguste Comte (1798-1857) dan Herbert Spencer (1820-1903). Berhubungan dengan karya tersebut, perspektif ini menjelaskan tentang bagaimana seorang individu dan masyarakat berkembang dan muncul. Meskipun dalam perkembangannya mengalami kemunduran dalam penggunaannya, perspektif ini hingga kini masih mendapatkan perhatian karena dianggap memiliki peranan yang cukup signifikan bagi perkembangan suatu ilmu.

Perspektif ini memandang peran pentingnya pola perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari teori ini adalah tentang cara melihat urutan perkembangan dalam suatu masyarakat. Artinya, perkembangan terhadap suatu masyarakat tertentu, bisa dijadikan tolak ukur untuk perkembangan pada masyarakat lainnya. Suatu contoh, apakah perkembangan dalam masyarakat Islam di Arab bisa dijadikan model bagi perkembangan masyarakat Islam di Indonesia. Di sinilah yang menjadi titik tekan dari pembahasan dalam perspektif ini.

Sebagaimana disebutkan, bahwa perspektif ini direpresentasikan oleh Auguste Comte. Tetapi sebagai catatan saja, sebetulnya perkembangan pemikiran atas masyarakat telah berkembang jauh sebelum Comte menggulirkan pemikiran evolusionisme ini. Seorang filsuf terkemuka yang untuk pertama kalinya menelaah perkembangan masyarakat secara sistematis adalah Plato (429-347 SM). Plato menyatakan bahwa masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi manusia perorangan. Suatu masyarakat akan terganggu stabilitasnya sama dengan apa yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Setelah Plato, Aristoteles (384-322 SM) juga membahas tentang masyarakat yang mengikuti sistem analisis dari Plato. Kemudian pada perkembangan berikutnya, banyak bermunculan para ilmuwan yang membahas tentang perkembangan masyarakat, seperti Ibnu Khaldun (1332-1406), dan seterusnya.

Auguste Comte sangat populer dengan pemikirannya yang menjelaskan bahwa ada tiga perkembangan intelektual masyarakat pada umumnya, dan masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya. Perkembangan itu berupa: Pertama, tahap teologis atau fiktif. Tahap ini manusia menafsirkan gejala-gejala setiap sesuatu yang terjadi dengan menyandarkan pada fenomena roh dewa-dewa. Kedua, Tahap metafisik, di mana manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat dijelaskan. Ketiga, tahap pengetahuan positif, di mana manusia berusaha untuk merumuskan hukum-hukum alam secara positif dan seragam berlandaskan data-data empiris, sistematis, obyektif, dan verifikatif.

Pemikiran Auguste Comte mengenai perkembangan manusia dari perspektif evolusionisme di atas merupakan karya intelektual yang luar biasa, di mana manusia atau masyarakat

secara evolutif dianalisis edemikian rupa hingga merumuskan kesimpulan-kesimpulan semacam itu.

Para ilmuwan yang dikategorikan masuk dalam perspektif interaksionisme ini, di antaranya: George Herbert Mead (1863-1931), Charles Horton Cooley (1846-1929), Herbert Blumer (1962) dan Erving Goffman (1959). Perpestif ini memusatkan perhatiannya pada individu dan kelompok. Mereka mengemukakan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi satu sama lainnya. Dalam melakukan interaksi, mereka sering menggunakan simbol-simbol, yang di dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat-isyarat, dan kata-kata yang dipahami dan dimaklukan di antara mereka.

Secara sederhana dijelaskan bahwa paham interaksionesme memberikan banyak penekanan pada individu yang aktif dan kreatif ketimbang pendekatan teoritis lainnya. Individu merupakan hal yang bisa ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Di sisi lain, para ilmuwan interksionisme melihat bahwa konsep-konsep seperti, masyarakat, negara, dan berbagai institusi sosial lainnya ialah hanya abstraksi belaka, sebab keberadaannya hanya sebagai sekumpulan konsep.

Salah satu keunikan lainnya adalah bahwa interaksionisme simbolik berkembang dari sebuah perhatian ke arah bahasa. Mead mengklaim bahwa bahasa dapat memungkinkan untuk menjadi manusia yang sadar diri (self-conscious), yakni sadar akan individualitas kita, dan unsur kunci dalam bahasa ini adalah simbol. Sebuah simbol merupakan sesuatu yang berada demi (stand for) yang lain (Giddens, 1993: 715). Contoh, kata “rumah” merupakan sebuah simbol yang melalu itu kita merepresentasikan obyek itu, yaitu rumah. Begitu kita menguasai konsep rumah, kita bisa memikirkan rumah walau pun kita tidak melihat rumah di sekitar kita.

Menurut Robert M.Z.Lawang (1986) interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Mengutip Gillin dan Gillin dalam *Cultural Sociology* (1954: 489), interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Interaksi sosial menekankan bahwa individu-individu berinteraksi satu sama lainnya dengan menggunakan simbol-simbol, yang di dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat-isyarat, dan kata-kata yang dipahami dan dimaklukkan di antara mereka. Interaksi sosial memberikan banyak penekanan pada individu yang aktif dan kreatif dan biasanya memfokuskan pada interaksi tatap muka (*face to face*) dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Paham interaksionisme simbolik membuat kita belajar untuk terus-menerus memikirkan obyek secara simbolik. Pemikiran simbolik ini pada dasarnya akan melepaskan kita dari realitas yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Paham interaksionisme simbolik menganggap bahwa alam dan sesuatu yang ada di dalamnya adalah nyata, virtual. Semua interaksi itu melibatkan simbol. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita secara konstan mencari pegangan mengenai sikap, perilaku atau pemahaman mengenai apa yang dimaksudkan lawan bicara kita. Interaksionisme simbolik mengarahkan pada pemahaman mengenai bagaimana untuk mengerti apa yang orang lain katakan dan lakukan kepada kita sebagai individu.

Beberapa ilmuwan yang dipengaruhi oleh paham interaksionisme simbolik biasanya memfokuskan pada interaksi tatap muka (*face to face*) dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kritik yang dapat diberikan untuk paham interaksionisme ini adalah bahwa paham ini terlalu

berkonsentrasi pada skala kecil. Para pengikut interaksionisme simbolik selalu menemukan kesulitan ketika berinteraksi dengan proses dan struktur yang berskala lebih besar.

Tokoh-tokoh yang populer dikategorikan ke dalam paham fungsionalisme antara lain: Talcott Parsons (1937), Kingsley Davis (1937) dan Robert Merton (1957). Dalam perspektif ini dijelaskan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat akan melakukan tugas tertentu dan dilakukan secara terus-menerus, sebab ini merupakan refleksi dari apa yang disebut sebagai fungsional tersebut. Artinya kesemua komponen dalam masyarakat dapat berfungsi sesuai dengan kedudukannya di masyarakat. Sebuah perilaku atau tindakan sosial bisa dilegitimasi atau bisa dibenarkan karena hal tersebut dalam masyarakat dinilai sebagai fungsional. Suatu pola perilaku dapat muncul, dan sekaligus bisa menghilang dan berubah sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi, dan sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan dalam masyarakat tertentu.

Suatu perubahan sosial bisa jadi akan mengganggu kestabilan dalam masyarakat karena dianggap dapat mengancam fungsi-fungsi yang ada, tetapi dalam rentang waktu tertentu setelah adanya adaptasi, keseimbangan akan muncul kembali. Secara teoritik diasumsikan bila suatu perubahan yang muncul dapat memperkuat fungsi-fungsi sosial di masyarakat, maka pada saat yang sama terjadi suatu keseimbangan. Tetapi sebaliknya, bila perubahan sosial yang datang ternyata mengusik suatu keseimbangan atau stabilitas sosial yang ada, maka hal tersebut dianggap sebagai gangguan fungsional. Disebut gangguan fungsional karena pada dasarnya gangguan tersebut akan kembali pada suatu keseimbangan.

Perspektif fungsionalis mengandaikan masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisasi. Masyarakat dianggap bisa bekerja sama dalam

suatu cara yang relatif teratur menurut seperangkat aturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat tersebut. Dengan demikian, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan orientasi ke arah keseimbangan. Ada kehendak untuk saling menjaga keteraturan ini dari setiap komponen masyarakat.

Pada hakekatnya, paradigma fungsionalisme merupakan kondisi dan relasi yang menghasilkan keberlangsungan dan kohesi, kesaling-hubungan dan konsensus. Dalam konteks ini Pardue menerapkan teori interaksi sosial (*social interaction*) dan pembagian kerja dari Emile Durkheim (*division of labour*), masyarakat komunitas dan industrinya Ferdinand Tonnies, serta teori anomie dari Robert K. Merton. Titik tolak atau cara paradigma fungsionalisme dilandasi oleh pemikiran dari Emile Durkheim. Paradigma fungsionalisme memandang nilai dan norma sebagai pijakan masyarakat, dan perhatian pada keteraturan sosial. Pandangan utama dari fungsionalisme adalah struktur sosial (*social structure*) dan institusi sosial (*social institution*) dalam aspek luas, serta kaitan dan pengaruhnya terhadap individu (*individum*).

Perspektif demikian berangkat dari positivisme yang melihat masyarakat melalui hubungan-hubungan antar variable, khususnya hubungan variable bebas-terikat dimana sejumlah variabel-variabel bebas yang dapat dijelaskan, diukur dan dikonvergensi. Dalam hal ini bisa diasumsikan bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat egois sehingga perlu kontrol dan pengaturan (regulasi/order/norm/value) atas dirinya. Pengaturan tersebut terdapat pada kesadaran bersama (*collective consciousness*—suatu istilah yang sering digunakan Durkheim). Kepentingan kolektif atau seluruh masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan individu. Pandangan seperti ini diinternalisasi kepada setiap individu dalam suatu komunitas manusia, sejak mereka masih usia kecil. Dengan

begitu diyakini, jika tanpa pengaturan ini, maka dikhawatirkan kepentingan-kepentingan diri individu dapat mengurangi hak-hak komunitas. Dengan demikian, manusia cenderung bersifat individualis, suka bersaing dan secara alamiah memiliki bakat, potensi dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungannya.

Suatu konsep penting Durkheim terkait dengan paradigma ini adalah mengenai fakta sosial. Fakta sosial (*social facts*) merupakan satu konsep penting yang dibangun oleh Durkheim sebagai domain dari penyelidikan sosiologi dalam melihat gejala sosial. Dalam hal ini gejala sosial itu bersifat riil (faktual) secara obyektif yang keberadaannya terlepas dari gejala biologis maupun psikologis individu. Fakta sosial adalah (1) cara bertindak (2) cara berfikir (3) cara berperasaan. Ada 3 (tiga) karakteristik dari 'fakta sosial' yakni: *Pertama*, bersifat eksternal terhadap individu, dimana fakta sosial adalah kenyataan dengan karakteristik khusus atau unik (*sui generis*) dan merupakan cara bertindak, berpikir dan berperasaan yang memperlihatkan sifat patut dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar kesadaran individu. *Kedua*, bersifat memaksa (*coersif*). *Ketiga*, bersifat umum (universal). Proposisi Durkheim dalam menjelaskan fakta sosial adalah *anggaplah sebagai suatu benda (things)*. Sebagai 'benda', maka fakta sosial tentu saja berbeda dengan 'ide'. Bahkan proposisi fakta sosial harus diperlakukan sebagai 'benda' itu sendiri dimunculkan oleh Durkheim sebagai suatu 'tandingan' atau 'antitesis' terhadap kecenderungan-kecenderungan akan dominasi 'dunia ide' dalam ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka gejala sosial tidak dapat dipahami secara spekulatif melainkan harus dipelajari melalui penyusunan data riil di luar pemikiran manusia.

Dalam penjelasan Durkheim, khususnya pada *division of labour*, perbedaan peran adalah hal positif sehingga akan

terjalin kesalinghubungan dan resiprositas. Ada *collective force* (koersif) dalam masyarakat, dan integrasi sosial tergantung kepada keefektifan tekanan normatif yang berjalan. *Social change* mestinya tidak terjadi secara cepat, namun secara perlahan. Perubahan sosial akan mengancam kelangsungan solidaritas antar anggota dalam masyarakat.

Dalam pandangan Emile Durkheim anomie telah disebut sebagai fenomena keterasingan yang dialami individu dari lingkungan masyarakatnya. Ini terjadi karena perubahan yang cepat pada status dan peran sosial sebagai akibat perubahan dan pembagian pekerjaan dalam masyarakat.

Sementara pemikiran Spencer menganalogikan masyarakat sebagai layaknya perkembangan makhluk hidup. Manusia dan masyarakat termasuk didalamnya kebudayaan mengalami perkembangan secara bertahap. Mula-mula berasal dari bentuk yang sederhana kemudian berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks menuju tahap akhir yang sempurna. Teori evolusinya memiliki dua perspektif, yakni: *Pertama*, mengenai peningkatan jumlah masyarakat yang berasal dari penyatuan kelompok-kelompok di dalam masyarakat itu. Ini yang menimbulkan diferensiasi fungsi yang makin tinggi dan juga menimbulkan struktur yang luas. Kedua, kelompok-kelompok yang telah berdampingan berubah lagi melalui penggabungan. Spencer juga melihat perkembangan masyarakat yang telah terjajah sebelumnya. Masyarakat yang terjajah akan berkumpul dan menjadi satu untuk melakukan peperangan dan melindungi negaranya ataupun menyerang negara lain. Perubahan yang terjadi pada masyarakat militan ini kemudian berevolusi menjadi masyarakat industri, yang terbangun atas dasar kesamaan nasib setelah peperangan yang dialaminya sehingga yang ditekankan dalam perubahan masyarakat ini adalah moralitas yang makin membaik. Menurut Spencer, apabila salah satu anggota masyarakat tidak

mampu menyesuaikan dirinya dengan keadaan ini, maka ia akan musnah dan yang mampu menyesuaikan diri itulah yang akan bertahan.

BAB II

TEORI SOSIAL DALAM SISTEM SOSIAL

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa diharapkan mengetahui, memahami, dan menjelaskan konsep sistem sosial secara mendalam. Teori-teori dalam sistem sosial, serta kondisi sosial yang ada di Indonesia beserta teori yang menjelaskan fenomena sosial yang ada.

Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami kondisi Indonesia yang majemuk dan plural sehingga dapat memahami kemajemukan dan pluralitas tersebut sebagai upaya untuk membangun toleransi di atas kemajemukan yang ada.

B. Uraian Materi

Teori aksi parson membedakan antara teori aksi dengan aliran behaviorisme. Dipilihnya istilah “action” bukan “behavior” karena menurutnya memiliki konotasi yang berbeda. Istilah action menyatakan tidak langsung suatu aktivitas, kreatifitas, dan proses penghayatan dari individu. Sedangkan behavior secara tidak langsung menyatakan kesesuaian secara meknik antara perilaku (respon) dengan rangsangan dari luar (stimulus).

Dalam analisisnya, parson banyak menggunakan kerangka alat-tujuan (*means-ends framework*). Inti pemikiran Parson adalah bahwa: (1) tindakan itu diarahkan pada tujuannya (atau memiliki suatu tujuan); (2) tindakan terjadi daam suatu situasi, dimana beberapa elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak itu sebagai *alat* menuju tujuan itu; dan (3) secara normative tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan

alat dan tujuan. Singkatnya, tindakan itu dilihat sebagai satuan kenyataan sosial yang paling kecil dan paling fundamental. Komponen-komponen dasar dari satuan tindakan adalah tujuan, alat, kondisi, dan norma. Alat dan kondisi berbeda dalam hal dimana orang yang bertindak itu mampu menggunakan alat dalam usahanya mencapai tujuan; kondisi merupakan aspek situasi yang tidak dapat dikontrol oleh orang yang bertindak itu.

Dari semula Parson menjelaskan bahwa teori aksi memang tidak dapat menerangkan keseluruhan aspek kehidupan sosial. Meskipun teori aksi berurusan dengan unsure-unsur yang paling mendasar dari kehidupan sosial namun ia mengakui bahwa unsure-unsur yang paling mendasar bagi kehidupan sosial, namun ia mengakui bahwa unsure-unsur yang mendasar itu tidaklah berurusan dengan keseluruhan struktur sosial. Dalam positivisme modern, Purdue menyebutkan bahwa sebagai sebuah filsafat yang berasal dari Lingkaran Wina mulai tahun 1920-an, filsafat harus mengikuti prosedur sains. Ini merupakan aliran yang membatasi fikiran pada segala hal yang dapat dibuktikan. Ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan inferensi logis yang berdasarkan fakta yang jelas. Positivisme modern disebut sebagai pohon dari sekumpulan pohon di hutan. Hutannya adalah positivisme. Ia tak hendak menggantikan positivisme. Satu bentuknya adalah neopositivisme atau juga disebut positivisme logik. Jika positivisme berupaya menjawab bagaimana sebuah masyarakat berjalan, neo positivisme berupaya menjawab apa yang seharusnya dilakukan ilmu pengetahuan (science). Ia mengintegrasikan rasionalisme dan empirisme, memverifikasi melalui riset, lintas ilmu, dan berada pada level yang lebih rendah (*lower range*).

Salah satu derivasi dari pemikiran ini adalah penggunaan matematika dalam sosiologi. Pendekatan ini dalam

upaya menemukan teori kausalitas yang baru (new causal theory). Contoh yang melakukannya adalah Peter Blau dan Duncan yang melakukan penelitian perubahan struktur pekerjaan antar generasi. Mereka menggunakan 5 variabel untuk menjelaskannya yaitu status pekerjaan responden saat ini, status pekerjaan pada awal bekerja, pendidikan, status pekerjaan ayahnya, serta pendidikan ayahnya.

Pareto membagi tiga jenis tindakan manusia, di antaranya: *Pertama*, kategori tindakan naluriah atau kebiasaan. *Kedua*, tindakan logis (rasional), yakni suatu tindakan berdasarkan ophelimity yang merekonstruksi hubungan antara aktor, sarana dan tujuan. *Ketiga*, tindakan tidak logis (tindakan tidak rasional), di mana aktor percaya bahwa hubungan sarana-tujuan telah ditetapkan secara tidak logis. Mereka bertindak tidak logis, namun mereka percaya bahwa mereka bertindak dengan logis.

Menurut Pareto, bila kita membandingkan masyarakat, kita akan menemukan keseragaman umum (*common uniformities*) dan variasi individu (*individual variation*). Keseragaman dapat dianggap sebagai 'residu' universal dari tindakan manusia dan bisa dibedakan dari 'turunan', variasi kehidupan sosial manusia terkonstruksi secara sosial. Residu diklasifikasikan ke dalam berikut ini: 'naluri kombinasi', kecenderungan untuk mengakui bahwa benda-benda yang berhubungan antara satu dengan lainnya; 'ketekunan agregat', kecenderungan untuk mengakui kelangsungan asosiasi manusia sepanjang waktu, dan 'sosialitas', kecenderungan manusia untuk hidup dalam masyarakat dan untuk mensubordinasikan diri.

Sementara George Homans mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial dan menggunakan sebagian besar waktu mereka berinteraksi dengan manusia lain. Perilaku sosial merupakan pertukaran aktivitas, nyata atau tidak. Analisis

Homans terbatas antara individu dengan individu. Pada tataran lebih tinggi, Teori Pertukaran Peter Blau memahami struktur sosial berdasarkan analisis proses sosial yang mempengaruhi hubungan antara individu dan kelompok. Blau bermaksud menganalisis struktur sosial yang lebih kompleks, melebihi Homans yang memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk kehidupan sosial mendasar. Blau memusatkan perhatian kepada proses pertukaran yang menurutnya mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun kelompok.

Menurut Blau, mekanisme yang menjembatani antara struktur sosial yang kompleks itu adalah norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Menurut konsensus nilai mengganti pertukaran tak langsung dengan pertukaran langsung. Seorang anggota menyesuaikan diri dan mendapat persetujuan implisit karena penyesuaian diri memberikan kontribusi atas pemeliharaan dan stabilitas kelompok. Dengan kata lain, kelompok atau kolektivitas terlibat dalam suatu hubungan pertukaran dengan individu.

Selain itu ada paradigma pluralis. Paradigma pluralisme berisi berbagai teori yang disusun atas pandangan (asumsi) bahwa manusia adalah makhluk rasional, bebas dan memiliki tujuan (*purposive actor*). Manusia, sebagai individu dan masyarakat, merupakan dua objek penting bag titik tolak munculnya paradigma pluralis. Manusia dan kelompok (menjadi masyarakat dalam arti luas) adalah dua hal yang berbeda. Keduanya merupakan objek yang berbeda, meskipun satu objek bisa diterangkan melalui objek lainnya.

Bagi paradigm pluralis, penyimpangan atau deviasi dalam masyarakat merupakan hal yang biasa, tidak dianggap sebagai suatu masalah. Adanya perbedaan yang muncul dalam masyarakat merupakan objek yang menarik perhatian kalangan pluralis. Dunia tidak dipandang sebagai sebuah *subjective*

world sehingga paradig ini tidak kaku dalam melihat masalah. Bagi paradig pluralis, masyarakat merupakan realitas sosial, dimana pernyataan kesadaran didasarkan pada ide-ide bersama. Hubungan dalam masyarakat merupakan proses timbal balik dengan berpedoman pada seperangkat gagasan, hukum dan peraturan bersama. Manusia juga dipandang sebagai sosok yang independent, memiliki kebebasan dan otoritas serta otonomi dalam membuat pemaknaan dan menafsirkan atas realitas sosial di sekitarnya. Karena itu, tindakan manusia sulit diprediksi, karena adanya kesadaran yang berbeda antar manusia. Manusia sebagai aktor sosial menafsirkan dunia empiris mereka sendiri secara bebas dan berbeda satu dengan lain.

Tokoh filosof utama yang dijadikan basis paradigma pluralis adalah Immanuel Kant yang menyatakan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang suka berteman sekaligus juga berkompetisi, namun manusia tetap senang dengan harmoni. Manusia bertindak atas kesadaran subyektif, dan memiliki kebebasan menafsirkan realitas di lingkungannya secara aktif.

Sejalan dengan konsep manusia Kant, Rousseau mengembangkan teori kontrak sosial. Dalam teori ini, terbentuknya negara (masyarakat politik) karena anggota masyarakat mengadakan kontrak sosial untuk membentuk negara. Sumber kewenangan disini adalah masyarakat itu sendiri.

Dalam paradig pluralis, manusia merupakan makhluk dengan ciri dualisme yaitu sebagai makhluk sosial (*sociable*) sekaligus berkesadaran secara individu (*self assetive*). Bukannya eksternal tidak mampu menekan manusia, namun perilaku manusia adalah makhluk yang intentional sekaligus voluntary. Kebebasan lebih dimaknai sebagai hal yang personal dan individual, bukan sebagai hal yang kolektif.

Dalam memandang masyarakat, paradigam ini melihat bahwa realitas sosial merupakan dunia yang subjektif, yang dibentuk karena ada ide dan makna yang saling didistribusikan. Karena makna yang dibagi tidak selalu sama, maka yang terbentuk adalah masyarakat heterogen. Resiprositas dalam arti luas merupakan basis relasi dalam masyarakat, dimana tiap orang berorientasi pada orang lain.

Mengikuti filsafat idealisme, tindakan manusia diyakini tidak dapat diprediksi. Karena itulah metode *verstehen* Weber menjadi relevan. Menurut Weber, tiap orang berkesempatan menegosiasikan struktur masyarakatnya sendiri. Tiap individu bisa mengajukan perubahan-perubahan sesuai keinginannya. Mengikuti paradigma pluralis ini, manusia dipandang sebagai interaksionis sekaligus sebagai pribadi khas. Inilah yang dimaksud dengan sifat dualisme. Tekanan-tekanan eksternal tidak begitu saja langsung membentuk sikap-sikapnya, karena ada kekuatan dalam diri si manusia itu sendiri yang tidak tunduk pada tekanan eksternal.

Salah satu teori utama sosiologi yang tergolong menggunakan paradigma pluralis adalah teori Interaksionisme Simbolik. Teori ini dikenal dalam lingkup sosiologi interpretatif yang berada di bawah payung teori tindakan sosial (*action theory*), yang dikemukakan Weber. Intinya, bahwa tindakan sosial bermakna berdasarkan makna subyektifnya yang diberikan individu-individu. Tindakan individu mempertimbangkan perilaku orang lain yang lalu diorientasikan dalam perilakunya sendiri. Kehidupan sosial berjalan atas dua lingkaran: kelompok primer dan sekunder. Relasi sosial berjalan di atas kesadaran masing-masing individu (*self consciousness*). Manusia membagi dengan manusia lain berbagai simbol-simbol yang abstrak baik yang objektif maupun subjektif. Dengan demikian, realitas

sesungguhnya adalah realitas yang dibangun secara sosial (*socially constructed*).

Weber menjelaskan dalam *The Protestant Ethic and the: Spirit of Capitalism* berusaha membalikkan thesis Marx yang menyatakan bahwa superstruktur ditentukan oleh infrastruktur (ekonomi). Weber menyatakan bahwa salah satu faktor penting dari perkembangan kapitalis justru terletak pada aspek superstruktur (ideologi dan agama). Weber memperlihatkan bagaimana semangat untuk mencapai kemajuan yang signifikan di kalangan penganut agama kristen protestan daripada katholik. Realitas semacam ini cukup menarik bagi Weber untuk mengkaji peranan agama dalam kemajuan ekonomi.

Georg Simmel, sebagai sosiolog Jerman, berhadapan dengan sosiologi positivistik Comte serta teori evolusi Spencer. Teori Simmel bertolak dari konsep atomisme logis. Masyarakat dipersepsikan lebih sebagai sebuah interaksi individu-individu dibandingkan sebuah interaksi substansial. Ia memfokuskan pada atom-atom empirik, dengan berbagai konsep dan individu-individu di dalamnya, serta kelompok-kelompok yang kesemuanya berfungsi sebagai suatu kesatuan. Masyarakat, pada hakekatnya dapat ditemukan di dalam individu-individu yang melakukan interaksi.

Interaksi merupakan konsep dasar sosiologi, termasuk Simmel. Konsepnya yang mikro menyangkut bentuk-bentuk (*forms*) di mana interaksi yang terjadi di dalamnya melibatkan berbagai tipe dan ini menyangkut individu yang terlibat di dalam interaksi itu. Kelompok teori yang tergolong sebagai interaksi simbolik juga bertolak dari hal yang paling elemen yakni "relasi". Dalam teori ekologi manusia misalnya, dipelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam tiap jejaring kehidupan berlangsung

kompetisi antar makhluk hidup untuk bertahan hidup dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya.

Bagi Dahrendorf, masyarakat terdiri atas kaum pemilik modal, kaum eksklusif dan tenaga kerja. Hal ini membuat perbedaan terhadap bentuk-bentuk konflik, dimana Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa atau dominasi (*domination*) dan yang dikuasai (*submission*), maka jelas ada dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan.

Asumsi Dahrendorf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsesus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Bagi Ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsesus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.

Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi 'otoritas' selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas

yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis.

Coser menunjukkan berbagai sumbangan konflik yang secara potensial positif yaitu membentuk serta mempertahankan struktur suatu kelompok tertentu. Coser tidak mencoba menghasilkan teori menyeluruh yang mencakup seluruh fenomena sosial. Karena ia yakin bahwa setiap usaha untuk menghasilkan suatu teori sosial menyeluruh yang mencakup seluruh fenomena sosial adalah sesuatu yang sia-sia.

Inti pemikiran Coser tentang konflik, di antaranya adalah: Pertama, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Kedua, seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain.

Menurut Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, konflik realistik, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Kedua, konflik non- realistik, konflik yang bukan berasal dari tujuan- tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.

Mead mengartikulasikan pentingnya teori "Fikiran (*Mind*), Diri (*Self*), dan Masyarakat" (*Society*). Mead memperkenalkan dialektika hubungan antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Bagi Mead, individu

merupakan makhluk yang sensitive dan aktif. Keberadaan sosialnya mempengaruhi bentuk lingkungannya secara efektif sebagaimana lingkungannya mempengaruhi kondisi sensitifitas dan aktifitasnya. "Fikiran" dalam konsep Mead adalah fenomena sosial yang muncul dalam proses sosial. Demikian pula dengan "diri" (self). Diri dapat bersifat sebagai objek maupun subjek secara sekaligus. Ia merupakan obyek bagi dirinya sendiri, dan ini merupakan karakter dasar yang membedakan manusia dengan hewan. Dalam hal ini diri akan mengalami proses internalisasi atau interpretasi subyektif atas realitas struktur yang lebih luas. Dia merupakan dialektis dari "I"-impulsif dari diri, aku sebagai subyek-dan "Me"-sisi sosial dari manusia, aku sebagai obyek.

Sebagaimana tradisi pluralisme, Berger meyakini bahwa sosiologi mesti mempelajari gejala sosial yang sarat makna oleh aktor yang terlibat dalam gejala sosial tersebut. Dalam bukunya *The Social Construction of Reality*, Berger pada hakekatnya berupaya menyusun teori tentang masyarakat dengan memahami pengetahuan sebagai produk historis yang dikonstruksi secara sosial. Masyarakat sebagai realitas sekaligus sebagai entitas subyektif dan objektif.

Menurut Berger, hubungan antara individu-individu dan institusi-institusi adalah suatu dialektis (interaktif) yang diekspresikan dalam sebuah bentuk dengan tiga kondisi: Masyarakat adalah suatu produk manusia (*society is a human product*). Masyarakat adalah sebuah realitas objektif (*society is an objective reality*). Manusia adalah sebuah produk sosial (*Man is social product*) yang menunjukkan adanya realitas subyektif dalam diri aktor. Sementara masyarakat adalah realitas obyektif.

Peter Berger dan Thomas Luckmann (1967) berkeinginan memperdamakan pertentangan antara paradigma fakta sosial dan definisi sosial. Menurut Ritzer (2007 : 115) karya mereka

The Social Construction of Reality, paling berpengaruh dalam teori sosiologi dewasa ini. Dari judulnya saja orang akan terkesan bahwa pengarangnya termasuk penganut paradigm definisi sosial. Meskipun buku itu condong ke paradigm definisi sosial, namun sebagian besar upaya mereka juga ditujukan untuk memperdamaikan kecenderungan penekanan yang berlebih-lebihan oleh satu paradigm dengan mengorbankan aspek paradigma lain.

C. Rangkuman/Ringkasan

Teori sistem dalam fungsionalisme secara prinsip masih dalam konteks mendapatkan keseimbangan, kohesi dan integrasi, serta kesalinghubungan dan kesalingtergantungan dari bagian-bagian terhadap keseluruhan. Dalam konsep Parson, aktor tidak dilihat dari tindakan dan sudut pikirannya, tetapi dari status dan perannya dalam masyarakat. Ini merupakan bentuk penjelasan yang khas dari fungsionalisme. Dalam Teori Tindakan, individu melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsiran atas suatu objek stimulus atau situasi tertentu dari lingkungannya. Tindakan tersebut adalah tindakan sosial yang rasional, yaitu mencapai tujuan atas sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat.

D. Suggested Reading

Bacalah buku Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2003. *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bagian tindakan dalam preposisi Parson ini di antaranya: (1) adanya individu selaku actor (2) aktor dipandang berorientasi pada tujuan-tujuan tertentu (3) aktor memiliki alternative cara, alat serta teknik untuk encapai tujuannya (4) aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang

dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. Misalnya kelamin dan tradisi (5) aktor berada dibawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.

Mahasiswa sebaiknya membaca sistem sosial bukan hanya dari Talcott Parson elainkan dari sosiolog lain baik yang ada pada level meso maupun makro. Masing-masing imuwan perspektif yang berbeda.

E. Daftar Istilah

Social action adalah tindakan sosial bermakna berdasarkan makna subyektifnya yang diberikan individu-individu.

BAB III

SISTEM SOSIAL DALAM INDIVIDU, KELUARGA, DAN KELOMPOK

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa memahami dimensi sistem sosial dalam kehidupan sosial yang memiliki hubungan yang kompleks. Dimensi sistem sosial mengilustrasikan adanya aspek pendidikan, ekonomi, budaya, politik, hukum dan sebagainya. Dalam kehidupan sosial, kita mengenal ada sistem individu dan kelompok.

B. Uraian Materi

Istilah individu diambil dari kata latin, “*individuum*”, bermakna “yang tak berbagi”. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Tidak dapat dibagi mengindikasikan adanya satu kondisi yang paling kecil sehingga di dalamnya tidak memiliki bagian-bagian lagi. Dalam ilmu sosial, istilah individu ini menunjukkan pada diri seseorang yang menjadi bagian dari anggota dalam masyarakat.

Aspek jasmaniah hendak menunjukkan bahwa setiap individu memiliki struktur dan anatomi tubuh yang sama antara satu individu dengan individu yang lainnya. Setiap individu ciptaan Allah Swt. diberikan kelengkapan tubuh, perti tangan, kaki, kepala, mata telinga, hidung, mulut, dan sebagainya yang masing-masing anggota tubuh tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Organ-organ tubuh tersebut diberikan oleh sang pencipta untuk memenuhi kehidupan biologis manusia, seperti: tangan fungsinya untuk membawa dan mengambil sesuatu, kaki fungsinya untuk berjalan dan menendang, mulut

fungsinya untuk memakan dan berbicara, telinga fungsinya untuk mendengar, dan sebagainya.

Kedua, aspek psikis-rohaniah. Setiap individu pasti memiliki aspek psikis-rohaniah yang biasanya melekat dalam perasaan dan jiwa individu.

Dalam pandangan Freud setiap individu memiliki tiga sistem struktur kepribadian, antara lain (Guilford, 1959: 17):

- a. Id (Das Es), yaitu aspek biologis;
- b. Ego (Das Ich), yaitu aspek psikologis;
- c. Super ego (Das Ueber Ich), yaitu aspek sosiologis.

Ketiga aspek tersebut, masing-masing mempunyai fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja, dan dinamika sendiri-sendiri. Akan tetapi dalam mengakses tingkah laku, ketiganya saling berhubungan dan tidak mungkin terjadi pemisahan antara ketiganya.

Pertama, Id (Das Es), aspek biologis. Id adalah sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Ketika manusia lahir, system sarafnya lebih baik sedikit dari binatang lain. Sifatnya primitive, instingtif (yang berusaha untuk memenuhi kepuasan insting dan rahim tempat ego dan super ego berkembang (Suryabrata, 1996: 145). Id merupakan sumber energi psikis yang bersumber dari instink kehidupan atau dorongan-dorongan biologis seperti makan, tidur, bersetubuh dsb., dan instink kematian yang menggerakkan tingkah laku. Id bekerja sejalan dengan prinsip kenikmatan (*pleasure principle*) dan berusaha mengurangi atau menghilangkan ketegangan (reduksi ketegangan). Dalam memperoleh kesenangan dan mengurangi/menghilangkan ketegangan, id berupaya melalui dua cara, yaitu melalui tindakan refleks (*reflex action*) dan melalui proses primer (*primary process*). Refleks merupakan tindakan-tindakan otomatis yang bersifat bawaan dan bukan hasil belajar, misalnya berkedip, bersin. Melalui gerakan refleks, ketegangan yang tidak nyaman dapat

direduksi. Sedangkan proses primer adalah reaksi-reaksi psikologis yang lebih rumit. Mengurangi ketegangan melalui proses ini, dilakukan dengan cara membentuk hayalan (fantasi) terhadap aktivitas yang diperkirakan akan menghilangkan ketegangan tersebut. Contoh pada saat ingin menyalurkan biologis membayangkan sosok wanita yang aduhai, pada saat lapar membayangkan makanan. Proses primer ini tidak dapat mengurangi ketegangan, rasa lapar tidak akan menjadi kenyang hanya dengan membayangkan makanan. Karena proses primer ini tidak dapat mereduksi ketegangan atau memenuhi kesengan, maka proses baru melalui komponen kepribadian kedua (ego) perlu dikembangkan.

Kedua, Ego (Das Ich), aspek psikologis. Ego berkembang dari id. Dia tidak mempunyai energi sendiri. Peranan utama ego adalah menjembatani antara id (keinginan yang kuat untuk mencapai kepuasan) dengan kondisi lingkungan atau dunia luar (*external social world*) yang diharapkan agar. Ego dibimbing oleh prinsip realitas. Ego beroperasi mengikuti prinsip realita (*reality principle*). Artinya ego memenuhi kebutuhan organisme berdasarkan obyek-obyek yang sesuai dan dapat ditemukan dalam kenyataan. Prinsip realita ini dilakukan melalui proses sekunder (*secondary process*), yakni berpikir realistik menyusun rencana dan menguji apakah rencana itu menghasilkan obyek yang dimaksud. Melalui proses sekunder inilah ego merumuskan suatu rencana untuk memuaskan kebutuhan atau dorongan, kemudian menguji rencana itu. Ego adalah pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama, yakni pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau instink mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang risikonya minimal. Orang yang lapar merencanakann untuk mencari

makanan, dan mengujinya ditempat mana makanan itu berada. Peralihan dari dorongan ingin makan ke merencanakan makanan dan mencari makanan, merupakan kemajuan terpenting dalam perkembangan egonya (Freud, 1985: 389).

Ketiga, Super Ego (Das Uber Ich), aspek sosiologis. Super ego merupakan kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik (*idealistic principle*) sebagai lawan dari prinsip kepuasan “id” dan prinsip realistik dari “ego“. Prinsip idealistik mempunyai dua sisi, yakni pertama, *conscience* (nurani) yang merupakan internalisasi dari hukuman dan peringatan. Kedua, *ego-ideal* yang berasal dari pujian dan contoh-contoh positif yang diberikan kepada anak-anak. Ini terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Melalui pengalaman hidup, seseorang telah menerima informasi baik dan buruk. Seseorang itu berupaya menginternalisasikan berbagai norma sosial tersebut. Artinya seseorang menerima norma-norma itu dan berupaya hidup sesuai dengan norma tersebut. Super ego berkembang dari ego, dan tidak mempunyai energi sendiri. Super ego berkembang pada anak sekitar usia 3-5 tahun. Pada usia ini anak belajar untuk memperoleh hadiah (*rewards*) dan belajar menghindari hukuman (*punishment*) dengan cara mengarahkan tingkahlakunya yang sesuai dengan keinginan orang tua. Bila tingkah lakunya salah, tidak sesuai dengan keinginan orang tua, maka mendapat hukuman. Peristiwa ini membentuk kata hati (*conscience*). Dan bila tingkah lakunya benar, maka mendapat ganjaran dari orang tuanya. Peristiwa ini membentuk ego-ideal anak.

Sistem organisme manusia memiliki sistem energi yang kompleks. Energi ini berasal dari makanan yang dimakannya, kemudian menjadi energi yang digunakan untuk mendorong berbagai aktivitas seperti bernafas, bergerak,

mengamati, berpikir, mengingat dan lain sebagainya. Energi bisa berubah dari energi fisiologis menjadi energi psikis atau sebaliknya. Energi yang digunakan dalam kegiatan psikologis (seperti berpikir) adalah energi psikis. Sedangkan yang menjembatani antara energi jasmaniah dengan energi kepribadian adalah id dan instink-instinknya. Dalam menjalankan fungsinya instink-instink ini meliputi seluruh energi yang digunakan oleh ketiga struktur kepribadian (id, ego, dan superego).

Di sinilah fungsi instink sebagai pendorong energi psikis dalam mengembangkan dinamika kepribadian. Tentu tidak hanya berperan sebagai pendorong, akan tetapi sekaligus sebagai pendistribusi energi bahkan sebagai pengendali dampak ketidakmampuan ego untuk mereduksi ketegangan saat bertransaksi dengan dunia luar yaitu *anxiety* (kecemasan).

Keluarga diartikan sebagai suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerjasama ekonomi. Fungsi keluarga adalah berkembang biak, mensosialisasi atau mendidik anak, menolong, melindungi, .Definisi peranan ialah solidaritas, alokasi ekonomi, alokasi kekuasaan, alokasi integrasi dan ekspresi atau kenyataan diri. Kesemuanya atas pertimbangan umur, perbedaan seks, generasi, dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Secara resmi biasanya terbentuk oleh adanya hubungan perkawinan.

Secara umum fungsi keluarga meliputi pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan, penempatan anak dalam masyarakat, pemuas kebutuhan perseorangan, dan kontrol sosial (wiliam j.goode,1983).

Pengaturan seksual. Dapat di bayangkan kekacauan yang terjadi apabila tidak ada pengaturan seksual. Misalnya jika anak tidak mempunyai ayah yang sah, atau ayah yang

salah, maka kewajiban-kewajiban itu menjadi kacau atau tidak di jalankan, atau bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang telah di tetapkan. Ayah tadi tidak dapat memelihara anaknya, dan anaknya tidak di akui keluarga ayahnya, maka kedudukan si anak meragukan serta pengalamn sosialisasinya tidak lengkap. Oleh karena itu, pada setiap masyarakat di jumpai norma-norma keabsahan (norms of legitimacy), yaitu kelahiran di luar nikah tidak di benarkan. Setiap masyarakat mengatur siapa boleh menikah dengan siapa, dan menentang kehamilan insidental atau hasil hubungan seks kebetulan. Adanya *insect taboo* berupa larangan hubungan seks antara kerabat yang terlalu dekat, secara sosiologis bermaksud mencegah berkembangnya persaingan seksual di kalangan keluarga sendiri yang berptensi merusak serta mengikat keluarga yang berbeda-beda dalam masyarakat melalui pernikahan. Hal ini mendorong integrasi sosial dan solidaritas yang menyeluruh. Adanya norma-norma keabsahan dan kewajiban peran dan keluarga, sudah merupakan hukum sosial. Menurut bronislow malinowskyb, hukum sosial menetapkan, bahwa janganlah anak itu dilahirkan kedunia tanpa seorang lelaki yang mengemban tugas menjadi ayah yang bertanggung jawab. William J. Goode (1983) telah menyusun jenis-jenis penyimpangan sosial pengaturan seksual menurut tingkat ketidaksetujuan sosial atau menurut ketidakseimbangan dalam struktur sosial. Jenis-jenis penyimpangan adalah :

1. Hidup bersama atas dasar suka sama suka (“kumpul kebo”).
2. Pergundikan
3. Hubungan seorang bangsawan dengan gundiknya (zaman praindustri masyarakat barat) atau raja dengan selir
4. Melahirkan anak pada masa tunangan
5. Perzinahan, sang lelaki sudah menikah

6. Kehidupan bersama seorang yang bertarak (celibat,pastoral,biarawan, menahan hawa nafsu) dengan orang lain yang juga hidup bertarak atau dengan yang tidak bertarak.
7. Perzinahan, sang wanita sudah menikah
8. Perzinahan, kedua-duanya telah menikah
9. Kehidupan bersama seorang wanita kasta tinggi dengan lelaki kasta rendah.
10. Incest (hubungan seksual dalam satu keluarga), saudara lelaki dengan saudara perempuan)
11. Incest, bapak dengan anak perempuan
12. Incest, ibu dengan anak laki-laki

Daftar di atas memberikan dasar bagi langkah-langkah selanjutnya dalam analisis penyimpangan. Dengan itu suatu kelahiran dapat di golongkan sah atau tidak , tetapi secara sosial ada banyak derajat penyimpangan dari penerimaan penuh secara sosial. Juga si anak dan ibunya di beri tempat di bawah aib yang bermacam-macam sifatnya, menurut sanksi-sanksi(sosial) tertentu.

Reproduksi. Berkembangnya teknologi kedokteran, selain memberikan dampak positif bagi program keluarga berencana, dapat pula menimbulkan masalah terpisahnya kepuasan seksual dengan pembiakan. Kehadiran anggota baru dapat di pandang sebagai penunjang atau melapataka, bagi masyarakat tani dapat dikatakanmenunjang, terutama dalam penyediaan tenaga kerja. Bagi masyarakat yang tingkat kehidupannya cukup baik seperti di eropa,kehadiran anggota keluarga (jumlah anak) lebih dari dua dapat mempengaruhi status sosialnya. Hal ini berkaitan dengan apa yang disebut teori kapilaritas dalam masalah kependudukan.

Pandangan terhadap jumlah punya anak bermacam-macam, ada yang mwengharapkan untuk jaminan bagi orang tua di masa depan, ada yang bermotivasi agama, ada alasan

kesehatan , dan sebagainya. Yang jelas, di suatu negara, bila alat kontraseptif mudah di peroleh dan banyak digunakan, ada keengganan untuk mempunyai anak , dan angka senggama sebelum pernikahan menjadi meningkat (william J. Goode, 1983).

Sosialisasi. Manusia sebagai mahluk dalam evolusinya lebih bergantung kepada kebudayaan, dan bukan kepada naluri atau insting. Masyarakat dan kebudayaannya menjadi bergantung kepada keefektifan sosialisasi, yaitu sejauh mana sang anak mempelajari anak nilai-nilai, sikap-sikap, dan tingkah laku masyarakat dan keluarganya. Oleh karena itu, masyarakat harus membentuk atau menuntut unit yang meneruskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Di dalam keluarga seorang anak memperoleh landasan bagi pembentukan kepribadian, sikap perilaku, dan tanggapan emosinya.

Pemeliharaan. Masa kehamilan yang cukup panjang disertai masa kritis dan tugas menyusui berlarut-larut, membuat ibu yang sedang hamil perlu perlindungan dan pemeliharaan. Demikian pula anak yang baru dilahirkan sampai jangka waktu tertentu, sampai dapat berdiri sendiri, menuntut terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya. Kedua orang itu menamakan hubungan kasih dengan anak-anaknya melalui ikatan ketergantungan emosional, memaksa ke arah bertahap ke arah berdiri sendiri. Manusia tidak berdaya waktu dilahirkan. Sampai usia beberapa tahun manusia belum dapat memelihara dirinya sendiri. Manusia tidak berdaya waktu dilahirkan , dan akan cepat mati tanpa pemeliharaan. Sampai usia beberapatahun manusia belum dapat memelihara diri sendiri. Karakteristik ini berhubungan unik dengan ciri manusia, yaitu: Pertama, manusia lebih cepat dewasa daripada binatang. Kedua, tidak mempunyai naluru untuk menyederhanakan

penyesuaian dengan lingkungannya. Ketiga, memiliki otak yang paling rumit dari semua hewan.

Penempatan anak didalam masyarakat. Jangan menentukan penempatan sosial seorang anak, pengaturan wewenang membantu menentukan kewajiban peranan orang-orang dewasa terhadap sang anak, Anak merupakan simbol berbagai macam hubungan peran yang penting di antara orang-orang dewasa .Adanya pemesraan antara orangtua dan kehadirannya terus menerus, menimbulkan tuntutan-tuntutan kepada orang dewasa, orang-orang dewasa ini pun mengadakan tuntutan satu dengan yang lain nya karena anak.jika anak tidak mempunyai ayah yang sah,kewajiban-kewajiban itu menjadi kacau atau tidak di jalankan,atau bertentangan dengan kewjiban yang telah di tetapkan.penempatan sosial ditetapkan oleh masyarakat atas dasar keanggotaan keluarga melalui pemberian orientasi hubungan seperti orang tua,saudara kandung,dan kerabat.berikutnya penempatan sosial melalui orientasi individu pada kelompok lain yang secara sosial telah mapan,seperti hubungan nasional etnik,agama,organisasi masyarakat,kelas,dan sebagainya.

Pemuas kebutuhan perseorangan. Hubungan suami istri dibentuk oleh jaringan teman-teman dan anak di tempat mereka hidup, tetapi teman tidak dapat menggantikan kepuasan hubungan suami istri dengan anaknya. Setiap orang tua menjalani hubungan emosional yang erat segera setelah kelahiran sang bayi. Keluarga erupakan tempat persemaian sifat-sifat individu yang khas selaku manusia. Banyak kasus atau pengalaman menunjukkan, anak-anak yang tidak dibesarkan oleh orangtua nya sendiri banyak mengalami penderitaan, mulai dari kematian sampai gangguan perkembangan emosionalnya. Anak yang dilahirkan merupakan manifestasi cinta kasih kedua orangtua, dan bukan proses kebetulan apalagi terpaksa,. Dengan terbentuknya

keluarga dan memperoleh anak, suami istri dapat menutupi kekurangan-kekurangan alamiah masing-masing dan persatuan ini melindungi mereka dari kesulitan yang dihadapi seseorang bila hidup sendiri. Perkawinan terhormat yang sah dapat memuaskan perkawinan keinginan seks perseorangan. Berkumpulnya suami istri berarti memastikan kelangsungan hidup manusia.

Kontrol sosial. Keluarga yang berfungsi dalam sosialisasi, yaitu bagi setiap individu pada saat ia tumbuh menjadi dewasa, memerlukan suatu sistem nilai sebagai suatu sistem tuntutan umum untuk mengarahkan aktifitasnya dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai tujuan akhir pengembangan kepribadianya. Orangtua mewariskan kepada anak-anak mereka, meskipun sering dengan cara informal dan tidak disadar, sistem nilai masyarakat mereka. Tentu saja dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu disana-sini dengan pandangan-pandangan mereka sendiri. Nilai-nilai yang sudah diwariskan orangtua berupa pewarisan hubungan antara anggota keluarga. Juga masyarakat tidak membiarkan orangtua mengabaikan samasekali tugas “moralitas” anak-anak mereka karena indoktrinasi (penanaman) nilai-nilai masyarakat yang mereka lakukan penting sekali untuk mempertahankan masyarakat itu sendiri pada generasi yang akan datang. Jadi, fungsi kontrol sosial keluarga, titik beratnya adalah dalam mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai masyarakat dalam peran sosial anggota keluarga, berupa ketidaksiapan anggota keluarga untuk bergaul dengan orang yang mereka anggap telang melanggar nilai-nilai masyarakat. Bentuk lainnya berupa tekanan mental yang bersifat psikologis dan nonfisik orangtua terhadap anaknya, sehingga anggota keluarga bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian masyarakat. Hasilnya berupa kelangsungan hidup dan kesatuan keluarga

dengan masyarakat serta proses pembentukan kepribadian, sesuai dengan keinginan masyarakat.

C. Rangkuman

Manusia, walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri mana dinamakan *gregariousness*. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan bahwa tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan oleh keinginannya untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya (masyarakat), dan keinginannya untuk menjadi satu dengan suasana alam disekelilingnya. Kesemuanya itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tadi merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong.

Manusia bermasyarakat, hidup di dalam apa yang dinamakan situasi sosial dan situasi alam. Situasi sosial merupakan suatu keadaan, di mana terdapat hubungan timbal balik antara manusia. Adanya situasi sosial tersebut, dapat dikembalikan pada paling sedikit tiga faktor, yaitu :

- Naluri manusia untuk hidup bersama dengan manusia,
- Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain,
- Keinginan untuk menyesuaikan sendiri dengan alam sekelilingnya.

Situasi sosial tersebut, dapat mengakibatkan terjadinya situasi kebersamaan dan situasi kehidupan berkelompok.

D. Suggested Reading

Bacalah buku Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2003. *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mahasiswa hendaknya memahami situasi kebersamaan yang ditandai dengan faktor, bahwa secara kebetulan orang-orang berada di suatu tempat karena adanya kepentingan atau pusat perhatian yang sama. Situasi kehidupan berkelompok ditandai dengan adanya motif yang sama, kecakapan yang berbeda-beda, adanya struktur dan kaidah-kaidah. Kecuali daripada itu, orang yang bergabung di dalamnya, merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok serta melakukan interaksi sosial yang relatif kontinu.

E. Latihan

Apa sebutan naluri bagi manusia untuk selalu hidup dengan orang lain?

Apa yang Anda pahami tentang situasi sosial dan sebutkan beberapa faktornya!

F. Daftar Istilah

Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan unik di dalam lingkungan sosialnya, tetapi juga memiliki kepribadian serta pola tingkahlaku secara spesifik. Terdapat tiga aspek yang melekat di dalam individu, yakni: *Pertama*, aspek jasmaniah.

Keluarga diartikan sebagai suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerjasama ekonomi.

Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam hati seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain.

BAB IV

SISTEM STRATIFIKASI SOSIAL

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep serta bentuk stratifikasi sosial yang memiliki lapisan-lapisan dalam suatu masyarakat.

Mahasiswa juga diharapkan memahami stratifikasi sosial yang berkaitan dengan ekonomi.

B. Uraian Materi

Kedudukan stratifikasi dalam masyarakat bukan sebagai sub sistem, melainkan sebagai suatu aspek umum dari struktur dalam sistem sosial yang kompleks. Hal ini berbeda dengan ekonomi yang merupakan sub sistem dalam masyarakat, sebagaimana sub sistem lainnya, seperti pendidikan, budaya, agama, dan sosial. Dengan demikian, stratifikasi sosial bisa dipahami sebagai *structured inequalities between different groupings of people* (Giddens, 1997). Masyarakat, dalam konsep ini, dipandang terbangun atas strata yang hirarkis. Stratum sendiri adalah any aggregate of individuals occupying the same position in a social hierarchy (Jeffries & Ransford, 1980).

Stratifikasi muncul dalam kehidupan kelompok yang merupakan suatu naluri manusia sejak lahir. Naluri ini yang mendorong manusia untuk hidup secara berkelompok. Naluri berkelompok sebetulnya tumbuh tatkala manusia masih kecil. Untuk memenuhi naluriah ini, maka setiap manusia melakukan proses keterlibatannya dengan orang lain dan lingkungannya. Sejak kecil manusia sudah membutuhkan orang lain, mulai dari ibunya, bapaknya, keluarganya, dan teman-temannya. Tanpa ada

orang lain manusia tak akan dapat hidup dan tak mampu untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupannya.

Melalui kelompok ini manusia dapat berinteraksi satu sama lainnya. Dalam proses berinteraksi ini, mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian atau biasa disebut dengan adaptasi (*adaptation*). Adaptasi dengan lingkungan sosial dan fisik bagi manusia merupakan hal yang penting dan tak dapat dihindari. Mereka berupaya untuk membangun suatu hubungan sosial di dalamnya sehingga terbentuk apa yang disebut dengan struktur sosial baru yang dinamakan kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang relatif kecil. Jumlah mereka biasanya masih bisa terbilang kecil yang hidup secara bersama dan membangun tujuan bersama.

Dalam kehidupan masyarakat kontemporer, stratifikasi sosial memiliki dua bentuk, yaitu kelas dan status. Kelas umumnya digunakan untuk menunjukkan pembagian masyarakat yang didasarkan atas posisi ekonomi dalam masyarakat, tanpa harus memperhatikan apakah mereka menyadari akan posisinya itu atau tidak. Sedangkan status menunjukkan tingkat posisi seseorang atau kelompok yang ditentukan oleh berbagai faktor.

Secara historis, konsep kelas merupakan bagian penting dalam teori Karl Marx tentang masyarakat, yang menekankan perlunya perjuangan kelas, yaitu perjuangan kaum proletariat melawan kaum borjuis dalam usaha untuk mengawasi sumber-sumber produksi (Parker, 1992: 79). Dengan adanya proletariat/pekerja (kelompok miskin) dan borjuis/kapitalis (kelompok kaya) menunjukkan adanya stratifikasi dalam masyarakat Eropa, di mana secara kelas dan status keduanya adalah berbeda. Sementara itu, Max Weber lebih menunjukkan perhatiannya terhadap tipe lain dari stratifikasi yang berasal dari pengakuan terhadap suatu status yang mungkin akan

mematahkan struktur kelas. Namun ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial lain, yaitu suatu pembagian kelas sosial didasarkan atas kelompok penguasa (power group) dan kelompok yang dikuasai (non-power group). Istilah power di sini tidak selalu diartikan sebagai kekuatan ekonomi atau suatu kekayaan (Dahrendorf, 1959). Power group diartikan sebagai suatu kelompok elite dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan.

Untuk mengemukakan tiga buah penelitian guna menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk selalu berusaha mendapatkan posisi dan status sosial yang lebih tinggi dan termandang dalam masyarakat. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Lockwood pada tahun 1958. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah para pekerja “berjas hitam”, atau para pegawai administrasi. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa walaupun para pegawai rendah termasuk ke dalam kelas pekerja, tetapi mereka biasanya mengidentifikasikan dirinya ke dalam golongan kelas menengah. Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Goldthorpe dan Lockwoods pada tahun 1963 telah menekankan gejala-gejala melimpahnya orang-orang yang termasuk ke dalam kelas pekerja. peneliti menyimpulkan bahwa walaupun ada kemajuan ekonomi golongan kaum buruh dengan masyarakat kelas menengah, tetapi jurang pemisah antara mereka masih tetap sangat lebar. Peneliti mengatakan bahwa usaha untuk mengidentifikasikan diri terhadap kelompok kelas menengah dengan cara meniru gaya hidupnya, sama sekali tidak memiliki tujuan ekonomis, tetapi hanyalah sekedar untuk mendaptkan eknaikan status saja.

Menurut Soejono Soekanto adanya sistem lapisan sosial dalam masyarakat bisa terbentuk menurut dua pola, yakni: Pertama, secara sengaja, yaitu secara sadar disusun,

dirancang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kedua, dengan sendirinya, dalam proses pertumbuhan masyarakat.

Adanya stratifikasi memiliki keterkaitan dengan pola kekuasaan dan wewenang resmi, maksudnya mustahil suatu masyarakat atau kelompok tertentu dapat hidup dengan tertib dan teratur jika tidak jelas distribusi kekuasaan dan otoritas, batas-batas, hubungan-hubungan, serta interaksi-interaksi yang terjadi baik dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Tanpa adanya pola demikian, maka dalam masyarakat akan sangat mudah terjadi pertentangan-pertentangan yang menciptakan suatu kondisi yang anomik atau chaos. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan kedaulatan secara sadar dan jelas mesti dilakukan.

Lalu bagaimana dengan stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya? Makna dengan sendirinya menunjukkan bahwa terjadinya stratifikasi tidak secara sadar dan disengaja direncanakan, tetapi terjadi di luar pengendalian masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Adapun mengenai faktor-faktor yang saling mempengaruhi hingga tercipta sistem stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat, di antaranya: Pertama, perkembangan struktur sosial ekonomi masyarakat, yakni dari pola masyarakat agraris ke pola masyarakat industrial memiliki dampak yang luar biasa dalam perkembangan struktur sosial ekonomi masyarakat. Pembagian kerja (*division of labour*) dan spesialisasi yang melekat pada pola masyarakat industrial mempengaruhi lapisan-lapisan yang ada berdasarkan ukuran-ukuran tertentu berdasarkan nilai, norma, dan aturan yang berlaku. Kedua, perkembangan struktur sosial politik masyarakat, yaitu dari pola masyarakat feodal-agraris ke masyarakat industri-demokratis, akan mempengaruhi bagaimana caranya dasar stratifikasi, yakni hal yang dipandang berharga didistribusikan di antara para warga masyarakat, apakah lebih pincang atau lebih merata. Perubahan

tersebut sebetulnya dilatarbelakangi oleh perkembangan paham atau falsafah tentang manusia dan masyarakat atau negara.

Seorang Sosiolog Herbert Mead memiliki pandangan bahwa masyarakat tidak dilihat dalam skema teoritis, meski secara implisit ada. Interaksionisme simbolik menurut Mead merupakan kontruksi dari beberapa pengertian mengenai diri sendiri, tindakan, obyek dan sebagainya. Pengertian-pengertian demikian memiliki keterkaitan dengan masyarakat itu sendiri, yakni: Pertama, diri sendiri. Dalam pandangan-pandangannya, Mead lebih menitikberatkan pada ilmu psikologi dan sosial, tentang gambaran manusia sebagai pelaku, sebagai makhluk yang memiliki diri sendiri. Di sini mengandung makna bahwa manusia adalah obyek bagi dirinya sendiri. Pandangan mengenai diri sendiri menyiratkan manusia dalam suatu mekanisme interaksi dengan dirinya sendiri dalam menghadapi sesuatu di luar dirinya. Mekanisme seperti ini menjadi landasan dalam membentuk suatu interpretasi dan melakukan tindakan-tindakan dalam kehidupannya. Kedua, tindakan. Tindakan manusia memiliki sebuah karakter yang berbeda antara satu dengan lainnya sebagai hasil dari bentukan proses interaksi dalam dirinya sendiri. Dalam melakukan tindakan, seorang individu tidak lepas dari keinginan dan tujuannya. Suatu tindakan tanpa dilandasi keinginan akan hampa dan kosong. Keinginan dalam tindakan menuntun pada penentuan tujuan-tujuannya. Karena itu, seorang individu yang melakukan tindakan harus berusaha menentukan tujuannya, menggambarkan arah tingkahlakunya, memperkirakan situasinya, mencatat dan menginterpretasikan tindakan orang lain sebagai bahan pertimbangan, dan mengevaluasi tindakannya.

Dengan pandangan di atas, Mead ingin menyimpulkan bahwa manusia dipandang sebagai organisme aktif yang memiliki hak-hak terhadap obyek yang ia modifikasikan.

Tindakan dipandang sebagai tingkah laku yang dibentuk oleh pelaku, sebagai ganti respon yang di dapat dari dalam dirinya sendiri.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan, baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu, agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan-harapan orang lain menyangkut peran tersebut. (Debora, 1998:286).

Peran adalah pola-pola perilaku yang diharap dari seseorang berkaitan dengan status yang diduduki. Menurut Linton, Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu status (*kedudukan*). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan, untuk itu antara peranan dan kedudukan itu seperti sayur dan garam tidak bisa dipisahkan, karena adanya kedudukan pasti di situ akan ada peranan. Sama halnya dengan kedudukan peranan juga mempunyai beberapa pengertian (Soekanto, 2006:268).

Pertama, peranan berarti penampilan tingkah laku yang diharapkan dari individu sesuai dengan kedudukan yang diembannya (*role expectation*). Contoh A adalah seorang pemuda, maka diharapkan A dapat menampilkan bahwa A seorang pemuda yang baik. Kedua, peranan berarti kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, karena setiap individu mempunyai kedudukan yang harus diembannya.

Menurut Masondan M.C Eachern yang dikutip oleh David Berri, peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga di ungkapkan oleh

David Berri. Menurutnya di dalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

1. Harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya (Wirutomo, 1995:101)

Peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosial yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya di masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan timbulnya suatu harapan-harapan baru (Abdulsyani, 2007:94).

Pentingnya peranan adalah dapat mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain dan orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan-peranan tersebut diatur oleh norma-norma yang ada di masyarakat (Soekanto, 1986:220).

Talcott Parson menyatakan bahwa kolektivitas merupakan suatu sistem peran-peran yang secara kongkrit bersifat interaktif. Suatu institusi adalah suatu kompleks elemen-elemen yang berpola dalam harapan-harapan peran yang berlaku untuk sejumlah kolektivitas yang tidak terbatas (Johnson, 1986:123). Dalam teori sosial Parson, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu. Yang membentuk orientasi

motivasi individu terhadap orang lain. Melalui pola-pola kultural, catak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar mengenai siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain. (Santosa, 2001:228).

Robert K. Merton mengemukakan bahwa perilaku peran yang berkaitan dengan posisi tertentu meliputi seluruh rangkaian perilaku yang saling mengisi bagi perilaku khas lainnya, yang disebutnya seperangkat peran. Cara orang diharapkan untuk berperilaku terhadap orang lain yang ditemui cenderung sangat berbeda. Misalnya, seorang mahasiswa kedokteran menghadapi harapan yang khas dan berbeda terkait dengan bagaimana perilaku yang sesuai terhadap kawan, dosen, perawat, pasien, dan sebagainya. (Santosa, 2001:228).

Penilaian perilaku seseorang tergantung dia memerankan peranannya di masyarakat. Dengan demikian faktor yang menentukan bagaimana peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh faktor sebagai berikut.

1. Norma yang berlaku dalam suatu interaksi, yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku dalam kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama.
2. Apabila norma itu sudah jelas maka barulah dapat dikatakan adanya kemungkinan besar untuk menjelmakannya.
3. Apabila individu dihadapkan dengan situasi dimana lebih dari satu norma yang berlaku yang dikenalnya, maka akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan memodifikasi diantara norma-norma tersebut.

Dalam hal ini dapat terlihat gejala yang disebut *role distance* dimana seseorang dalam memerankan peranannya merasa tertekan dan merasa tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, dengan demikian seseorang tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan sempurna, dimungkinkan

orang tersebut berada di lingkungan sosial yang berbeda. Lingkaran sosial adalah kelompok sosial dimana seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan perannya (Soekanto, 2006:270).

Sehubungan dengan adanya peranan yang dilakukan setiap individu di masyarakat, maka seseorang akan senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu (*set of roles*). Sehingga peran seseorang yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasi menurut bermacam-macam cara sesuai sudut pandang yang diambil.

Perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial tertentu. (Rachmad. 2008:205). Menurut Merton, setiap individu dalam masyarakat memiliki bermacam-macam status, dan masing-masing status memiliki berbagai macam peran. Peran yang banyak itu dinamakannya *role-set* atau perangkat peran. Sedangkan status yang banyak itu dinamakannya perangkat-perangkat status atau *status-set*.

Namun, Merton lebih memusatkan perhatiannya pada perangkat peran dibandingkan perangkat status. Tulisannya dikhususkan untuk menganalisis mekanisme sosial yang mengintegrasikan peran-peran yang banyak itu sehingga tidak terjadi konflik. Merton memusatkan analisisnya pada struktur sosial dan menyelidiki elemen-elemen fungsional dan elemen-elemen disfungsional.

1. Elemen fungsional adalah elemen-elemen yang mengindari ketidak stabilan potensi (integrasi) di dalam diri yang mempunyai banyak peran.
2. Elemen disfungsional adalah elemen-elemen yang secara sadar tidak sadar menciptakan ketidak stabilan (konflik) dalam diri orang yang mempunyai banyak peran.

Role set theory dimulai dengan konsep di mana setiap status sosial tidak hanya terdiri atas peran yang berkumpul secara tunggal, tetapi ia merupakan susunan peran. Gambaran struktur sosial ini memunculkan konsep kerangka peran, yang melengkapi hubungan sosial yang bersifat sederhana pada manusia, karena mereka menduduki status social khusus.

Perangkat peran sebenarnya tidak sama dengan peran ganda. Konsep ini menunjukkan bahwa tidak pada kompleksitas peran yang berhubungan dengan status social tunggal, tetapi pada status sosial yang bervariasi (sering dalam lingkungan pengaruh yang berbeda), di mana orang menemukan dirinya. Konsep perangkat peran berkesimpulan bahwa struktur sosial berhadapan dengan manusia dengan tugas artikulasi komponen-komponen dari kerangka peran yang tidak terhitung.

C. Rangkuman

Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membingbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan yang dilakukan seseorang di masyarakat merupakan penejawantahan kedudukan seseorang di masyarakat. Sedangkan kedudukan sendiri merupakan unsur statis, peranan lebih banyak sekedar fungsi. Sehingga setiap individu yang menduduki suatu posisi akan menjalankan suatu

peranan. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing individu dalam kehidupan masyarakat (Hamid, 2001:196).

Status adalah kedudukan dalam sistem sosial dan peranan adalah yang diharapkan atau perilaku normatif yang melekat pada status. Status memiliki dua aspek, yaitu status mempunyai aspek struktural dan aspek fungsional. Pada aspek yang pertama sifatnya hirarkis, artinya mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya secara relative terhadap status-status lain. Sedangkan aspek yang kedua dimaksudkan sebagai peranan sosial yang berkaitan dengan status tertentu (Poloma, 2004:177).

Kedudukan atau status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut. Kedudukan sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya (Soekanto, 2006:216).

Pola-pola yang mengatur hubungan timbal-balik antar individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakat serta tingkah laku individu merupakan sistem sosial. Dalam hubungan timbal-balik, kedudukan (status) dan peranan individu mempunyai arti yang penting karena langgengnya masyarakat tergantung daripada keseimbangan kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat (Soekanto, 2006:216).

Menurut Merton yang dikutip oleh Bernard Raho setiap status bukan saja memiliki satu peran melainkan sejumlah peran. Dia menamakan peran-peran itu dengan perangkat peran (*role-set*). Perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki status-status sosial khusus (Merton,

1957:369). Setiap individu dalam masyarakat memiliki bermacam-macam status, dan masing-masing status memiliki berbagai macam peran. Peran yang banyak itu dinamakan *role-set* atau perangkat peran (Benard Raho, 2007:67).

D. Suggested Reading

Bacalah buku Soeprapto, Riyadi.2002. *Interasionisme Simbolik*. Malang: Averros Press.

Untuk melihat peranan sosial sebaiknya mahasiswa sosiologi memahami gejala yang disebut *role distance* dimana seseorang dalam memerankan peranannya merasa tertekan dan merasa tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, dengan demikian seseorang tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan sempurna, dimungkinkan orang tersebut berada di lingkungan sosial yang berbeda. Lingkaran sosial adalah kelompok sosial dimana seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan perannya (Soekanto, 2006:270).

E. Latihan

Coba berikan contoh tentang *role distance*!

Apa yang ada pahami tentang peran?

Bagaimana konsep peran menurut beberapa ahli?

F. Daftar Istilah

Status adalah kedudukan dalam sistem sosial dan peranan adalah yang diharapkan atau perilaku normatif yang melekat pada status.

Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

BAB V

SISTEM SOSIAL KEBUDAYAAN DAN AGAMA

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa diharapkan mengetahui kebudayaan yang hidup pada suatu masyarakat.

Mahasiswa juga memahami dasar dari pola pikir, tingkah laku, dan nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

B. Uraian Materi

Agama disatu sisi lain memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai budaya yang ada, sehingga agama pun bisa berjalan atau bahkan akomodatif dengan nilai-nilai budaya yang sedang dianutnya. Pada sisi lain, karena agama sebagai wahyu dan memiliki kebenaran yang mutlak, maka agama tidak bisa disejajarkan dengan nilai-nilai budaya setempat, bahkan agama harus menjadi sumber nilai bagi kelangsungan nilai-nilai budaya itu. Disinilah terjadi hubungan timbal balik antara agama dan budaya.

Herskovist memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari suatu generasi ke generasi lain. Sementara, menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan struktur-struktur sosial, religious dan lain-lain. Demikian pula, Edward B. Tylor berpendapat, bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Parsudi Suparlan secara lebih spesifik menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan secara lebih spesifik

menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan cetak biru bagi kehidupan, atau pedoman bagi kehidupan masyarakat, yaitu merupakan perangkat-perangkat acuan yang berlaku umum dan menyeluruh dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan para warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

Kebudayaan yaitu merupakan sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan masyarakat. Dengan demikian kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, tampaknya tradisi sudah terbentuk sebagai norma yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat.

Hubungan kebudayaan dan agama, dalam konteks ini agama dipandang sebagai realitas dan fakta sosial sekaligus juga sebagai sumber nilai dalam tindakan-tindakan sosial maupun budaya. Agama dan sistem kepercayaan lainnya, seringkali terintegrasi dengan kebudayaan. Agama tidak hanya dapat didekati melalui ajaran-ajaran atau lembaga-lembaganya, tetapi juga dapat didekati sebagai suatu sistem sosial di antara realitas sosial yang lain. Talcott Parsons menyatakan bahwa “agama merupakan suatu komitmen terhadap perilaku; agama tidak hanya kepercayaan, tetapi perilaku atau amaliah”. Sebagai

realitas sosial, tentu saja ia hidup dan termanifestasikan di dalam masyarakat.

Sekalipun agama dan kitab suci diyakini berasal dari Tuhan, tetapi penafsirannya dilakukan oleh manusia dan pelaksanaannya berlangsung dalam masyarakat (manusia). Agama dan masyarakat saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi jalannya masyarakat, dan selanjutnya pertumbuhan masyarakat mempengaruhi pemikiran terhadap agama.

Hubungan yang erat antara agama dengan masyarakat dan budayanya tidak berarti bahwa agama harus menyesuaikan diri dengan segala yang ada dalam masyarakat begitu saja. Namun, sebaliknya, agama diharapkan untuk memberi pengarah dan bantuan untuk memainkan peranan kritis-kreatif terhadap masyarakat yang dalam banyak hal memang tidak beres. Antara agama dan masyarakat seharusnya terdapat hubungan timbal-balik (dialektis).

Dengan demikian, umat beragama harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai normatif ke permukaan kehidupan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Budaya merupakan kebiasaan manusia dalam melakukan sesuatu untuk kelangsungan hidup mereka dan cara belajar untuk kelangsungan hidup mereka. Dapat dikatakan juga bahwa budaya diperoleh melalui belajar. Kebudayaan dapat diperoleh melalui tindakan teknik dan gagasan, tindakan budaya yang diperoleh melalui teknis antara lain dengan cara makan, minum, berpakaian, berbicara, bertani, bertukang, dan berelasi. Sedangkan kebudayaan yang dapat diperoleh melalui gagasan antara lain fikiran dan dari fikiranlah terwujud seni, tatanan masyarakat, ethos kerja dan pandangan hidup. Dalam pemaparan Yoachim Wach bahwa pengaruh agama terhadap budaya manusia tergantung pada pemikiran manusia terhadap

tuhan. Interaksi sosial dan keagamaan berpola kepada bagaimana mereka memikirkan tuhan, menghayati dan membayangkan tuhan. Tapi hal pokok di dalam agama disebutkan bahwa fungsi agama adalah alat pengatur dan membudayakannya dalam artian bahwa agama dalam kebudayaan itu dalam bentuk etis, seni bangunan, struktur masyarakat, adat istiadat dan lain lain.

Di dalam budaya Indonesia ada lima lapisan budaya yang diwakili oleh lima agama yaitu agama pribumi, Hindu, Budha, Islam dan Kristen.

1. Agama Pribumi

Penyembahan Roh-roh terhadap roh roh nenek moyang mereka yang selalu dilakukan dengan tari – tarian atau melalui seni ukiran ini lah dimana kebudayaan nampak pada agama pribumi dan selain menimbulkan kebudayaan dalam penyembahan roh nenek moyang ini pun menghasilkan solidaritas keluarga yang tinggi. Kebiasaan ini dilakukan di tanah batak, merapu di sumba dan keharingan di Kalimantan.

2. Agama Hindu

Di hindu di tekankan dengan adanya pembebasan rohani dari penindasan sosial untuk menuju kesejahteraan yang utuh. Solidaritas ini diungkapkan dalam kalimat Tat Twan Asi, aku adalah engkau.

3. Agama Budha

Dalam agama budha lebih mengedepankan nilai nilai yang menjauhi ketamakan dan keserakahan dan timbul pula nilai pengendalian diri dan mawas diri dengan menjalani 8 tata jalan keutamaan.

4. Agama islam

Di agama islam menekankan terhadap kepekaan terhadap tata tertib kehidupan yang ada di dalam Syari'ah yaitu dengan melakukan hal yang baik dan

menjauhkan dari yang buruk – buruk dan melaksanakan sholat lima waktu dimana akan timbul ahlak yang mulia di dalam setiap diri manusia itu sendiri dalam pembentukan budaya bangsa.

5. Agama kristen

Kristen mengajarkan atau lebih menekankan nilai kasih dimana di dalam nilai kasih bermakna bahwa manusia melakukan sesuatu untuk orang lain tidak menuntut balasan dan manusia melakukan sesuatu kepada orang lain atau sesama seperti melakukan untuk diri sendiri, dan ini terbukti dengan adanya panti asuhan, rumah sakit sekolah dan pelayanan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dari segi budaya dipandang bahwa agama mengembangkan budaya untuk mensejahterakan rakyat dengan tidak memandang agama, ras, dan suku. Dan agama pula berhasil mengembangkan budaya material dengan munculnya candi – candi dari agama Hindu dan Budha, munculnya pelopor pendidikan dan seni bernyanyi dalam agama kristen, islam pun ikut berkontribusi dalam pengembangan budaya material dengan mendirikan mesjid – mesjid yang berbeda dengan mesjid di arab dimana kubah dari setiap mesjid di daerah – daerah berbeda beda contoh di kudu di mesjid Al- Aqsa. Jadi agama tidak akan berkembang dan tersebar tanpa adanya budaya dan usaha – usaha manusia dalam menyebarkannya ke wilayah – wilayah lain.

C. Rangkuman

Dalam perspektif sosiologis, agama dilihat dari fungsinya dalam masyarakat yaitu salah satunya adalah memelihara dan menumbuhkan sikap solidaritas diantara sesama individu atau kelompok. Solidaritas merupakan bagian

dari kehidupan sosial keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat beragama, atau solidaritas merupakan ekspresi dari tingkah laku manusia beragama. Agama bersifat fungsional terhadap persatuan dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan agama untuk menopang persatuan dan solidaritasnya.

D. Suggested Reading

Sebaiknya Anda memahami beberapa simbol keagamaan menurut Geertz, yakni *modes for reality* dan *modes of reality*. Yang pertama menunjukkan eksistensi agama sebagai suatu sistem yang dapat membentuk masyarakat kedalam *cosmic order* tertentu, sementara itu sisi *modes of reality* merupakan pengakuan Geertz akan sisi agama yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan perilaku manusia. Oleh karena itu, ia menerapkan pandangan-pandangannya untuk meneliti agama dalam satu masyarakat.

E. Latihan

Coba Anda kenali beberapa peran agama di bawah ini. Berikan contohnya:

1. Faktor *kreatif*, yaitu faktor yang mendorong dan merangsang manusia baik untuk melakukan kerja produktif maupun karya kreatif.
2. Faktor *inivatif*, yaitu faktor yang mendorong, melandasi cita-cita dan amalan perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
3. Faktor *sublimatif*, yaitu meningkatkan dan menguduskan gejala kegiatan manusia bukan hanya dalam hal-hal yang bersifat keagamaan saja, namun juga yang bersifat keduniaan.
4. Faktor *integratif*, yaitu mempersatukan pandangan dan sikap manusia serta memadukan berbagai kegiatannya,

baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam berbagai penghayatan agama untuk menghindarkan diri dari ketidakserasian dan perpecahan yang pada gilirannya mampu menghadapi berbagai macam tantangan hidup.

F. Daftar Istilah

Kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak.

BAB VI

SISTEM SOSIAL POLITIK DI INDONESIA

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa memahami sistem sosial politik di Indonesia yang tidak bisa lepas dari sistem politik yang dikembangkan di Indonesia.

Mahasiswa juga memahami sistem demokrasi. Demokrasi mengandung pengertian yang *ambigiu* serta tidak tunggal maknanya. Negara mana pun dapat mengklaim sebagai negara yang paling demokratis sekalipun bekas komunis seperti Rusia dan Eropa Timur. Bahkan pengertian demokrasi seringkali dijadikan instrumen untuk memanipulasi kepentingan elit penguasa. Dengan alasan untuk kepentingan sebagian besar masyarakat, para penguasa tidak jarang mengeksploitasi dan menindas hak-hak rakyat, memberangus kreativitas dan intelektual demi mempertahankan *status quo*.

Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami demokrasi sebagai tipe ideal (*ideal type*) dan sekaligus pilihan rasional (*rasional choose*) bagi setiap negara dalam menjalankan roda pemerintahannya¹. Masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda dalam menerapkan demokrasi yang ideal. Ada yang menganut demokrasi liberal, monarki konstitusional, demokrasi pancasila dan sosial demokrasi.

B. Uraian Materi

Banyak Filosof atau para pemikir yang mengkaji terhadap eksistensi serta perkembangan hubungan masyarakat dan negara, di antara para tokoh itu adalah Emile Durkheim. Dalam konteks ini, kepentingan penyusunan buku, penyusun

akan membahas mengenai kontribusi pemikiran Durkheim tentang masyarakat, negara, dan bagaimana hubungan antara keduanya. Dalam bagian ini, penyusun akan memaparkan beberapa referensi yang mengarah pada penempatan Durkheim sebagai objek kajian.

Namun sebelum itu, sebagai sarana untuk lebih memahami pemikirannya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu konteks mazhab yang mempengaruhi dan mewarnai paradigma pemikiran Durkheim. Di sini, paling tidak ada beberapa pengaruh yang menonjol terhadap beragamanya corak pemikiran sosial, hal itu dapat dilihat, misalnya; dari geografi, biologi, hukum dan antropologi. Pengaruh-pengaruh tersebut banyak melahirkan mazhab pemikiran sosial atau sosiologis. Berkaitan dengan itu, secara umum, menurut Soerjono Soekanto (1990), mazhab pemikiran sosiologi itu dapat dikelompokkan pada; *pertama*, mazhab geografi dan lingkungan. Mazhab ini menguraikan bahwa masyarakat manusia tak terlepas dari tanah atau lingkungan di mana masyarakat tadi berada. Tokohnya adalah Edward Buckle (1821-1862) dari Inggris dan Le Pay (1806-1888) dari Paris. Contohnya Edward menyebutkan bahwa bunuh diri adalah akibat rendahnya penghasilan, dan tinggi rendahnya penghasilan tergantung keadaan alam (terutama iklim dan tanah). *Kedua*, mazhab organis dan evolusioner. Mazhab ini menganalogikan antara masyarakat manusia dan organisme manusia. Tokohnya di antaranya adalah Herbert Spencer (1820-1903), ia menyebutkan bahwa “suatu organisme akan bertambah sempurna apabila bertambah kompleks dan dengan adanya diferensiasi antara bagian-bagiannya”.

Ketiga mazhab formal, Georg Simmel (1858-1918) sebagai tokoh mazhab ini memunculkan pikirannya, yakni pelbagai lembaga di dalam masyarakat berwujud dalam bentuk superioritas, subordinitas dan konflik. Semua hubungan-

hubungan sosial, keluarga, agama, peperangan, perdagangan dan kelas-kelas dapat diberi karakteristik menurut salah satu bentuk di atas atau ketiga-tiganya. Dan *keempat* adalah mazhab hukum, di sini Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap hukum yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat dalam masyarakat. Hukum menurut Durkheim sendiri adalah “*kaidah-kaidah yang bersanksi berat yang berat ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan*”. Ia membagi sanksi pada dua bentuk, sanksi represif bagi solidaritas mekanik dan sanksi *restitutif* untuk solidaritas organis.

Dari keempat mazhab diatas, Soegondo pada konteks organis dan pembagian kerja, banyak para sarjana yang mengkatagorikan Durkheim pada mazhab organis dan evolusioner, di mana Durkheim menyatakan dalam karyanya *The Division of Labor in Society* bahwa unsur baku dalam masyarakat adalah faktor solidaritas. Yakni dibedakannya antara solidaritas mekanik dan solidaritas non mekanik. Kedua solidaritas tersebut, menurut Kenneth Morrison (1995) telah melahirkan dua bentuk masyarakat, yakni masyarakat sederhana-primitif (*Segmental*) dan masyarakat modern-serba kompleks (*Advanced*). Untuk yang disebutkan belakangan, mereka dalam kesehariannya menjadi lebih banyak bersentuhan dengan negara. Karenanya, di masyarakat model tersebut--tidak berarti di masyarakat sederhana tak sama sekali bersentuhan dengan suatu negara-- negara menempati posisi ‘penting’. Selanjutnya untuk pembahasannya akan diuraikan di bawah ini.

Berkenaan dengan pandangan Durkheim tentang konsep masyarakat, dalam tulisan Peter Belharz (2002: 105) disebutkan bahwa “Durkheim berpendapat bahwa masyarakat bukanlah “sekedar jumlah total individu-individu”, dan bahwa

“sistem yang dibentuk oleh bersatunya mereka itu merupakan suatu realitas spesifik yang memiliki karakteristiknya sendiri” misalnya suatu partai politik atau suatu gereja, di samping terdiri dari anggota-anggota individual juga memiliki struktur, sejarah, pandangan-dunia dan kultur yang terlembaga, yang tidak dapat diterangkan dalam kerangka psikologi individual. “Kalau kita berangkat dari individu” ujar Durkheim, “kita tak akan bisa memahami apa yang terjadi dalam suatu kelompok”. Ia sama sekali menolak gagasan bahwa masyarakat bermula dari kontrak sosial antar-individu, dan menyatakan bahwa “dalam seluruh proses evaluasi sosial belum pernah ada satu masa pun di mana individu-individu diarahkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang cermat untuk bergabung ataupun tidak bergabung ke dalam kehidupan kolektif, atau ke dalam kehidupan kolektif yang satu daripada yang lain.” Bagi Durkheim, masyarakat--prinsip asosiasi--adalah yang utama, dan “karena masyarakat secara tak terbatas mengungguli individu dalam ruang dan waktu, masyarakat berada dalam posisi yang menentukan cara bertindak dan berpikir terhadapnya”.

Adapun kaitannya dengan perkembangan yang dialami masyarakat, Durkheim berpandangan, seperti yang dikutip Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden (1986: 11), bahwa masyarakat itu tidak akan tetap sebagaimana keadaannya sekarang, yaitu suatu tumpukan dari daerah teritorial yang saling berkaitan, melainkan akan menjadi sistem ikatan nasional yang luas. Perubahan struktur dengan sendirinya menuntut dasar moralitas yang baru.

Apabila di atas Durkheim mengaitkan masyarakat dengan aspek individualitas sebagai unit subordinasi dan, aspek moralitas sebagai fakta sosial, maka di sini, dengan mengambil suku-suku Aborigin di Australia, yang dianggapnya sebagai contoh masyarakat yang paling “murni”, ia menyebutkan

masyarakat memiliki keterkaitan dengan Tuhan, di mana ide ketuhanan pada dasarnya adalah refleksi dari masyarakat itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, Durkheim cenderung mengadakan identifikasi antara “Tuhan” dan “masyarakat”. Pada konteks inilah, Durkheim ingin mengaitkan realitas masyarakat dengan pemahaman keagamaan yang ia kuasainya.

Dengan paparan tiga konteks tersebut di atas--tentunya dari sekian banyak perspektif--sesungguhnya konsep masyarakat dalam pandangan Durkheim, dapat diambil sebuah konklusi, bahwa masyarakat adalah *sinergitas individu-individu yang membentuk realitas sosial spesifik yang memiliki karakteristik keterkaitan pada segala peraturan moralitas, hukum, negara, dan Tuhan atau agama. Dan semua karakteristik itu sendiri adalah fakta sosial.*

Kemudian, dengan pandangan Durkheim tentang “masyarakat” yang dikaitkan dengan tiga konteks itu, yakni individu sebagai unit *sub-ordinat*; moralitas sebagai pakta sosial dan Tuhan sebagai refleksi, setidaknya kita dapat memahami bahwa *pertama*, individu tidak akan pernah menjadi signifikan unit analisis terhadap lingkungan sosial. Karenanya, untuk memahami realitas sosial atau kelompok, Durkheim cenderung untuk menempatkan masyarakat sebagai unit analisis sosialnya. *Kedua*, masyarakat dalam perkembangannya akan senantiasa mengalami dinamika dan serba hubungan. Karena dalam berbagai hubungannya itu, mereka senantiasa dilingkari oleh peraturan-peraturan--baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Di sini anggota masyarakat atau individu harus mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk--hal ini, peraturan tersebut berkaitan dengan moralitas--, dan mengetahui mana yang benar dan salah--hal ini, peraturannya berkaitan dengan hukum, yang lebih spesifik diatur oleh ketentuan lebih besar, yakni, negara. Dan dari sinilah masyarakat mulai akan bersentuhan selalu, baik

langsung ataupun tidak langsung, dengan negara. Kesemua peraturan itu menjadi fakta sosial.

Dan *ketiga*, masyarakat dicoba dihubungkan dengan asal muasal adanya mereka, siapa yang menciptakan mereka di bumi ini?, dan apa yang harus mereka kerjakan dalam mengimani sang pencipta mereka? Untuk keperluan itu, seperti yang dipaparkan di awal, masyarakat merupakan ciptaan Tuhan dan bahkan mengidentifikasikan antara keduanya. Dan Tuhan sebagai pencipta sendiri merupakan refleksi dari masyarakat. Maka slogan *Vox Populis Vox Dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan) barangkali menginspirasi pemikiran ini, atau mungkin sebaliknya, jargon itu terinspirasi oleh teori Durkheim ini.

Dari konteks ini, masyarakat bukan saja harus ada untuk mengatur kelakuan manusia, dan membentuk manusia menurut wajah serta gambarannya sendiri, melainkan juga sebagai sumber dan objek semua kegiatan keagamaan. Tetapi masih ada lagi: manusia juga memperoleh dari masyarakat katagori-katagori kognisi (pengenalan) yang fundamental. Sebab, di dalam mengatur pengalamannya, manusia menggunakan katagori-katagori seperti waktu dan ruang, sebab dan akibat, kekuatan dan sebagainya. Menurut Durkheim katagori-katagori ini merupakan produk kehidupan sosial. Maka kekuatan keagamaan yang dialami di dalam perayaan kolektif, merupakan bentuk pertama dari pengertian umum "kekuatan". Semua pengertian ruang dan waktu, sebab akibat adalah berasal dari pengalaman dan kekuatan keagamaan.

Jadi konsekuensi logis dari dikaitkannya masyarakat dengan Tuhan, adalah di mana agama menjadi sesuatu yang *necesery condition* dalam masyarakat. Jadi masyarakat adalah manusia-manusia yang memeluk suatu agama, dan tentunya bertuhan. Agama dan Tuhan menjadi energi sekaligus ciri dari masyarakat itu sendiri. Untuk yang disebutkan pada poin kedua, sungguh telah mengarahkan Durkheim untuk berbicara

tentang negara. Terlepas apakah itu secara eksplisit atau implisit, yang jelas Durkheim pun di berbagai kesempatan membicarakannya. Untuk keperluan itu penulis akan mencoba menguraikan sekelumit tentang konsep negara menurut Durkheim.

Banyak definisi atau pengertian tentang negara yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Di antaranya bisa digambarkan sebagai berikut::

1. Georg Jellinek: “Negara merupakan organisasi tertinggi dari bangunan hukum satu sisi dan bangunan masyarakat di sisi lain.” Di sini Jellinek mendefinisikan negara dari dua sudut atau segi, yakni, pandangan *yuridis* dan pandangan *sosiologis*. Pandangan yuridis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan hukum, sementara pandangan sosiologis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat. Pandangan Jellinek ini dikenal sebagai teori dua segi (*Zweiseiten Theorie*)
2. Robert A Dahl: “*The State is the ultimate regulator of the legitimate use of force within its territory. This does not mean that the state is the only institution in society to use force. There is, of course, criminal violence, sporting violence and parental violence. Nor does our definition mean that the state is maintained in being solely by force*”.
3. Harold J. Laski: “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk tercapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang

harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.” (*The State is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a groups of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which bots individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon the all*).

4. Roger H. Soltau: “Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”.
5. Max Weber: “Suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.
6. Robert M. MacIver: “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tertentu diberi kekuasaan memaksa”.
7. Prof. Mr. Soenarko: “Negara itu ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan (*soverein*)”.
8. O. Notohamidjojo: “Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaan”.
9. Prof. R. Djokosoetono, S.H.,: “Negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama”.

10. G. Pringgodigdo: “Negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada: pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa (*national*)”.
11. Dr. W.L.G. Lemaire: “Negara itu kelihatan sebagai suatu masyarakat manusia yang berteritorial yang diorganisir”.
12. Prof. Dr. J.H.A. Logemann: “Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”.
13. Prof. Miriam Budiardjo: “Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Dari beberapa pandangan tentang batasan negara tersebut di atas, dapat dipahami secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan negara adalah “organisasi tertinggi masyarakat yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya (masyarakat) di bawah perundang-undangan (hukum) yang jelas dan tegas”.

Selain beragam definisi, negara juga dapat diuraikan dari sisi aspek-aspek yang melakat di sekitarnya. Berkaitan dengan aspek-aspek negara tersebut, Edward S Greenberg, seorang ahli ilmu sosial, seperti dikutip Arif Budiman (2002), memperkenalkan empat aspek negara yang dianggap penting untuk dipilah-pilah. Empat aspek itu adalah: negara, rejim, aparat birokrasi dan kebijakan. Berikut di bawah ini diuraikan aspek-aspek negara tersebut:.

Pertama, negara. Larson, seperti dikutip oleh Stephani Lawson dan Arief Budiman, mengatakan bahwa negara adalah “sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumnya,” sementara pemerintah “cuma sekedar agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah masyarakat politik.” Sementara itu Calvert, seperti juga di kutip Lawson dan Arief Budiman, mengungkapkan negara adalah “komunitas yang diorganisir untuk suatu tujuan politik; pemerintah adalah individu atau sebuah tim dari individu-individu yang mengambil keputusan yang memberi dampak bagi warga sebuah masyarakat.”

Bertitik tolak dari uraian di atas tampak bahwa negara bukan sekedar dalam arti pemerintah. Namun, negara merupakan sebuah pakta dominasi dari satu atau beberapa kelompok masyarakat untuk suatu tujuan tertentu. Dalam sebuah negara kapitalis misalnya, tujuan negara adalah mengembangkan sistem kapitalisme bagi rakyat yang dipimpinnya. Di negara sosialis, juga misalnya, tujuan negara adalah menjalankan sistem komunisme atau sosialisme bagi rakyat yang dipimpinnya.

Kedua, rezim. Aspek kedua dari negara adalah “rezim”. Dalam kamus politik rezim adalah pemerintahan yang berkuasa. Sementara dalam pengertian populernya, rezim seringkali diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang menguasai negara. Contohnya, rezim SBY, rezim Soekarno, rezim George W Bush, atau rezim Marcos. Pengertian ilmiahnya, seperti dirumuskan Stephen D. Krasner, rezim adalah lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa sebuah negara. Dalam pengertian yang kedua, rezim bisa otoriter, demokratis atau variasi antara keduanya. Perubahan rezim berarti perubahan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan..

Bertolak dari itu, rezim yang demokratis berarti penguasa negara tersebut mengikuti prinsip, norma, aturan dan prosedur yang demokratis dalam pengambilan keputusannya. Rezim yang otoriter adalah sebaliknya.

Ketiga, aparat birokrasi. Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata “biro” (*bureau*) yang berarti kantor ataupun dinas, dan kata “krasi” (*cracy, kratie*) yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, dari sudut ini, birokrasi berarti dinas pemerintahan. Sementara dalam kamus politik Birokrasi memiliki aneka pengertian dan ragam catatan. Antara lain; *Pertama*, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan; *Kedua*, birokrasi merupakan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak likulikunya; Dan *ketiga*, birokrasi sering melupakan tujuan pemerintah yang sejati, karena terlalu mementingkan cara dan bentuk. Ia menghalangi pekerjaan yang cepat serta menimbulkan semangat menanti, menghilangkan inisiatif, terikat dalam peraturan yang jelimet dan bergantung kepada perintah atasan, berjiwa statis dan karena itu menghambat kemajuan.

Adapun konsep aparat Birokrasi dari Greenberg sendiri, menurut Arief Budiman, tampaknya sama dengan teori Max Weber tentang Birokrasi. Para birokrat ini, menurut Greenberg, memang netral dan hanya mengikuti aturan yang sudah ada. Para birokrat sekedar merupakan mesin negara. Tetapi, dalam praktiknya, birokrasi memiliki kekuatan dan kemandiriannya sendiri, yang bisa mempengaruhi kebijakan sebuah organisasi, termasuk organisasi yang bernama negara. Dalam kaitan ini, Greenberg, seperti dikutip Arief Budiman, mengatakan:

“Konsep pejabat birokrasi sebagai pembuat kebijakan dan aktor yang memiliki semacam

kemandirian sendiri pada saat ini sudah banyak dibahas dalam kepustakaan. Para ahli yang menekankan pentingnya negara.....tampaknya secara khusus telah mencurahkan perhatiannya terhadap kesanggupan negara dalam hubungannya dengan besarnya dan kualitas dari aparat birokasinya.”

Kekuatan dan kemandirian aparat birokrasi negara ini, kata Arief Budiman, mungkin dapat dijelaskan kalau kita mengamati kembali teori birokrasi dari Max Weber. Dalam konteks ini Weber menyatakan bahwa di samping tenaga administrasi, kantor harus dipimpin oleh politikus yang bisa mengambil keputusan berdasarkan kebijakannya. Karena itu, dalam negara itu sesungguhnya terdapat dua unsur; tenaga administrasi dan politisi yang ada di puncak pimpinan tertinggi sebuah organisasi atau departemen. Tenaga administrasi adalah posisi teknis, karena itu jabatan ini diduduki oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi teknis tertentu. Sementara orang-orang yang menduduki pucuk pimpinan tertinggi sebuah departemen merupakan jabatan politis, karena menyangkut kebijakan. Karena itu, pejabat yang menduduki jabatan ini diangkat melalui sebuah proses politik seperti pemilihan. Semua ini tampaknya dijadikan satu oleh Greenberg dengan nama aparat birokrasi atau pemerintah.

Lepas dari kaitan di atas, Max Weber, pernah mendeskripsikan sejumlah karakteristik birokrasi dari perspektif tipe ideal (tipologik). Antara lain:

1. Birokrasi menekankan pembagian kerja dengan spesialisasi peranan yang jelas. Pembagian kerja yang jelas dan terinci ini akan membukakan kesempatan untuk hanya merekrut para pegawai yang ahli dalam bidangnya dan memungkinkan masing-masing pegawai sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Birokrasi atau organisasi jabatan ini mengikuti prinsip hirarki kontrol. Artinya, jabatan yang lebih rendah berada dalam kontrol dan pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Setiap pejabat dalam hirarki administrasi ini mempertanggungjawabkan kepada atasannya tidak saja setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya sendiri, tetapi juga setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh bawahannya.
3. Kegiatan Birokrasi ini dilakukan berdasarkan sistem aturan abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan aturan-aturan ini ke dalam kasus-kasus yang khusus. Sistem standar ini dibuat untuk menjamin keseragaman tidak hanya dalam pelaksanaan setiap tugas, terlepas dari berapa pun jumlah orang yang terlibat di dalamnya, tetapi juga dalam koordinasi berbagai tugas.
4. Organisasi jabatan ini menekankan keharusan untuk dapat bekerja dengan penuh dan diiringi dengan penerimaan gaji. Setiap hirarki pekerjaan tertentu memiliki tingkat gaji yang jelas dan tetap. Dengan itu, setiap individu dituntut bisa mengembangkan karya dan karirnya dalam organisasi tersebut.
5. Dalam organisasi ini memungkinkan ada ruang bagi promosi jabatan atau perjenjangan karir didasarkan pada kemampuan, senioritas dan campuran di antara keduanya. Dapat dikatakan sebagai promosi kerja dengan melalui *merit sistem*.
6. Organisasi administrasi yang bertipe birokratis dari segi pandangan teknis murni cenderung lebih mampu mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, birokrasi mengatasi masalah unik organisasi. Artinya, memaksimalkan koordinasi dan pengendalian sehingga akan tercapai tidak hanya efisiensi organisasi, tetapi juga

efisiensi produktif setiap personil pegawai (Ramlan Surbakti: 1992).

Keempat, kebijakan. Kebijakan memiliki pengertian yang bervariasi. Misalnya, dalam kamus politik disebutkan bahwa: 1) kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi; 2) kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

Dan dalam pengertian Arief Budiman, kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Kebijakan ini, menurut Arief Budiman, tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan negara dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Lebih spesifik lagi, kebijakan sesungguhnya merupakan sesuatu yang nyata, tidak abstrak. Dia merupakan produk terakhir dari sebuah proses negara. Dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh negara kita bisa melihat jenis negara tersebut, bentuk rezimnya dan sifat dari birokrasinya.

Lepas dari rumusan aneka definisi negara dan aspek-aspeknya seperti diuraikan di atas, bila kita berbicara negara dari sudut pandang teori sosial klasik, maka negara memiliki keterkaitan dengan masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan Michael Durkheim. Dalam konteks itu, di mana Durkheim mulai bersentuhan dengan wacana konsep negara ketika dianggap karakter masyarakat yang harus beriringan dengan peraturan atau hukum. Hal mana hukum merupakan produk negara, maka dari sinilah ia berbicara tentang apa itu negara? Dan bagaimana hubungannya dengan masyarakat?

Kemudian seperti yang disebutkan dalam bukunya Giddens, Durkheim memulainya dari pembicaraan mengenai sosialisme dan komunisme. Namun demikian, sebenarnya, sebelum itu juga, meski sebatas contoh atau sebutan saja. Yang menjadi fokus pemikirannya tentang negara, saya hanya bisa melihat bahwa ia hanya memperhatikan dari tiga sisi, yakni, *pertama*, konteks masyarakat, moralitas dan hukum; *kedua* sosialisme dan peran negara; dan *ketiga*, negara korporasi dan demokrasi langsung. Dan uraiannya bisa dibaca di bawah ini--untuk sisi pertama sekilas sudah diuraikan sebelumnya.

C. Rangkuman

Pendirian Durkheim tentang negara senantiasa didasarkan pada asumsi bahwa doktrin-doktrin sosialis itu sendirilah yang seharusnya dikenakan macam analitis, yang menuntun doktrin-doktrin sosialis itu ke sistem-sistem gagasan lain; yaitu bahwa teori-teori sosialis itu harus diteliti dalam kaitannya dengan konteks sosial dari mana teori-teori itu berasal. Dalam usaha melaksanakan analisis tersebut, Durkheim memulai dengan menarik garis perbedaan dasar antara sosialisme dan komunisme. Di mana garis perbedaan itu terletak pada bagaimana hubungan antara politik dan ekonomi. Dan menurut pengertian yang dipakai Durkheim, adalah bilamana komunisme didasarkan pada gagasan bahwa ekonomi dan politik harus dipisahkan, maka inti pokok dari sosialisme adalah bahwa sosialisme menyarankan agar kedua bidang tersebut harus diasimilasikan. Sosialisme memperjuangkan 'pengkaitan semua fungsi ekonomi, atau fungsi ekonomi-ekonomi tertentu, yang sedang terpecah, dengan pusat-pusat masyarakat yang mengatur dan sadar'. Dari prinsip sosialisme ini, Durkheim melihat bahwa dasar negara memiliki peran yang signifikan untuk mengelola keteraturan politik dan kesejahteraan ekonomi secara utuh dan menyeluruh.

Berbicara lebih jauh dan khusus mengenai peran negara, berdasarkan kedekatan serta ketertarikannya terhadap teori sosialisme, saya melihat bahwa Durkheim berkonsep, bahwa negara harus memainkan peran moral maupun peran ekonomi; dan pengurangan malaise dalam dunia modern harus dicari pada tindakan-tindakan yang pada umumnya lebih bersifat moral ketimbang ekonomi. Posisi dominan dari otoritas agama dalam tipe-tipe masyarakat terdahulu memberi kepada semua lapisan masyarakat suatu cakrawala bagi aspirasi-aspirasinya, nasihat kepada kaum miskin untuk menerima nasibnya dan instruksi kepada yang kaya bahwa mereka berkewajiban untuk mempedulikan yang kurang mampu keadaannya.

Sedangkan keterkaitannya antara negara dan masyarakat--dalam hal ini masyarakat-masyarakat kontemporer--, dan hal-hal yang bersifat politik. Durkheim terlebih dahulu mengasumsikan adanya pemisahan antara pemerintah dan yang diperintah, dari sini ia menganalisa mengenai negara, dan sifat dari partisipasi politik dalam suatu sistem pemerintahan demokratis, dan ini pula yang merupakan inti dari konsepsinya tentang kecenderungan yang akan mungkin terjadi dalam masyarakat-masyarakat mutakhir, yakni masyarakat politik. Sampai di sini, Durkheim tidak tertarik untuk mensejajarkan atau mempersatukan istilah 'negara'--demikian ia sarankan--dengan masyarakat politik. Namun, harus dibatasi untuk menandai organisasi dari pejabat-pejabat, yang merupakan sarana di mana otoritas pemerintahan difokuskan.

D. Suggested Reading

Mahasiswa hendaknya membaca buku Doyle Paul Jhonson, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 2*, terjemahan Robert M.Z.Lawang, PT. Gramedia, Jakarta.

Mahasiswa perlu memahami tiga komponen yang menjadi analisis Durkheim, *pertama*, adanya otoritas yang dilimpahkan; *kedua*, dilaksanakannya untuk masyarakat yang tidak memiliki keanekaragaman struktural; dan *ketiga*, diterapkan oleh kelompok pejabat tertentu. Dengan mengacu kepada ketiga komponen tersebut, menurut Giddens, Durkheim berusaha memisahkan pendiriannya dari aliran-aliran pemikiran utama yang dipandang telah menyajikan teori-teori yang bertolak belakang dengan negara dan masyarakat; di satu pihak idealisme Hegel dan di pihak lain Utilitarianisme serta Sosialisme. Menurutnya negara tidak 'lebih tinggi' dari masyarakat serta bukan pula semata-mata merupakan rintangan seperti benalu terhadap masyarakat, bilamana negara mengatur apa saja di luar dari hubungan-hubungan ekonomi murni.

Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwasanya kemunculan dan keberadaan suatu negara tak terlepas dari perkembangan yang dialami masyarakat, yakni dari masyarakat sederhana menjadi masyarakat modern. Pada masyarakat modern spesialisasi atau pembagian kerja menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan bersama, dari sini pertumbuhan negara menjadi suatu ciri khas biasa dari perkembangan masyarakat. Namun demikian, Durkheim menandakan--di sini nampak adanya kontradiksi pikiran pada pandangannya mengenai masyarakat dalam konteks peraturan moralitas, hukum, dan negara yang dipaparkan terlebih dahulu--bahwa tidak ada hubungan universal antara masyarakat dan negara, menurutnya "jenis-jenis masyarakat hendaklah jangan dikacau balaukan dengan berbagai negara. Suatu perubahan di dalam sistem pemerintahan dari suatu bangsa tidak semestinya melibatkan suatu perubahan di dalam jenis masyarakat yang berbeda".

Dengan mempersoalkan kaitan antara negara dan masyarakat seperti yang dijelaskan di atas, munculah suatu pemikiran Durkheim tentang perlunya sarana perantara antara

negara dan masyarakat. Berkaitan dengan itu, ia mengemukakan bahwa nasionalisme bisa menjadi sarana perantara emosional, untuk ini, ia menyebutkan nasionalisme hanya sekedar sarana sekunder. Konsepsi ini, menjadikan negara memiliki kesempatan luas untuk memperlebar peran-peran dan kegiatan-kegiatannya ke berbagai komunitas yang beraneka ragam, yang sebelumnya berbeda-beda, tetapi sesudah munculnya nasionalisme, mereka menjadi satu bangsa. Pengakuan terhadap keaneka ragaman tersebut, lebih lanjut menggambarkan hubungan antara teori Durkheim mengenai negara dengan konsepsinya mengenai demokrasi, dan kemudian dari situ dengan seruannya agar ada permunculan kembali dari asosiasi-asosiasi kekaryaan (*corporations*)

Sampai di sini, Durkheim menolak gagasan konsepsi demokrasi tradisional. Untuk ini ia berkata: “terkecuali dalam kasus suku-suku kecil yang begitu maju, tidak ada masyarakat lain yang pemerintahannya dilakukan langsung bersama-sama: pemerintahan itu selamanya ada di tangan satu minoritas yang dipilih, baik karena keturunan maupun karena pemilihan; jangkauan pemerintah tersebut bisa luas atau sempit, tergantung dari keadaan akan tetapi pemerintah tersebut tidak pernah terdiri lebih daripada suatu lingkungan individu yang jumlahnya terbatas.”

Menurut terminologi Durkheim, suatu masyarakat sedikit banyak adalah demokratis sepanjang ada komunikasi dua arah antara negara dan tingkatan-tingkatan lain dalam masyarakat. Menurut Durkheim, ada suatu akibat yang berkesinambungan yang sangat pentingnya, yang bermula dari adanya sistem demokrasi, yaitu bahwa prilaku sosial menjadi mempunyai sifat sadar dan terarah. Banyak segi kehidupan sosial yang dahulu dikuasai oleh adat atau kebiasaan yang tidak dipikirkan, menjadi subjek campur tangan pihak negara.

Negara terlibat dalam kehidupan ekonomi maupun administrasi peradilan, pendidikan bahkan dalam organisasi seni dan sains.

Lantaran itu, peran negara dalam negara demokrasi, bukan hanya mengikhtisarkan dan mengungkapkan pendapat-pendapat serta perasaan-perasaan masa penduduk dengan cara terpecah dan tanpa direnung-renungkan (*unreflective*).

E. Daftar Istilah

Masyarakat adalah sinergisitas individu-individu yang membentuk realitas sosial spesifik yang memiliki karakteristik keterkaitan pada segala peraturan moralitas, hukum, negara, dan Tuhan atau agama. Dan semua karakteristik itu sendiri adalah fakta sosial.

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan

BAB VII

SISTEM SOSIAL TEKNOLOGI

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa memahami beberapa istilah yang berkaitan dengan teknologi, di antaranya: (1) *Hardware aspecti* atau perangkat keras yang terdiri dari obyek fisik dan materil, dan (2) *Software aspect* atau perangkat lunak yang terdiri dari informasi untuk mengontrol perangkat keras. Termasuk ke dalam perangkat lunak adalah otak yang mengelola perangkat keras.

B. Uraian Materi

Adapun pengertian teknologi komunikasi sendiri, kata Rogers, adalah peralatan perangkat keras, struktur organisasi dan nilai sosial yang melaluinya individu mengkolleksi, memproses dan saling mempertukarkan informasi dengan individu lainnya. Adanya teknologi menurut Freckerick Williams (1987; h.4), telah memperluas kemampuan kita untuk berkomunikasi—sedemikian rupa sehingga evolusi komunikasi manusia berada pada jantung evolusi sosial yang tengah dialami spesies manusia.

Bersamaan dengan teknologi komunikasi, dikenal juga teknologi informasi. Dalam bahasa Perancis dikenal kata *informatique* dan dalam bahasa Rusia dikenal kata *nformatika* yang kesemuanya merujuk kepada teknologi informasi. Dalam kerangka ini kita tidak perlu membedakan antara teknologi komunikasi dan teknologi informasi, sebab teknologi komunikasi digunakan untuk keperluan mendapatkan, mengumpulkan, menyimpan, dan memanfaatkan informasi. *Information technology means the collections, storage,*

processing, dissemination and use of information. It is not confined to hardware and software, but acknowledges the importance of mean and the goals he sets for this technology, the values employed in making these choices, the assessment criteria used to decide whether he is controlling the technology and is being enriched by it (Chartrand & Morentz, 1979).

Teknologi komunikasi dan informasi perlu menopang terhadap proses pendidikan. Proses pendidikan yang berkualitas, salah satunya ditentukan dengan perencanaan pendidikan yang berkualitas pula. Perencanaan pendidikan yang berkualitas harus mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia atau masyarakat dalam skala makro. Agar perencanaan pendidikan mampu memenuhi kebutuhan manusia, dalam penyusunannya harus didorong dan dotopang dengan penelaahan, pengkajian, pembacaan dan perhitungan terhadap keadaan kehidupan manusia yang sedang dan akan leading. Proses menelaah, mengkaji, membaca dan memperhitungkan kehidupan manusia yang sedang leading berarti pendekatan kebutuhan sosial dijadikan pertimbangan dalam membuat perencanaan pendidikan. Yang diproyeksikan untuk mendapatkan keberhasilan pendidikan di masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya pendekatan kebutuhan sosial dalam membuat perencanaan pendidikan dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama* perspektif fungsionalisme, dari sisi ini pendekatan kebutuhan sosial dalam membuat perencanaan pendidikan dipandang penting didasarkan pada pertimbangan:

1. Pendekatan ini cocok untuk negara-negara yang mayoritas penduduknya tidak sekolah atau indeks pendidikan yang masih rendah seperti Negara Indonesia;
2. Pendekatan ini berorientasai pada pemerataan yang mendasarkan pada teori homogenisasi. Durkheim

menjelaskan tentang hubungan pendidikan dengan solidaritas sosial. Ia menulis:

"society can survive only if there exists among its members a sufficient degree of homogeneity, education perpetuates and reinforce the homogeneity by fixing in the child from the beginning the essential similarities which collective life demands." (Michael Haralambos and Martin Horborn, 1995: 726).

3. Pendidikan menghubungkan antara individu dengan masyarakat termasuk persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di mana ia hidup;
4. Pendekatan fungsional juga menekankan pada dua hal penting dalam pendidikan masyarakat yakni (a) pendidikan dan aturan sosial (*education and social rules*), (b) pendidikan dan pembagian kerja (*education and division of labour*).

Kedua, Perspektif demokrasi sosial. Perspektif ini memandang bahwa investasi negara diperlukan untuk mengurangi ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh ekonomi pasar bebas. Penganut perspektif ini tidak setuju dengan pandangan fungsionalis yang menyatakan bahwa pendidikan benar-benar menghasilkan kesamaan kesempatan yang sesungguhnya. A.H.alsey percaya bahwa pendidikan gagal memberikan kesempatan yang sama kepada kelas sosial yang lebih rendah seperti yang diberikan kepada kelas atas. Karya-karya Helsey menunjukan bahwa salah satu di antara "kegagalan" pendidikan adalah bahwa anak-anak yang orang tuanya serba kekurangan cenderung diperlakukan secara tidak proporsional. Perspektif demokrasi sosial menegaskan cita-cita liberal perkembangan individu cocok dengan tujuan keadilan sosial.

Proses berpikir dalam pendekatan kebutuhan sosial, titik pangkalnya adalah masyarakat dengan berbagai

aktivitasnya (Ahmadi, 1991: 38). Pembahasannya meliputi aspek-aspek atau komponen kebudayaan manusia seperti keluarga, tradisi-tradisi, adat istiadat, moralitas, norma-norma sosial dan lain sebagainya.

Proses berpikir yang dimaksud dalam pendekatan kebutuhan sosial adalah pola pemikiran manusia yang berkenaan dengan kehidupan sosial yang dijadikan pertimbangan dalam membuat perencanaan pendidikan untuk menyelesaikan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam proses pengembangan pendidikan yang sedang berjalan.

Dalam pandangan A. W. Guruge bahwa pendekatan sosial adalah pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas sekolah guna pemberian kesempatan kepada murid dan orang tuanya secara bebas (Syaefudin Sa'ud, 2007: 234).

Ada tiga aspek yang diperlukan dalam memelihara kehidupan komunitas (John A. Perry dan Erna K. Perry, 1991: 312):

1. Sosialisasi antisipasi. Anggota masyarakat perlu memainkan peran-peran sosial dan okupasional yang semula telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Peran-peran ini perlu dilanjutkan secara selektif berdasarkan fungsi dan kebutuhan sosial. Melalui sekolah mereka mempelajari peran-peran tersebut agar dapat dikuasai dan dimainkan dalam kehidupan mereka di masyarakat. Belajar peran-peran ini termasuk sosialisasi yang akan menghasilkan suatu bentuk kepribadian yang diperlukan oleh masyarakat.
2. Pemaksaan nilai dan norma. Dalam perspektif fungsionalisme disebutkan bahwa masyarakat agar dapat bertahan eksistensinya harus mampu memelihara dan mengaktualisasikan nilai-nilai dan norma yang terdapat dan berlaku di masyarakat. Sekolah menekankan pentingnya

nilai-nilai dan norma yang berlaku di tengah-tengah mereka dan dianut kebanyakan mereka. Dalam kasus masyarakat Amerika ketika derasnya arus imigrasi ke negara tersebut, negara merasa perlu untuk mendidik anak-anak dari latar sosial dan budaya yang berbeda untuk belajar nilai-nilai Amerika. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada para murid nilai-nilai fundamental Amerika, memelihara kesatuan nasional dan solidaritas. Untuk itu perencanaan pendidikan diarahkan kepada kebutuhan atau tuntutan sosial tersebut.

3. Mengajarkan pengetahuan baru. Sekolah juga berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan baru khususnya di tingkat lanjutan.

Ada dua tujuan penggunaan pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan, yaitu tujuan kuantitatif dan tujuan kualitatif. Tujuan kuantitatif, pendekatan ini diusahakan untuk menitikberatkan pendidikan yang mempunyai misi membebaskan rakyatnya dari ketakutan, penajahan, kebodohan, dan kemiskinan terutama bagi Negara-negara berkembang yang kemerdekaannya baru saja diperoleh. Bagaimana pendidikan mampu menghilangkan trauma-trauma tersebut di atas, sehingga rakyatnya tenang, tidak mudah dibodohi orang, dan mampu mengurangi kemiskinan yang dideritanya. Oleh karena itu didasarkan pada kebutuhan itu, pendidikan harus merata bagi seluruh masyarakat yang ada dalam suatu negara yang baru saja merdeka. Dalam tujuan kuantitatif ini, konsep pemerataan pendidikanlah yang diutamakan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Sedangkan tujuan kualitatif, bahwa pendidikan harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan potensi manusia. Didasarkan pada konsep bahwa Sumber Daya Manusia sebagai lokomotif pengembang kemakmuran (Adiwikarta, 1988: 4-9). Artinya selain menyelesaikan permasalahan

tersebut di atas, pendidikan juga harus mampu melahirkan lulusan-lulusan yang cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas emosional, dan cerdas kinestetik. Dengan orientasi empat kecerdasan dari tujuan pendidikan tersebut, bagaimana pendidikan tidak hanya sekedar pemerataan (dalam artian masyarakatnya hanya sekedar mengikuti pendidikan). Akan tetapi ditengah mengikuti pendidikan, bagaimana mereka mempunyai orientasi untuk menumbuhkembangkan potensi diri yang dimilikinya semaksimal mungkin. Sehingga mampu menjadikan dirinya yang menguasai empat kecerdasan tersebut di atas. Dengan keempat kecerdasan yang dimilikinya, manusia akan mampu mengembangkan hidup baik secara sosial maupun ekonomi, sebagai bekal hidup di akherat nanti. Di sinilah unsur kualitatif dijunjung dan dikembangkan.

C. Rangkuman

Pendekatan kebutuhan social dalam perencanaan pendidikan bertujuan pula untuk membangun bangsa. Fungsi pendidikan untuk pembangunan bangsa didasarkan kepada kebutuhan bahwa nilai-nilai dan aspirasi negara bangsa secara rasional dan modern perlu disosialisasikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang cocok karena penanaman nilai-nilai tersebut membutuhkan suatu proses internalisasi yang panjang sejak usia dini. Teori tentang ini dikemukakan oleh John Mayer dkk. Dia berpendapat bahwa pentingnya pendidikan massal modern didasarkan pada kebutuhan sosial yang mendesak pada masa modern ini. Tiga ciri model pendidikan ini (Sanderson, 1991: 501) adalah: (1) Sistem-sistem pendidikan massal dimaksudkan menjadi universal, memiliki standar, dan sangat rasional; (2) Sistem-sistem pendidikan massal modern sangat melembaga pada tingkat dunia. Sistem-sistem itu sama dalam masyarakat yang berbeda di seluruh dunia dan semakin sama sepanjang waktu;

(3) Sistem-sistem pendidikan massal secara khusus diarahkan kepada sosialisasi individu sebagai satuan sosial primer.

D. Suggested Reading

Mahasiswa perlu membaca buku Kamanto Sunarto, 2004. *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Anda diharapkan bisa memahami dua fungsi pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan, *pertama* untuk mentransformasikan nilai-nilai umum yang memberikan "homogenitas" yang dibutuhkan untuk kelangsungan masyarakat dan kemampuan spesifik untuk memberikan "keragaman" yang diperlukan bagi kerjasama sosial. Dalam perspektif fungsional, dengan semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh kesempatan pendidikan, maka peluang terjadi proses homogenitas semakin terbuka khususnya dalam kemampuan-kemampuan dasar dan praktis serta pengetahuan-pengetahuan umum yang sifatnya dasar juga. Kemampuan dan pengetahuan dasar tersebut menjadi modal penting bagi berlangsungnya komunitas.

E. Daftar Istilah

Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras, struktur organisasi dan nilai sosial yang melaluinya individu mengkoleksi, memproses dan saling mempertukarkan informasi dengan individu lainnya.

BAB VIII

SISTEM SOSIAL EKONOMI

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa diharapkan bisa mengenali kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain.

Mahasiswa juga diharapkan memahami istilah modal sosial (*social capital*), terutama bila modal sosial itu dibangun secara sistematis melalui suatu jaringan (*networking*), kepercayaan (*trust*), dan nilai-nilai (*values*) yang melekat dan dikonstruksikan serta disosialisasikan pada setiap individu atau kelompok baik di dalam atau pun di luar lembaga/organisasi.

B. Uraian Materi

Pemanfaatan modal sosial dalam kehidupan dapat dilakukan baik pada level individu, keluarga, kelompok, maupun organisasi/lembaga. Terlebih bagi organisasi yang kegiatannya ditopang oleh aspek keagamaan seperti organisasi/lembaga zakat.

Meski pada masa-masa sebelumnya, lembaga/organisasi yang bergerak pada bidang pengembangan *social entrepreneurship* ini masih sangat jarang, apalagi dijadikan sebagai jalan hidup (*way of life*), namun kini fenomena kemunculan lembaga/organisasi semacam ini semakin nyata dan banyak ditemukan. Bahkan kemunculan lembaga/organisasi zakat, infaq, dan sodakoh di tanah air pada era 90-an ternyata telah mengubah *image* negatif kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) menjadi hal

positif. Selain itu, banyak kalangan yang menjadikan lembaga/organisasi *social entrepreneurship* sebagai jalan hidup.

Fenomena lembaga/organisasi *social entrepreneurship* yang semula dianggap merupakan kegiatan "non-rofit" (antara lain melalui kegiatan amal) menjadi kegiatan yang berorientasi bisnis (*entrepreneurial private-sector business activities*) semakin marak. Namun untuk melihat sejauh mana lembaga-lembaga/organisasi-organisasi tersebut berfungsi dalam mengembangkan usahanya dan mampu memberdayakan masyarakat, maka masih perlu terdapat kajian yang mendalam, terutama dari kemampuan lembaga/organisasi tersebut dalam memanfaatkan modal sosial (*social capital*) yang mereka miliki untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

Kajian modal sosial dalam lembaga/organisasi *social entrepreneurship* dapat didekati dengan perspektif sosiologi. Kajian ini dapat diterapkan dengan meminjam konsep tindakan sosial dari Max Weber yang mengkaitkan dengan kepentingan ekonomi. Melalui karyanya yang sangat terkenal di seluruh dunia, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, 1958 (1904-1905), Weber tampaknya menolak interpretasi kaum materialistik tentang proses sejarah manusia. Dalam buku tersebut, Weber berusaha membalikkan thesis Marx yang menyatakan bahwa superstruktur ditentukan oleh infrastruktur (ekonomi). Weber menyatakan bahwa salah satu faktor penting dari perkembangan kapitalis justru terletak pada aspek superstruktur (ideologi dan agama). Weber memperlihatkan bagaimana semangat untuk mencapai kemajuan yang signifikan di kalangan penganut agama kristen protestan daripada katholik. Realitas semacam ini cukup menarik bagi Weber untuk mengkaji peranan agama dalam kemajuan ekonomi. Menurut Weber, akar pencapaian kemajuan ekonomi Eropa adalah seperangkat nilai dan sikap yang terkandung

dalam etika protestan (khususnya Calvin), yakni kerja keras, hemat, jujur, rasionalitas, dan sederhana. Semua nilai dan sikap ini disebut ‘*ascetism*’. Nilai dan sikap lain yang terkandung dalam etika protestan adalah “*calling*” yang berarti pemenuhan kewajiban yang diletakkan di atas bahu seseorang individu oleh kedudukannya dalam dunia ini. Aspek psikokultural lain lagi adalah “*election*” yang berarti bahwa Tuhan telah memilih untuk memberi berkah sejumlah kecil orang. Berkah dari Tuhan terlihat dari kemakmuran dan kemajuan atas kekayaan dan kondisi ekonomi yang telah dicapai orang-orang terpilih tersebut. Mereka yang tindakannya terdorong oleh ketiga daya tersebut disebut golongan *entrepreneur* (wirausaha). Penjelasan Weber mengenai tindakan subyektif seseorang berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi memberikan diskursus mengenai bagaimana sebuah tindakan dapat memberikan dampak ekonomi kepada pelakunya.

Weber mengemukakan bahwa analisa tindakan ekonomi tidak hanya mengcover “fenomena ekonomi”, tetapi juga “fenomena yang relevan secara ekonomi”, dan “fenomena yang dikondisikan secara ekonomi”, antara lain: *Pertama*, fenomena ekonomi terdiri dari norma-norma ekonomi dan kelembagaan ekonomi yang terbentuk untuk memenuhi tujuan ekonomi (misalnya, perbankan) dipelajari melalui teori ekonomi. *Kedua*, fenomena yang relevan secara ekonomi adalah fenomena non ekonomi yang memberi dampak pada fenomena ekonomi (misalnya ascetic protestanism, sebuah analisa dalam *the protestant Ethic*) dipelajari melalui sejarah ekonomi. *Ketiga*, fenomena yang dikondisikan secara ekonomi adalah fenomena pada tingkat tertentu dipengaruhi oleh fenomena ekonomi (misalnya tipe religi yang cenderung diadopsi sebgaiian tergantung pada jenis pekerjaan yang

dilakukan anggotanya) – dipelajari melalui sejarah ekonomi maupun sosiologi ekonomi.

Secara garis besar Weber membedakan analisa sosiologi tindakan ekonomi dari analisa ekonomi dengan mengajukan 3 (tiga) unsur: (1) tindakan ekonomi adalah sebuah tindakan social (2) tindakan ekonomi selalu melibatkan makna (3) tindakan ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan. Dalam hal itu, terdapat tiga tipe tindakan ekonomi yang berbeda : yang diinspirasi oleh *custom* (termasuk habit). *Convention* (norma) dan *interest*. Tindakan yang ditentukan oleh kepentingan didefinisikan sebagai tindakan instrumental dan berorientasi pada harapan yang identik. Dengan kata lain, tindakan ini mensyaratkan setting sosial dimana aktor lain berpikir dengan cara instrumental yang sama. Misalnya, dalam pasar modern, seorang aktor adalah rasional instrumental dan menganggap orang lain sama rasionalnya.

Sementara Granovetter memperkenalkan konsep “*embeddedness*” dalam menganalisa tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang sangat melekat dalam jaringan hubungan sosial interpersonal dari para aktor. Terdapat tiga proposisi utama yang diajukan dalam sosiologi ekonomi baru (Granovetter dan Swedberg, 1992): Pertama, tindakan ekonomi adalah suatu bentuk tindakan social. Kedua, tindakan ekonomi disituasikan secara social. Ketiga, institusi-institusi ekonomi diinstruksikan secara social. Keempat, kontribusi sosiologi ekonomi baru dalam analisa tindakan ekonomi adalah pada pendekatan jaringan, teori organisasi, dan sosiologi kebudayaan sebagai alat analisa.

Dari sudut pandang kepentingan, argumen Granovetter dapat dibedakan antara level makro dan level kelembagaan pada tingkat kelembagaan, kelembagaan ekonomi dibahas dalam kaitan dengan mobilisasi sumber-sumber untuk tindakan kolektif - suatu posisi yang dikenal baik dalam analisa

kepentingan secara sosiologi. Di tingkat mikro, Granovetter, “ada pertimbangan interaksi manusia yang membatasi penjelasan terhadap kepentingan individu”, ia mencatat lebih abstrak dari aspek mendasar hubungan yang dicirikan ekonomi maupun tindakan lainnya”. Granovetter menambahkan – bahwa tindakan ekonomi tidak pernah sepenuhnya bersifat ekonomi tetapi selalu mencakup elemen non ekonomi. Seluruh tindakan sosial, termasuk tindakan ekonomi, pada tingkat tertentu selalu dipengaruhi oleh “motivasi yang berpusat manusia” seperti “sosiabilitas, dukungan, dan status dan kekuasaan”. Pada tingkat mikro, tindakan ekonomi tidak pernah secara eksklusif diinspirasi oleh kepentingan ekonomi – segera setelah aktor berinteraksi dengan aktor lain juga mulai mempengaruhi, yaitu kepentingan sosial.

Adapun James Coleman memberi batasan modal sosial sebagai “seperangkat sumber daya yang inheren dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial seorang anak”. Coleman menambahkan bahwa modal sosial merupakan “aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial”. Coleman mengemukakan bahwa ahli ekonomi telah gagal memperkenalkan relasi sosial dalam analisa mereka. “cara-cara utama teori ekonomi bergerak dari tingkat mikro aktor tunggal ke tingkat makro yang melibatkan banyak aktor adalah melalui konsep “*agent representative*”. Kumpulan para aktor secara sederhana tidak sesuai dengan fenomena seperti *trust*, sementara *trust* merupakan suatu hubungan antara dua aktor”. Coleman menggunakan tiga subyek untuk menjelaskan hal tersebut : *trust*, pasar, dan perusahaan. Coleman menyatakan pokok-pokok pikirannya, antara lain: *Pertama*, dalam tindakan ekonomi tidak cukup membahas aktor dan kepentingannya, penting pula dibahas “sumberdaya” dan “kontrol” yang dimiliki. Jika seorang aktor

memiliki kepentingan terhadap aktor lain. Kedua aktor tersebut akan berinteraksi. *Kedua*, analisa kepercayaan (trust) bagi Coleman dianggap sebagai suatu pertaruhan dengan kesadaran. *Ketiga*, modal sosial didefinisikan Coleman sebagai adanya relasi sosial yang dapat membantu individu ketika mencoba untuk merealisasikan kepentingannya. Suatu lembaga/organisasi mempresentasikan, misalnya, suatu bentuk modal sosial.

James Coleman juga menyatakan bahwa modal sosial merupakan “aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial” Coleman menunjukkan tiga bentuk yang dicirikan oleh *social capital*, yaitu: kewajiban dan harapan atas dasar sifat dapat dipercaya (*obligations and expectations depend on trustworthiness*), kemampuan saluran informasi (*informations channels*), dan norma-norma dengan sanksi yang efektif (*norms and effective sanctions*). Ketiga bentuk *social capital* ini dapat dibedakan dari bentuk-bentuk modal lainnya, seperti modal dana (*financial capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal manusia (*human capital*). Karena itu, maka modal sosial merupakan investasi sosial, yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan (*networking*), kepercayaan (*trust*), nilai dan norma (*value and norms*) serta kekuatan menggerakkan, dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal lainnya (*economic capital, cultural capital, political capital, and money capital*). Kerjasama atas kepercayaan tidak lepas dari unsur kekeluargaan/kekerabatan dan non-kekeluargaan/kekerabatan. Menurutnya bahwa dalam dalam sistem pertukaran ekonomi terdapat apa yang disebut *F-Connection*. *F-Connection* adalah suatu bentuk hubungan yang dibangun di antara *Families* (keluarga), *Friends* (teman), dan

Firms (perusahaan). Masing-masing bentuk organisasi sosial ini dapat saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya.

Penjelasan Coleman mengenai *social capital* tampaknya menekankan pentingnya keseimbangan antara kajian ekonomi dan sosiologi sehingga yang mendasari keputusan individu dalam menentukan sesuatu tidak hanya didasarkan pada tujuan ekonomi semata, tetapi juga didasarkan atas tujuan sosialnya. Dengan tujuan berimbang anantara sosiologi dan ekonomi, maka akan terbentuk suatu tujuan mencapai modal manusia (*human capital*) atau yang biasa dikenal dengan sumberdaya. Modal manusia itu sendiri dapat berupa ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu.

Sedangkan seorang ilmuwan politik Robert Putnam (1999) memberi definisi modal sosial sebagai “*jaringan-jaringan, nilai-nilai dan kepercayaan yang timbul di antara para anggota perkumpulan, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk manfaat bersama*”. Di sini modal sosial dapat dianggap sebagai investasi sosial, yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan (*networking*), kepercayaan (*trust*), nilai dan norma (*value and norms*) serta kekuatan menggerakkan, dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal lainnya (*economic capital, cultural capital, political capital, and money capital*).

Social capital dalam perspektif Fukuyama harus mengacu kepada kapasitas individu untuk mendapatkan sumber-sumber yang langka dengan memanfaatkan keanggotaannya pada suatu jaringan atau suatu struktur sosial tertentu. Fukuyama mendefinisikan bahwa “*Social capital is a capability that arises within a community of regular, honest, and cooperative behavior, based on commonly shared norms, on the part of other members of that community*”. Dengan

pengertian lain bahwa modal sosial merupakan kemampuan yang muncul dalam suatu komunitas yang normal, jujur, kooperatif, yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku secara wajar pada bagian dari anggota komunitas tersebut.

Fukuyama menyatakan bahwa modal sosial (*social capital*) berbeda definisi dan terminologinya dengan *human capital*. Bentuk *human capital* adalah ‘pengetahuan’ dan ‘ketrampilan’ manusia. Investasi *human capital* konvensional adalah dalam bentuk seperti halnya pendidikan universitas, pelatihan menjadi seorang mekanik atau programmer computer, atau menyelenggarakan pendidikan yang tepat lainnya. Sedangkan modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Modal sosial dapat dilembagakan dalam bentuk kelompok sosial paling kecil atau paling mendasar dan juga kelompok-kelompok masyarakat paling besar seperti halnya Negara (bangsa).

Peter Evans dalam karyanya, *Government Action, Social Capital and Development : Reviewing the Evidence on Synergy* (Evans, 1996) menganalisis kontribusi sinergi pemerintah dengan komunitas lokal pada berbagai studi empirik antara sistem irigasi (Taiwan), tenaga kerja industri (India), organisasi peasant (Mexico). Dalam tulisannya tersebut, Peter Evans menyebutkan bahwa katalisator dari pembangunan adalah terjadinya sinergi antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Keduanya dapat saling berdampingan dan sejajar, tidak bersifat dominatif yang menggambarkan hubungan *vis a vis* seperti dalam teori Marxian. Dalam teori Marxian, hubungan antara negara dan masyarakat selalu digambarkan dalam pola relasi dominasi. Negara memiliki sifat *powerfull* (*berkuasa*), sedangkan masyarakat bersifat *powerless* (pihak yang lemah). Dalam pola demikian kemungkinan untuk terjadinya sinergi akan sulit

tercapai sebab keduanya dalam *mainstream* yang berseberangan.

Menurut Evans, hubungan antara negara dan masyarakat tidak dalam pola dominasi, tetapi dalam kerangka yang sinergis. Dan untuk mendukung terwujudnya sinergi harus ada beberapa prasyarat, yakni: *Pertama*, adanya hubungan yang saling melengkapi (*complementary*). Bentuk hubungan demikian tentunya tidak dapat dilakukan dalam kerangka dominatif. *Kedua*, terjalannya hubungan yang melekat (*embeddedness*) secara kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kelekatan hubungan tersebut, maka membentuk suatu kepercayaan (*trust*) pada masing-masing pihak. Sikap saling curiga dan tidak percaya akan dapat dieliminir melalui kelekatan hubungan dimana didalamnya dilakukan upaya transparansi, komunikasi, dan tanggung jawab (*responsibility*).

Bourdieu (Portes, 1998: 3) dalam tulisannya *the Actes de la Recherche*, mendefinisikan *social capital* (modal sosial) dengan istilah '*the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance or recognition*'. Bourdieu (1986) juga mengemukakan kritiknya terhadap terminologi modal (*capital*) di dalam ilmu ekonomi konvensional dengan mengungkapkan bahwa modal bukan hanya sekedar alat-alat produksi, akan tetapi memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu: (a) modal ekonomi (*economic capital*), (b) modal kultural (*cultural capital*), dan (c) modal sosial (*social capital*).

C. Rangkuman

Pemanfaatan modal sosial dalam kehidupan dapat dilakukan baik pada level individu, keluarga, kelompok, maupun organisasi/lembaga. Terlebih bagi organisasi yang

kegiatannya ditopang oleh aspek keagamaan seperti organisasi/lembaga zakat.

Meski pada masa-masa sebelumnya, lembaga/organisasi yang bergerak pada bidang pengembangan *social entrepreneurship* ini masih sangat jarang, apalagi dijadikan sebagai jalan hidup (*way of life*), namun kini fenomena kemunculan lembaga/organisasi semacam ini semakin nyata dan banyak ditemukan. Bahkan kemunculan lembaga/organisasi zakat, infaq, dan sodakoh di tanah air pada era 90-an ternyata telah mengubah *image* negatif kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) menjadi hal positif. Selain itu, banyak kalangan yang menjadikan lembaga/organisasi *social entrepreneurship* sebagai jalan hidup.

D. Suggested Reading

Anda diharapkan dapat memahami fenomena lembaga/organisasi *social entrepreneurship*. Kenapa kegiatan "non-rofit" (antara lain melalui kegiatan amal) menjadi kegiatan yang berorientasi bisnis (*entrepreneurial private-sector business activities*) semakin marak. Namun untuk melihat sejauh mana lembaga-lembaga/organisasi-organisasi tersebut berfungsi dalam mengembangkan usahanya dan mampu memberdayakan masyarakat, maka masih perlu terdapat kajian yang mendalam, terutama dari kemampuan lembaga/organisasi tersebut dalam memanfaatkan modal sosial (*social capital*) yang mereka miliki untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

E. Daftar Istilah

Modal sosial merupakan kemampuan yang muncul dalam suatu komunitas yang normal, jujur, kooperatif, yang

didasarkan atas norma-norma yang berlaku secara wajar pada bagian dari anggota komunitas tersebut

BAB IX

KONFLIK SOSIAL SEBAGAI ACUAN ANALISIS SISTEM SOSIAL

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi konflik serta berbagai perspektifnya.

Mahasiswa dapat memahami teori-teori konflik yang dijelaskan oleh para ahli.

B. Uraian Materi

Perspektif konflik sosial menyatakan bahwa masyarakat selalu berada pada ruang konflik yang terjadi secara terus-menerus, baik pada tingkat dan skala kecil maupun besar dalam setiap masyarakat. Pandangan perspektif konflik demikian dilandaskan pada sebuah dua asumsi utamanya, yakni pertama bahwa masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan dominan. Dahrendorf menyatakan bahwa: (1) Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial ada di mana-mana; (2) Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik; konflik sosial ada di mana-mana; (3) Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan; dan (4) Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Beberapa definisi tentang konflik itu sendiri yang dikemukakan oleh para sarjana. De Dreu dan Gelfand menyatakan bahwa *conflict as a process that begins when an individual or group perceives differences and opposition between itself and another individual or group about interests and resources, beliefs, values, or practices that matter to*. Dari

definisi tersebut tampak bahwa konflik merupakan proses yang mulai ketika individu atau kelompok mempersepsi terjadinya perbedaan atau oposisi antara dirinya dengan individu atau kelompok lain mengenai minat dan sumber daya, keyakinan, nilai atau paktik-praktik lainnya.

Sementara Robbins menyebut konflik sebagai *a process in which an effort is purposely made by A to offset the efforts of B by some form of blocking that will result in frustrating B in attaining his or her goals or furthering his or her interests*. Dalam definisi ini tampak bahwa konflik dapat terjadi ketika usaha suatu kelompok dihambat oleh kelompok lain sehingga kelompok ini mengalami frustrasi. Kondalkar menyatakan *Conflict "as a disagreement between two or more individuals or groups, with each individual or group trying to gain acceptance of its views or objective over others*. Dari pendapat ini Kondalkar melihat bahwa konflik merupakan ketidaksetujuan (*disagreement*) antara dua atau lebih individu atau kelompok yang mana masing-masing individu atau kelompok tersebut mencoba untuk bisa diterima pandangannya atau tujuannya oleh individu atau kelompok lain.

Kartono & Gulo menyebutkan bahwa konflik adalah ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain. Keadaan mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan, namun bekerja dalam saat yang bersamaan. Konflik biasanya diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik, yang bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*), bisa juga berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non-violent*).

Sedangkan Fisher menyatakan konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan. White & Bednar mendefinisikan konflik sebagai suatu interaksi antara orang-orang atau kelompok yang saling bergantung merasakan adanya tujuan yang saling bertentangan dan saling mengganggu satu sama lain dalam mencapai tujuan itu. Deustch mengatakan bahwa konflik adalah tindakan seseorang individu untuk memenuhi dan memaksimalkan kebutuhannya, menghalangi atau membuat tindakan orang lain jadi tidak efektif, untuk memenuhi dan memaksimalkan kebutuhan orang tersebut, maka terjadilah konflik kepentingan. Cassel Concise dalam Lacey mengemukakan bahwa konflik sebagai "*a fight, a collision; a struggle, a contest; opposition of interest, opinion or purposes; mental strife, agony*". Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa konflik adalah suatu pertarungan, suatu benturan; suatu pergulatan; pertentangan kepentingan, opini-opini atau tujuan-tujuan; pergulatan mental, penderitaan batin.

Pertentangan dikatakan sebagai konflik manakala pertentangan itu bersifat langsung, yakni ditandai interaksi timbal balik di antara pihak-pihak yang bertentangan. Selain itu, pertentangan itu juga dilakukan atas dasar kesadaran pada masing-masing pihak bahwa mereka saling berbeda atau berlawanan. Konflik juga didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama (Achmad Fedyani Syaifudin: 1986: 7).

Simon Fisher, dkk. (2000), dalam bukunya *Working with conflict: Skills & Strategies for Action* (diterjemahkan S.N. Kartikasari, dkk., "Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak), menjelaskan tentang berbagai teori penyebab terjadinya konflik. *Pertama*, teori hubungan

masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh adanya polarisasi yang terus terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda. Sasaran yang hendak dicapai dalam teori ini adalah; (1) meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik (2) mengusahakan toleransi agar masyarakat bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

Kedua, teori negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh adanya posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang dicapai dalam teori negosiasi prinsip ini adalah: (1) membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan mendorong pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkonflik untuk melakukan negosiasi yang dilandasi kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap (2) melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak atau semua pihak (*win-win solution for all*).

Ketiga, teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang terjadi bisa disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau sengaja dihambat oleh pihak lain. Kebutuhan dasar manusia biasanya menyangkut tiga hal, yakni kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: (1) membantu pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan secara bersama-sama mengenai kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi sehingga memperoleh pilihan-pilihan (alternatif-alternatif) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut (2)

agar pihak-pihak yang mengalami konflik dapat meraih kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

Keempat, teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik terjadi akibat adanya identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang hendak dicapai dalam teori ini adalah: (1) melalui fasilitasi komunikasi dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka (pihak-pihak yang berkonflik) (2) meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

Kelima, teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan adanya ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang hendak dicapai dalam teori ini adalah: (1) menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang mengalami konflik (2) mengurangi stereotif negatif yang mereka miliki tentang pihak atau kelompok lain (3) meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.

Dan *keenam*, teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai dalam teori ini adalah: (1) merubah beberapa struktur yang dapat menimbulkan terjadinya ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kesenjangan ekonomi (2) meningkatkan ikatan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mengalami konflik (3) mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, rekonsiliasi, dan legitimasi atau pengakuan.

John Davies, seorang ilmuwan *University of Maryland's Center for International Development and Conflict Management*, seperti dikutip Ahmad Doli Kurnia (2005: 35-36), membedakan tiga pendekatan dalam pengelolaan konflik. *Pertama*, pendekatan berdasarkan kekuasaan (*power-based approach*), menggunakan kekuatan kekuasaan untuk memecahkan semua jenis konflik. Seandainya sifat pemerintahan adalah otoriter (*authorian*), maka pemecahan konflik yang tampak pada tingkat permukaan (*surface*), dan tidak sampai pada tingkat akar penyebab konflik.

Kedua, pendekatan berdasarkan hukum (*right-based approach*). Pendekatan ini biasanya lebih menggunakan hukum, adat, norma, dan sistem hukum sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Tetapi struktur politik di Indoensia memungkinkan untuk melakukan subordinasi penegak hukum pada kepentingan-kepentingan pemegang kekuasaan, sehingga hukum hanya dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan.

Ketiga, pendekatan berdasarkan kepentingan (*interest-based approach*). Pendekatan ini berupaya untuk membangun pemecahan yang mencerminkan nilai, kebutuhan dan kepentingan yang terpendam dalam hati pihak yang bertentangan.

Resolusi Konflik Model Ted Robert Gur

Ted Robert Gur dalam "A Risk Assessment of Ethnopolitical Rebellion" dalam *Measures*, seperti dikutip Ahmad Doli Kurnia (2005: 37), mengungkapkan bahwa dalam jumlah penduduk sebanyak 1 milyar atau 17,7 persen dari penduduk bumi (pada tahun 1995) terdapat 268 kelompok-kelompok penduduk minoritas yang politis dan hidup pada 112 negara. Ironisnya, sebagian besar kelompok-kelompok minoritas yang memiliki potensi untuk berkonflik terkonsentrasi di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia

selatan. Beberapa kelompok yang hidup di wilayah-wilayah tersebut menderita gangguan terjadinya perang sipil yang cukup besar. Dan 40 persen dari 68 pemberontakan ethnopolitik yang aktif di dunia selama 1945-1995 terdapat di kawasan antara Afghanistan dan Filipina.

Ted Robert Gur mengidentifikasi enam kelompok minoritas Asia yang memiliki resiko ethnorabellion yang tinggi, yakni: Timor-Timur, hindu, Pakistan, Lhotshampas (Bhutan), Zomis (Burma atau Myanmar), Turkem (Republik Rakyat China), dan Papua (Irian Jaya).

Sikap pemberontakan ethnopolitik biasanya ditimbulkan oleh: (1) adanya perasaan tidak adil atas penyelesaian yang dilakukan kelompok berwenang (2) adanya pengalaman represi dari kelompok dominan terhadap kelompok lain sehingga menimbulkan rasa dendam dan benci (common grievances) di kalangan kelompok yang direpresif (3) hilangnya kebebasan dan otonomi yang pernah dimiliki oleh suatu kelompok (4) adanya diskriminasi aktif, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya, dianggap dapat mengancam status kelompok (5) adanya organisasi-organisasi militan yang bisa menggalang mobilisasi massa untuk melakukan pemberontakan.

Model *asessment* resiko dimaksudkan untuk mengungkap potensi dan kemungkinan terjadinya letupan pemberontakan, bukan dimaksudkan untuk meramal atau memprediksi. Dengan model *asessment* resiko ini dapat diidentifikasi faktor-faktor apa yang mesti dilihat dan dimonitor sehingga bisa dikelola secara lebih baik.

Coser (1956:62) menyatakan bahwa semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan-hubungan sekunder, seperti misalnya dengan

rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan-hubungan primer di mana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut.

Yang menjadi paradoks ialah, semakin dekat hubungan semakin sulit rasa permusuhan itu diungkapkan. Tetapi semakin lama perasaan demikian ditekan, maka semakin penting pengungkapannya demi mempertahankan hubungan itu sendiri. Karena dalam suatu hubungan yang intim keseluruhan kepribadian sangat boleh jadi terlibat, maka konflik itu, ketika benar-benar meledak, mungkin sekali akan sangat keras.

Dengan demikian, menurut proposisi Coser, bila segala sesuatu dianggap sama, konflik antara dua orang yang saling tidak kenal akan kurang tajam bila dibandingkan dengan konflik antara suami dan istri. Di dalam hubungan yang intim orang dapat mencoba menekan rasa permusuhan demi menghindari konflik, tetapi tindakan itu sendiri dapat menyebabkan akumulasi permusuhan yang akan meledak bilamana konflik tersebut berkembang.

Walau berat bagaimanapun masalahnya ketika konflik meledak dalam hubungan-hubungan yang intim itu, Coser menegaskan bahwa tidak adanya konflik tidak bisa dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas dari hubungan yang demikian. Konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda-tanda dari hubungan-hubungan yang hidup, sedang tidak adanya konflik itu dapat berarti penekanan masalah-masalah yang menandakan kelak akan ada suasana yang benar-benar kacau.

C. Rangkuman

Sebagai makhluk sosial, kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi Ketika berinteraksi, selalu diwarnai

dua hal, yaitu konflik dan kerjasama. Dengan demikian konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2002) diartikan sebagai perpecahan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik Sosial berasal dari ketimpangan kekuasaan dan otoritas dalam dan di antara organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok sosial. Konflik sosial sering muncul tatkala paradigma berfikir masyarakat belum optimal dalam memahami pluralitas yang ada dalam masyarakat itu sendiri, terkadang perbedaan kultur, ras, warna kulit, dan sebagainya dapat mengakibatkan terjadinya konflik sosial.

D. Suggested reading

Mahasiswa perlu membaca buku Kamanto Sunarto, 2004. *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Dalam buku tersebut, dijelaskan mengenai berbagai topik sosiologi, salah satunya tentang konflik. Konflik muncul diakibatkan salah satunya perebutan sumberdaya. Pihak-pihak yang berkonflik saling tergantung satu sama lain, karena kepuasan seseorang tergantung perilaku pihak lain. Jika kedua pihak merasa tidak perlu untuk menyelesaikan masalah, maka perpecahan tidak dapat dihindari. Banyak konflik yang tidak terselesaikan karena masing-masing pihak tidak memahami sifat saling ketergantungan. Karena itu sebaiknya Anda memahami dulu jenis konflik yang terjadi.

E. Daftar Istilah

Konflik sosial adalah terjadinya benturan kepentingan, perbedaan pendapat, harapan yang harus diwujudkan dan sebagainya, yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih, dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, maupun satu organisasi sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, suku bangsa maupun satu pemeluk agama tertentu, yang saling bertentangan atau terjadi ketidaksepakatan.

BAB X

SISTEM KOMUNIKASI SOSIAL

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang sistem komunikasi sosial dalam kehidupan individu, kelompok dan komunitas.

Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami tiga unsur penting yang selalu tampak dalam setiap komunikasi, yakni: sumber informasi, saluran (media), dan penerima informasi (audience). Sumber informasi bisa berasal dari seseorang atau institusi yang mempunyai data dan bahan informasi (pemberitaan, wacana, atau gagasan) untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Saluran adalah media yang digunakan oleh penyampai sumber untuk kegiatan penyampaian pesan (pemberitaan, wacana, gagasan), berupa media interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum. Sedangkan *audience* adalah per orang atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau pihak yang diterpa informasi.

B. Uraian Materi

Sosiologi menjelaskan komunikasi sebagai sebuah proses memaknai yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi, sikap, dan perilaku orang lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, atau sikap, perilaku dan perasaan-perasaan, sehingga seseorang membuat reaksi-reaksi terhadap informasi, sikap, dan perilaku tersebut berdasarkan pada pengalaman yang pernah dia alami.

Fenomena komunikasi dipengaruhi pula oleh media yang digunakan, sehingga media terkadang ikut mempengaruhi isi dan penafsiran terhadap informasi tersebut (Bungin, 2006: 57).

Isi atau pesan dalam komunikasi sosial merupakan penjelasan dari apa yang dikatakan oleh komunikator politik. Di dalam proses sirkular di mana orang mendefinisikan makna segala sesuatu menurut perbuatan mereka, makna yang secara simultan mempengaruhi perbuatan itu dengan cara timbal balik, mereka menggunakan imajinasi. Bila di sederhanakan, menurut Dan Nimmo (2004), seseorang menanggapi rangsangan seketika berdasarkan persepsi atau interpretasinya terhadap rangsangan itu. Isi atau pesan dalam komunikasi sosial terungkap dalam bentuk lambang, bahasa, dan opini publik.

Kegiatan simbolik: Kata-kata dalam pembicaraan politik. Kata-kata dalam politik menjangkau melewati ungkapan yang dikatakan atau dituliskan, kepada gambar, lukisan, foto, film, dan sebagainya. Bahkan kata-kata politik sering ditampilkan secara simbolik berupa (1) lambang-lambang (2) hal yang dilambangkan, dan (3) interpretasi yang menciptakan lambang-lambang yang bermakna.

Sosiolog George Herbert Mead sebagai pelopor interaksionisme simbolik setidaknya mengilustrasikan bahwa dalam pembicaraan politik perlu menjadi pertukaran yang melibatkan lambang-lambang berarti (signifikan). Bahkan terkadang dalam pertukaran ini melibatkan semiotika karena terdapat lambang-lambang atau tanda-tanda yang perlu diinterpretasikan. Sebagai teori, semiotika menjelaskan mengenai segala macam jenis tanda dan makna serta pemaknaannya. Justeru karena tanda itu bermakna (atau dimaksudkan memiliki makna tertentu oleh pemakainya), maka kita (disadari atau tidak) sering (bahkan selalu) berkomunikasi dengan menggunakan tanda. Dalam suatu tindak komunikasi

yang ditujukan untuk mencipta makna (*generating of meaning*) --seperti ketika merayu atau menghardik—kita berkomunikasi dengan tanda.

Bahasa juga merupakan hal yang penting dalam menyampaikan informasi. Namun karena sifat bahasa itu terbatas dan abstrak maka kesalahan dalam penggunaan bahasa ketika menyampaikan pesan sangat mungkin terjadi. Kesalahan-kesalahan tersebut yaitu :

1. *Dead Level Abstracting*, merujuk pada kemandekan pada satu level abstraksi. Abstraksi level tinggi misalnya keadilan, kebebasan, umat manusia, dan ketika kata-kata itu dipakai dalam sebuah pesan yang tidak menyertakan kata-kata pada abstraksi level rendah maka sulit untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh pesan tersebut. Bahasa dalam pesan bisa juga mandek dalam abstraksi level rendah. Sebuah abstraksi pada level rendah biasanya jarang menjadi kesimpulan umum dan seringkali sulit untuk melihat poin yang sedang dibicarakan. Pakar semantic mengatakan bahwa komunikasi yang efektif terentang pada tangga abstraksi ke atas dan ke bawah yaitu mengandung generalisasi pada level abstraksi tinggi namun juga detail-detail spesifik pada level abstraksi rendah.
2. *Undue Identification*, kegagalan menyampaikan pesan karena pengenalan terhadap pendengar dan penonton tidak tepat sehingga bahasa yang digunakan tidak tepat. Komunikator menyamakan anggota kelompok yang berbeda, terlalu menggeneralisir sebuah perbedaan kelompok. *Undue identification* dikarenakan kegagalan dalam mengenali perbedaan kelompok atau individu menyebabkan *stereotyping*.
3. *Two Valued Evaluation* meliputi pemikiran bahwa hanya ada dua kemungkinan jika dihadapkan pada

banyak kemungkinan. Bahasa berperan dalam tendensi ini karena sering hanya dua kata berlawanan yang tersedia untuk mendeskripsikan sebuah situasi.

4. *Unconscious Projection* atau proyeksi tanpa sadar adalah secara tidak sengaja memproyeksikan pengalaman masa lalu, tujuan dan prasangka pada persepsi kita. Para pakar semantic menyarankan bahwa penanganan atas *Unconscious Projection* adalah “menurut saya” diakhir setiap pernyataan para komunikator.

Agar sebuah pesan bisa efektif, maka tim kampanye perlu untuk mendesain sebuah pesan sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku seperti yang diinginkan oleh komunikator. Untuk mendesain pesan ini didasarkan pada (1) strategi yang akan dipilih (2) pesannya relevan dengan pendengar dan penonton (3) pesan didesain untuk mendapatkan perhatian (4) mudah diingat dan (5) membangkitkan motivasi. Pesan-pesan yang dibuat harusnya saling bersinergi dan memperkuat pesan-pesan yang disampaikan melalui saluran yang beragam.

Proses *encoding* atau penyandian atau proses menafsirkan sebuah pesan merupakan proses yang rumit. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi seorang komunikator untuk menyampaikan pesan secara tepat dan “tidak rumit” sehingga mudah ditafsirkan oleh penerima. Harapannya akan tercipta sebuah perubahan perilaku atau keyakinan seperti harapan dari komunikator. Bahasa memegang peranan yang cukup penting dalam penyampaian informasi baik yang berupa verbal, non verbal maupun gambar.

Adapun langkah-langkah untuk membuat dan mengevaluasi pesan yang di komunikasikan kepada pendengar dan penonton :

1. Mengidentifikasi fakta-fakta kunci. Untuk mengidentifikasi fakta-fakta kunci diperoleh dengan melakukan penelitian kepada calon pendengar dan penonton termasuk mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk mendorong pada perubahan perilaku. Fakta-fakta kunci bisa merupakan hambatan dan kesempatan. Penyeleksian terhadap fakta yang dianggap paling penting adalah kunci karena sebuah pesan hanya efektif jika menunjuk pada masalah tunggal. Fakta kunci dapat mendorong kebutuhan untuk 1) mengeliminasi masalah yang ada pada pendengar dan penonton 2) mengoreksi kesalahan persepsi dari pendengar dan penonton 3) memperkuat sebuah keuntungan jika sebuah program diluncurkan 4) memperkuat alasan-alasan yang sudah dimiliki untuk menggunakan sebuah produk atau menyetujui sebuah ide. 5) mengisi sebuah kekosongan
2. Mengidentifikasi Harapan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi harapan dari pendengar dan penonton yang akan memotivasi mereka untuk mengubah perilaku mereka. Tujuannya untuk memilih harapan yang paling persuasif bagi pendengar dan penonton utama. Harapan ini merupakan sebuah keuntungan yang jelas setelah pendengar dan penonton menerima sebuah pesan.
3. Mendefinisikan Dukungan. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan pernyataan dukungan yang berisi alasan mengapa pendengar dan penonton seharusnya mempercayai harapan tersebut. Alasan pendengar dan penonton mempercayainya, bisa karena alasan faktual atau emosional.
4. Menggambarkan Persaingan Untuk Pesan. Meskipun pendengar dan penonton sudah percaya dengan pesan yang diterima namun namun terdapat beberapa faktor

yang membatasi kemampuan pendengar dan penonton untuk mengubah perilakunya, misalnya hambatan dari norma-norma masyarakat atau tekanan dari kelompok-kelompok lain yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Salah satu alasan utama seseorang berubah perilakunya karena pesan yang disampaikan membawa manfaat bagi mereka.

5. Mengembangkan Pernyataan Kesan Akhir Setelah Pendengar dan penonton Menerima Pesan. Kesan pendengar dan penonton setelah menerima pesan dapat diamati dari pikirannya, perasaan, sikap terhadap gagasan atau ide dan perilaku seperti yang diharapkan dalam pesan.
6. Menggambarkan Profil Kebutuhan/Keinginan Pendengar dan penonton. Penting untuk mengidentifikasi profil orang-orang yang berubah perilakunya setelah menerima pesan. Dalam tahap ini, komunikator hendaknya mendeskripsikan tentang 1) Profil orang yang berubah perilakunya karena pesan-pesan yang diterimanya 2) Orang lain yang ingin menyamai atau mengidentifikasikan diri dengan orang tersebut 3) Apakah orang yang sudah berubah perilakunya berusaha untuk mempengaruhi orang lain 4) Apakah orang yang sudah berubah perilakunya tersebut diidentifikasi sebagai orang yang smart dan bertanggungjawab.

Sosiologi memandang media massa sebagai suatu lembaga yang memiliki kekuatan yang sangat besar dalam merubah tatanan kehidupan. Bahkan banyak pihak menilai, media massa menjadi *the fourth power* (kekuatan keempat), selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Media massa merupakan jenis media yang ditampilkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar dan heterogen

sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dalam waktu yang relatif cepat.

Menurut Harold D. Lasswell (1964), setidaknya ada tiga fungsi utama media massa, yakni: *Pertama*, media massa berfungsi sebagai pemberi informasi dan penyampaian berita. *Kedua*, media massa melakukan seleksi, evaluasi, dan interpretasi mengenai apa yang perlu untuk disiarkan. Dengan kata lain media dapat menjadi *gate keeper*—meminjam istilah Kurt Lewin--dari arus berita dan informasi. *Ketiga*, media berfungsi sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai dan kultur dari satu generasi ke generasi.

Sementara Denis McQuail (1987) mengajukan enam ciri khusus dari media massa, di antaranya: *Pertama*, memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan dalam wujud informasi, opini, dan budaya. *Kedua*, menyediakan saluran untuk menghubungkan orang tertentu dengan orang lain dari pengirim ke penerima dan dari khalayak yang satu kepada khalayak yang lainnya. *Ketiga*, menyelenggarakan kegiatannya dalam lingkungan publik. *Keempat*, partisipasi anggota khalayak dalam institusi yang bersifat sukarela, tanpa adanya keharusan atau kewajiban sosial. *Kelima*, institusi media memiliki keterkaitan dengan industri pasar karena ketergantungannya pada imbalan kerja, teknologi, dan kebutuhan *financial*. *Keenam*, meskipun media itu sendiri tidak memiliki kekuasaan, namun institusi ini selalu berkaitan dengan kekuasaan negara karena adanya kesinambungan pemakaian media.

Adapun mengenai pengaruh media massa, De Fleur menyebutkan bahwa media tidak hanya memiliki efek langsung terhadap individu, tetapi juga mempengaruhi kultur, pengetahuan kolektif, dan norma serta nilai-nilai dari suatu masyarakat (Aprilia, 2004). Media massa menghadirkan seperangkat citra (*images*), gagasan, dan evaluasi bagi

audience yang dapat dijadikan acuan perilaku. Pemikiran ini memposisikan *audience* menjadi tergantung pada media massa yang merupakan sumber informasi bagi pengetahuan tentang, dan orientasi kepada, serta apa yang terjadi dalam masyarakat.

Berbeda dengan De Fleur, Lee Loevinger mengemukakan bahwa media massa mencerminkan suatu citra yang ambigu—menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam—sehingga pada media massa setiap orang memproyeksikan atau melihat citranya pada penyajian media massa (dalam Jalaluddin Rakhmat, 1993). Pengaruh media massa terasa lebih kuat lagi karena pada kalangan remaja masing-masing memperoleh banyak informasi tentang dunia dari media massa.

Sementara dari perspektif agenda *setting*, media massa tidak dapat mempengaruhi orang untuk mengubah sikap, namun media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang. Ini berarti media massa mempengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Dan sejalan dengan hal tersebut benarlah pendapat yang mengatakan bahwa informasi seharusnya dapat mengubah dan menambah keyakinan-keyakinan baru (Prisgunanto, 2004: 89). Kebaruan informasi bukanlah semata-mata informasi yang bermuatan nilai matematis tentang perkembangan sesuatu, tetapi lebih pada adanya perubahan sikap lewat pengetahuan. Bila bicara sikap, mau tidak mau harus dibahas tiga elemen dasar, yakni pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan praktek (*paractice*), atau biasa disingkat KAP.

Pemikiran agenda *setting* ini muncul dari perhatian bagaimana khalayak media membentuk dan mengorganisasikan realitas sosial mereka. Dalam hubungan kausalitas ini, titik berat tampak pada sejauh mana kemampuan media mempengaruhi kognisi khalayak. *Gate keeper* media menentukan bobot penyajian informasi berdasarkan kebijakan

media tersebut. Meski demikian, minat khalayak terhadap penggunaan media pun tidak berarti luput dari persoalan kausalitas ini.

Karena itu, ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam memahami penggunaan media dalam komunikasi politik. *Pertama*, media massa mampu menjadi instrumen efektif-efisien untuk mendistribusikan serta mentransformasikan nilai. Proses hegemoni dalam produksi acara menjadi pola yang sangat halus dan acapkali tanpa *reserve* dari para konsumennya. *Kedua*, sensibilitas masyarakat tentang nilai dan bobot informasi yang diberikan media perlu lebih dipertajam lagi agar tidak mudah terjerembab pada pengaruh negatif dari media.

Namun demikian, seorang politikus juga perlu memahami komunikasi masyarakat yang berbeda secara budaya atau yang lebih dikenal dengan istilah komunikasi antar budaya. Konsep komunikasi antarbudaya sangat penting dalam melihat tindakan suatu komunitas masyarakat tertentu. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa masyarakat memiliki persepsi sendiri tentang kekuasaan dalam politik, seperti dalam pemilihan pemimpinnya. Mereka telah mendefinisikannya secara turun temurun dan telah berlangsung selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Maka, segala sesuatu yang datang dari luar, termasuk politik, akan diseleksi dan didefinisikan terlebih dahulu dengan budaya yang telah mereka miliki selama ini.

Budaya yang dibicarakan dalam konteks komunikasi yang terjadi diantara golongan masyarakat meliputi : (1) kepercayaan, nilai-nilai dan sikap. Yaitu kemungkinan-kemungkinan subyektif yang diyakini individu bahwa suatu objek/peristiwa memiliki karakteristik tertentu, dalam hal ini, tidak ada yang benar atau pun salah (2) *worldview*. Yalni cara manusia menempatkan dirinya dalam konteks hubungannya

dengan penciptanya. Masalah-masalah worldview merupakan landasan mendasar dari suatu budaya dan worldview sangat mempengaruhi budaya (3) organisasi sosial. Adalah cara budaya mengorganisasikan dirinya dan lembaga-lembaganya, juga mempengaruhi bagaimana anggota-anggota budaya mempersepsi dunia dan bagaimana mereka berkomunikasi (4) *human nature* (5) orientasi aktivitas, dan (5) persepsi. Yakni proses internal dalam menyeleksi, mengevaluasi, dan mengatur stimuli yang datang ke alat indera manusia.

Beberapa karakteristik yang melekat dan terkait pada budaya sendiri diantaranya adalah:

- Budaya dipelajari, tidak timbul dalam diri manusia.
- Budaya adalah sistem yang dinamis dan selalu berubah.
- Budaya bersifat selektif. Setiap budaya memiliki batasan tertentu dalam memilih yang didasarkan pada asumsi dan nilai dasar yang dianggap bermakna dan penting bagi setiap budaya.
- Berbagai unsur dalam budaya saling berhubungan. Budaya terdiri dari berbagai unsur yang membangunnya. Bila satu unsur disentuh unsur yang lainnya pun akan terpengaruh.
- Budaya bersifat etnosentris. Masyarakat cenderung menempatkan budayanya pada posisi sentral dan berharga, sehingga timbul anggapan budayanyalah yang paling benar, di luar itu, salah.

Komunikasi antarbudaya dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang dipengaruhi oleh berbagai variabel dalam persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses dimana seseorang membangun realitas sosial yang unik melalui atribusi makna ke dalam objek dan kejadian sosial yang terjadi di sekitarnya. Kondisi dan struktur budaya membentuk persepsi terhadap berbagai hal.

Pembentukan persepsi ini tidak hanya membantu mengenali stimulus yang diterima secara sadar, tapi juga

atribusi makna terhadap stimulus yang membentuk realitas sosial. Kesulitan dalam menyampaikan pesan dapat diatasi bila seseorang mengetahui faktor-faktor budaya yang mempengaruhi. Perubahan makna pesan yang disampaikan tidak hanya dipengaruhi oleh pembentukan persepsi yang berbeda, namun juga oleh sikap tak bersahabat yang disebabkan oleh prasangka dan stereotip. Masalah ini dapat diatasi dengan saling berinteraksi dan mencari persamaan antara kedua budaya.

Secara sederhana, stereotip merupakan upaya seseorang untuk memahami sesuatu dalam berinteraksi dengan orang lain. Stereotip merupakan keyakinan yang terlalu digeneralisir, disederhanakan, maupun dilebih-lebihkan tentang sebuah kategori/kelompok tertentu. Stereotip selalu ditujukan kepada kelompok, bukan individu.

Stereotip dapat berakibat kepada hal lain, yaitu prasangka. Prasangka/prejudice adalah sikap yang kaku terhadap suatu kelompok yang didasari oleh konsepsi yang salah. Stereotip dan prejudice bersifat inter-related, merupakan sikap yang dipelajari dari orang tua, pengalaman langsung maupun melalui media massa. Keduanya mempengaruhi proses komunikasi dalam sebuah masyarakat karena mencegah terjadinya kontak antarbudaya. Selain itu, prasangka dan stereotip juga menghasilkan faktor-faktor negatif selama peristiwa komunikasi antarbudaya berlangsung. Bahkan bila hal ini terjadi secara intens, akan mengakibatkan konfrontasi fisik.

C. Rangkuman

Dalam komunikasi sosial, sebagaimana halnya komunikasi, terdapat tiga unsur penting yang selalu tampak dalam setiap komunikasi, yakni: sumber informasi, saluran (media), dan penerima informasi (audience). Sumber informasi

bisa berasal dari seseorang atau institusi yang mempunyai data dan bahan informasi (pemberitaan, wacana, atau gagasan) untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Saluran adalah media yang digunakan oleh penyampai sumber untuk kegiatan penyampaian pesan (pemberitaan, wacana, gagasan), berupa media interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum. Sedangkan *audience* adalah per orang atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau pihak yang diterpa informasi.

D. Suggested reading

Bacalah buku Deddy Mulyana, 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Rosda Karya, Bandung.

Proses komunikasi dalam sebuah masyarakat karena mencegah terjadinya kontak antarbudaya. Selain itu, prasangka dan stereotip juga menghasilkan faktor-faktor negatif selama peristiwa komunikasi antarbudaya berlangsung. Bahkan bila hal ini terjadi secara intens, akan mengakibatkan konfrontasi fisik.

E. Daftar Istilah

Stereotip merupakan upaya seseorang untuk memahami sesuatu dalam berinteraksi dengan orang lain. Stereotip merupakan keyakinan yang terlalu digeneralisir, disederhanakan, maupun dilebih-lebihkan tentang sebuah kategori/kelompok tertentu. Stereotip selalu ditujukan kepada kelompok, bukan individu.

Prasangka/prejudice adalah sikap yang kaku terhadap suatu kelompok yang didasari oleh konsepsi yang salah. Stereotip dan prejudice bersifat inter-related, merupakan sikap

yang dipelajari dari orang tua, pengalaman langsung maupun melalui media massa.

BAB XI

TIPOLOGI MASYARAKAT INDONESIA

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa diharapkan mampu memahami kemajemukan masyarakat Indonesia secara komprehensif. Mahasiswa mengenali sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia dari sabang sampai merauke.

B. Uraian Materi

J.S Furnivall mengilustrasikan bahwa masyarakat Hindia Belanda pada saat di bawah pemerintahan kaum kolonial dianggap sebagai masyarakat *majemuk* yang khas di wilayah tropis. Gambaran yang dikemukakan Furnival memang tidak disangkal oleh hampir semua kalangan ilmuwan. Artinya apa yang dikemukakan Furnivall dianggap memiliki relevansi dengan realitas sosial yang dialami masyarakat pada waktu itu.

Masyarakat majemuk yang demikian itu bisa terdiri dari dua atau lebih bagian yang hidup secara terpisah tanpa ada integrasi dalam satu bingkai tau sistem sosial budaya yang kuat. Lebih nyata lagi, masyarakat Hindia Belanda sebagai satu sistem dianggap memiliki banyak perbedaan, baik dari segi suku, adat, agama, bahasa, maupun budaya. Lebih khas lagi, kelompok yang memiliki kekuasaan secara ekonomi dan politik serta budaya ternyata memiliki ras dan agama yang berbeda dengan kelompok yang dikuasanya. Dengan demikian, masyarakat majemuk di Indonesia terpolakan ke dalam dua kateori majemuk, yakni majemuk secara horizontal dan majemuk secara vertikal.

Salah satu indikasi dari adanya kemajemukan dan kehidupan sosial budaya adalah tidak adanya kesadaran bersama (*collective consciousness*) atau kehendak bersama (*common will*). Setiap masyarakat dari berbagai unsur dan kelompok yang berbeda memiliki kepentingan dan urusan sendiri-sendiri, berbeda-beda, dan tidak saling menopang dan mempertahankan satu sama lainnya. Akibatnya, masyarakat secara keseluruhan tidak memiliki kehendak bersama.

Masyarakat memulai kehidupan mereka pada suatu fase disebut fase primitif, di mana manusia hidup secara nomaden dan terisolir disesuaikan dengan lingkungan alam dan sumber daya makanan yang memberikan kelangsungan hidupnya. Fase primitif ini dicirikan oleh kehidupan manusia dalam kelompok-kelompok kecil (*band*) dan terpisah dengan kelompok-kelompok lainnya. Antara satu kelompok dengan kelompok lainnya seringkali melakukan peperangan untuk memperebutkan sumber makanan.

Pada fase primitif ini, masyarakat menerapkan hukum rimba, yakni suatu hukum yang mengedepankan prinsip siapa yang kuat dia yang berkuasa. Artinya, mereka yang dianggap kuat dan paling dominan dalam kelompoknya akan dianggap sebagai pemimpin atau penguasa kelompoknya. Pemimpin atau penguasa ini memiliki otoritas yang luar biasa besar. Apa pun bisa dilakukan meski harus mengorbankan harta dan martabat anggotanya. Seorang pemimpin atau penguasa dipercaya dapat melindungi para anggota-anggotanya dari gangguan atau ancaman kelompok lainnya.

Fase berikutnya adalah fase bercocok tanam atau agrokultural. Fase ini dilakukan ketika pola pikir masyarakat mulai berubah untuk dapat hidup menetap dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Dorongan menetap sebetulnya bukan hanya oleh keinginan ini saja, tetapi karena ada faktor-faktor eksternal, seperti

lingkungan alam tidak lagi mampu memberikan dukungan yang maksimal terhadap manusia dan populasi penduduk sudah mulai banyak. Dengan demikian, mereka yang hidup secara berpindah-pindah mulai merasa lelah dan bosan karena itu memilih untuk menetap dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang menurutnya bisa memback up atau menopang bagi kehidupannya. Pada fase ini budaya berpindah-pindah masih tetap dilakukan meski pada skala waktu yang relatif lebih lama.

Fase tradisional dijalani masyarakat dengan hidup secara menetap dalam suatu tempat tertentu yang dianggap strategis guna memenuhi berbagai kebutuhan kehidupannya, seperti di pinggir sungai, di gunung, di dataran rendah, di lereng dan sebagainya. Pemilihan tempat ini disesuaikan dengan sumberdaya alam dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya. Mereka mulai membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat dalam bentuk sejenis desa. Jumlah populasinya pun semakin bertambah sehingga dalam suatu desa tidak hanya terdiri dari satu keturunan, tetapi beberapa keturunan yang di dalamnya dibentuk suatu pola pemerintahan yang sangat sederhana. Budaya dan tradisi dalam suatu desa mulai tercipta dan berkembang.

Pada fase tradisional ini masyarakat mulai mengembangkan hukum yang lebih baik ketimbang masa sebelumnya. Hukum yang berkembang bukan lagi hukum rimba, tetapi norma atau aturan yang disepakati bersama. Penetapan suatu hukum dihasilkan dari kesepakatan-kesepakatan seluruh anggota kelompok masyarakat. Hukum tidak lagi dibuat oleh pemimpin atau penguasa seperti pada penerapan hukum rimba, melainkan lebih pada kehendak seluruh anggota masyarakat. Di sini pemimpin atau penguasa hanya sekedar representasi untuk menjalankan amanat dari anggota masyarakatnya.

Fase transisi, kehidupan desa sudah sangat maju dan isolasi terhadap salah satu kelompok masyarakat mulai berkurang. Penggunaan media informasi sudah hampir merata. Hanya secara geografis, kehidupan masyarakat transisi masih berada di sekitar pinggiran kota serta hidup mereka masih mencirikan kehidupan tradisional. Pola pikir dan sistem sosial tradisional masih silih berganti digunakan namun mengalami penyesuaian dengan pola pikir dan sistem sosial yang baru dan inovatif. Dengan kata lain pada masyarakat transisi terdapat ambiguitas antara menjalankan sistem kehidupan lama sembari menyesuaikan dengan sistem kehidupan baru. Sifat mendua ini tercermin dalam pola pikir, sikap, dan perilaku mereka sehari-hari. Pola pikir masyarakat terlihat masih tradisional dan masih memelihara kekerabatan namun perilaku masyarakat sudah mulai memperlihatkan individualis. Ciri yang paling dominan pada fase ini adalah terjadinya proses asimilasi budaya dan sosial yang belum tuntas dan terlihat masih canggung di semua dimensi kehidupan.

Fase modern ditandai dengan peningkatan kualitas perubahan sosial yang lebih konkritb meninggalkan fase transisi. Masyarakat sudah menunjukkan kehidupan kosmopolitannya dengan ciri yang paling dominan dengan menonjolkan karakter individualis dan profesional. Pembagian kerja (division of labor) di antara anggota-anggota masyarakatnya sudah mulai jelas.

Di sisi lain, sekularisme menjadi sangat dominan dalam sistem religi dan kontrol sosial masyarakat serta sistem kekerabatan mulai merenggang atau diabaikan. Anggota masyarakat hidup dalam sistem yang serba modern, kaku, dan formal yang didasarkan atas kepentingan masing-masing elemen masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat modern relatif lebih tinggi ketimbang fase-fase sebelumnya. Sisi-sisi rasionalitas yang mensupremasikan akal sangat ditonjolkan.

Secara demografis, masyarakat modern menempati wilayah-wilayah perkotaan yang cenderung gersang dan jauh dari situasi alami seperti di desa. Penyatuan dengan alam tidak lagi terjadi pada masyarakat modern. Mereka berusaha untuk menundukan dan bahkan menguasai alam, hal yang sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat desa. Pada masyarakat kota, semua jenis tanah bisa disulap menjadi wilayah yang fungsional dengan mengabaikan fungsi-fungsi alam tersebut. Sebagai ilustrasi, wilayah Jakarta yang direpresentasikan modern sudah mengabaikan fungsi-fungsi alam karena kebutuhan perumahan, perkantoran, bisnis dan sebagainya.

Fase postmodern ialah sebuah fase perkembangan masyarakat yang mulai diintrodusir di Amerika Serikat di penghujung tahun 1980-an.

Di Indonesia ciri masyarakat modern diklaim mulai ada sejak 1990-an. Masyarakat modern sejatinya adalah masyarakat modern yang secara finansial, pengetahuan, relasi, dan semua prasyarat sebagai masyarakat modern telah dilalui. Jadi, masyarakat postmodern adalah masyarakat modern dengan kelebihan-kelebihan tertentu di mana kelebihan-kelebihan itu menciptakan pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku terhadap diri dan lingkungan sosialnya yang berbeda dengan masyarakat modern atau masyarakat sebelumnya.

Sifat-sifat yang menonjol pada masyarakat postmodern menurut Bungin (2006: 95-96) adalah:

- Memiliki pola hidup nomaden, artinya kehidupan mereka yang terus bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya menyebabkan orang sulit menemukan mereka secara ajeg termasuk dapat mendeteksi di mana tempat tinggal menetapnya. Hal ini disebabkan karena kesibukan mereka dengan berbagai usaha dan bisnis, akhirnya mereka memiliki rumah di mana-mana.

- Secara sosiologis mereka berada pada titik nadzir, antara struktur dan agen, yaitu pada kondisi tertentu orang postmodern patuh pada strukturnya, namun pada sisi lain ia mengekspresikan dirinya sebagai agen yang mereproduksi struktur atau paling tidak agen yang terlepas dari strukturnya. Berdasarkan hal tersebut, maka merujuk pada pengamatan “orang luar” sesungguhnya pribadi yang secara permanen ambivalensia atau mereka yang ambigu dalam pilihan-pilihan hidup mereka. Namun sesungguhnya pada pribadi-pribadi postmodern hal tersebut adalah pilihan-pilihan hidup yang demokratis dan ekspresi dari kebebasan pribadi orang-orang kosmopolitan.
- Manusia postmodern lebih menghargai privasi, dan kegemaran mereka melebihi apa yang mereka anggap berharga dalam hidup mereka, dengan demikian kegemaran spesifik mereka menjadi aneh dan unik.
- Kehidupan pribadi yang bebas menyebabkan orang-orang postmodern menjadi sangat sekuler, memiliki pemahaman nilai-nilai sosial yang subyektif dan liberal sehingga cenderung terlihat sangat mobile pada seluruh komunitas masyarakat dan agama serta berbagai pandangan politik sekalipun.
- Pemahaman orang-orang postmodern yang bebas pula menyebabkan mereka cenderung melakukan gerakan back to nature, back to village, back to traditional, atau bahkan back to religi, namun karena pemahaman mereka yang luas tentang persoalan kehidupan, maka gerakan kembali itu memiliki perspektif yang berbeda dengan orang

lain yang selama ini sudah dan sedang ada di wilayah tersebut.

Sebagaimana dinyatakan oleh Talcott Parson (dalam Johnson, 1939) bahwa masyarakat diibaratkan dengan keseimbangan yang harus mampu bertahan jika keempat elemen sistem sosial tersebut ada di dalam masyarakat, yaitu: (1) adaptation, (2) goal attainment, (3) integration, (4) latent pattern-maintenance. (Poloma, 1984). Adaptation adalah kemampuan yang dimiliki oleh sistem untuk menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. Goal attainment berkaitan dengan masalah pemenuhan tujuan sistem dan penetapan prioritas di antara tujuan-tujuan. integration yaitu koordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga semuanya fungsional. Sedangkan pattern maintenance menunjukkan pada masalah bagaimana menjamin kelangsungan tindakan dalam sistem sesuai dengan aturan norma yang ada. Kemampuan untuk menyerap sumber daya dari lingkungan (adaptation) itulah yang acapkali menjadi bagian dari kompetisi, konflik yang terus berkepanjangan jika etika menjadi outsider (tidak menjadi bagian yang integral) dari tindakan sosial-ekonomi. Titik rawan konflik dalam berbagai segi terjadi saat para interactants mengabaikan atau kurang memahami etika berinteraksi secara baik. Setiap manusia yang berinteraksi yang memiliki etika sosial akan berusaha memahami pemahaman subjektif orang lain. Komunikasi sosial yang terjadi adalah “komunikasi intersubjektif” sehingga tercapainya suatu kesepakatan, mutual understanding (pemahaman bersama), sisi mana yang bisa diterima oleh orang lain dan sisi mana yang dianggap terlarang (tabu) bagi kedua belah pihak. Pemaksaan makna (bahkan mungkin menjadi “hegemoni makna”) dari pihak tertentu yang dipaksakan kepada orang lain justru akan menimbulkan konflik

terselubung atau terbuka. Konflik terselubung hanya akan terjadi pada individu yang mengalami jiwa inferior atau tidak mampu untuk menampilkan tafsiran makna sesungguhnya kepada orang lain, Jika hal ini terus dibiarkan akan menimbulkan akumulasi kekecewaan, keluhan, dan stress yang sewaktu-waktu bisa muncul jika ada trigger factors (faktor pemicu) untuk melepaskan akumulasi stress tersebut. Munculnya tindakan kekerasan (pembunuhan, vandalisme, anarkisme, brutalisme) acapkali terjadi saat-saat tertentu akibat dari kohesi sosial yang sangat dipaksakan.

C. Rangkuman

Indikasi dari adanya kemajemukan dan kehidupan sosial budaya adalah tidak adanya kesadaran bersama (*collective consciousness*) atau kehendak bersama (*common will*). Masyarakat memulai kehidupan mereka pada suatu fase disebut fase primitif, di mana manusia hidup secara nomaden dan terisolir disesuaikan dengan lingkungan alam dan sumber daya makanan yang memberikan kelangsungan hidupnya. Fase primitif ini dicirikan oleh kehidupan manusia dalam kelompok-kelompok kecil (*band*) dan terpisah dengan kelompok-kelompok lainnya. Antara satu kelompok dengan kelompok lainnya seringkali melakukan peperangan untuk memperebutkan sumber makanan.

Fase berikutnya adalah fase bercocok tanam atau agrokultural. Fase ini dilakukan ketika pola pikir masyarakat mulai berubah untuk dapat hidup menetap dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Fase transisi, kehidupan desa sudah sangat maju dan isolasi terhadap salah satu kelompok masyarakat mulai berkurang. Penggunaan media informasi sudah hampir merata. Fase modern ditandai dengan peningkatan kualitas perubahan sosial yang lebih konkrit meninggalkan fase transisi.

D. Suggested Reading

Bacalah buku Koenjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

E. Daftar Istilah

Collectif conciusness adalah kesadaran kolektif yang dimiliki oleh suatu kounitas.

BAB XII

SISTEM INSTITUSI SOSIAL INDONESIA

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa diharapkan memahami konsep institusi sosial serta sistem institusi sosial yang ada dalam lingkungannya.

B. Uraian Materi

Istilah institusi (dalam bahasa Inggris *institution* menurut ilmu sosiologi berarti pranata) dalam kehidupan keseharian sering dipadankan dengan istilah *institute* (lembaga). Penggunaan istilah demikian harus dibedakan secara tegas. Institusi (pranata) merupakan sistem norma atau aturan yang terkait dengan suatu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus. Sedangkan *institute* (lembaga) adalah badan atau organisasi yang melaksanakannya.

Horton dan Hunt (1987) menyatakan, yang dimaksud dengan pranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Pranata sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat.

Sementara Koentjaraningrat (1979) menyatakan bahwa pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial sejatinya merupakan sesuatu yang bersifat konseptual, dimana keberadaannya hanya dapat

ditangkap dan dipahami melalui sarana pikir, dan hanya dapat dibayangkan dalam imajinasi sebagai suatu konsep atau konstruksi pikir.

Unsur-unsur dalam pranata sosial bukanlah individu-individu manusianya itu, akan tetapi kedudukan-kedudukan yang ditempati oleh para individu itu beserta aturan tingkah lakunya. Karena itu, pranata sosial merupakan bangunan atau konstruksi dari seperangkat peranan-peranan dan aturan-aturan tingkah laku yang terorganisir.

Soerjana Soekanto (1970) menyatakan bahwa pranata sosial di dalam masyarakat harus dilaksanakan dengan fungsi-fungsi: (1) memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya (2) menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat (3) memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial (social control).

Karakteristik umum dari pranata sosial menurut Gillin and Gillin (Soemardjan dan Soemardi, 1964:67-70) di antaranya: (1) pranata sosial terdiri dari seperangkat organisasi daripada pemikiran-pemikiran dan pola-pola perikelakuan yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan (2) pranata sosial itu relatif mempunyai tingkat kekekalan tertentu. Artinya, pranata sosial itu pada umumnya mempunyai daya tahan tertentu yang tidak lekas lenyap dalam kehidupan bermasyarakat (3) pranata sosial itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan (4) pranata sosial merupakan alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya (5) pranata sosial itu mempunyai dokumen, baik yang tertulis maupun tidak. Dokumen ini dimaksudkan menjadi suatu landasan atau pangkal tolak untuk mencapai tujuan serta melaksanakan fungsinya.

Terkait dengan institusi pendidikan, maka bisa dikategorisasikan ada beberapa lembaga pendidikan, di antaranya: Lembaga pendidikan sekolah, lembaga pendidikan non sekolah.

Jalur pendidikan dikenal dengan tiga jalur yakni Lembaga Pendidikan formal, informal, dan nonformal, yang sebenarnya ketiga lembaga tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan melengkapi kekurangan masing-masing, artinya lembaga pendidikan informal tidak mampu lagi memberikan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif, maka muncullah Lembaga Pendidikan Formal dengan penuh kharisma membawa masyarakat dalam dunia peradaban yang tinggi dengan pemenuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Seiring dengan lajunya perkembangan teknologi dan globalisasi yang merambah pada setiap lapisan masyarakat, maka dipandang sangat penting adanya Pendidikan Non Formal.

Kendati demikian, disadari atau tidak bahwa penyelenggaraan Pendidikan Formal tersebut masih ada kekurangan dan keterbatasan, namun harus diakui bahwa sistem persekolahan merupakan jawaban dari adanya kebutuhan masyarakat secara pasti. Dan tidak dapat disangsikan lagi dengan adanya Lembaga Pendidikan Formal tersebut menunjukkan ketinggian budaya dan pola pikir yang sangat maju yang ditandai dengan budaya Sumber Daya Manusia yang terampil dan berpengetahuan luas.

Lembaga Pendidikan Formal adalah suatu lembaga pendidikan yang berstruktur, mempunyai jenjang / tingkat, dalam periode waktu-waktu tertentu. Berjenjang mulai Sekolah Dasar sampai Universitas dan tercakup di dalamnya selain studi akademik umum, juga berbagai program khusus dan lembaga latihan teknis dan profesional. (M. Yusuf, 1986: 627).

Secara struktural, lembaga pendidikan formal harus dilalui dan ditempuh oleh murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Lanjutan Atas sampai Perguruan Tinggi dengan klasifikasi masa belajar yang pasti pula, kemudian direncanakan secara sistematis yakni dengan periodisasi tertentu melalui tahapan-tahapan dan masing-masing sekolah. Seseorang tidak dapat belajar pada Sekolah Dasar atau yang sederajat. Dengan kata lain ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh setiap peserta didik yang mengikuti Pendidikan Formal.

Melalui pendidikan formal, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) serta nilai-nilai (values) atau dengan bahasa lain mencakup aspek kognitif dan psikomotor.

Pendidikan Formal juga hendaklah mampu mengembangkan dan membina kepribadian yang harmonis bagi setiap peserta didik sesuai dengan keberadaannya masing-masing, sehingga mampu hidup dan melanjutkan kehidupan. Pendidikan dalam arti yang hakiki adalah proses pengembangan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melanjutkan kehidupan. Dengan demikian bahwa pendidikan bukanlah semata-mata diorientasi untuk mengorganisir tenaga kerja yang professional untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang tersedia di masyarakat, karena perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan harus mampu membuka wawasan baru dengan spesialisasi yang baru pula. Oleh karena itu pendidikan yang baik harus mampu menciptakan lapangan kerja baru setelah mereka dibekali dengan ilmu, keterampilan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Namun untuk menciptakan format pendidikan yang dapat memenuhi semua aspek kehidupan itu tidak semudah mengucapkan kata-kata, oleh karena itu lembaga pendidikan tersebut harus disiapkan sedemikian rupa sehingga mampu mencerminkan lembaga

pendidikan yang mampu menjawab lapangan kerja. Sederhananya kalau orientasinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian maka dari tingkat SLTA lebih cocok untuk SMU atau Madrasah Aliyah. Sedangkan kalau orientasinya untuk tenaga kerja siap pakai maka sekolah-sekolah kejuruan semacam SMK merupakan pilihan yang tepat.

Apabila kita perhatikan jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui pengetahuan serta nilai-nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui pendidikan formal, maka pengadaan lembaga pendidikan formal, dengan hal ini sekolah, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan masyarakat (Prestise Sosial), tetapi lebih kepada penyediaan tenaga pembangunan menurut kualitas dan kuantitas yang terpadu dan terkontrol. Ini berarti bahwa jenis dan jenjang sekolah formal itu diharapkan sangat perlu diorientasikan tidak hanya pada tingkat lokal dan regional tetapi harus mampu mengarah pada Tujuan Pembangunan Nasional.

Adapun mengenai kedudukan dan fungsi Lembaga Pendidikan Formal di antaranya adalah membentuk kepribadian. Pembentukan kepribadian tiap individu berlangsung secara berkesinambungan dalam lingkungan yang berbeda dengan pola dan pendekatan yang berbeda pula. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan bukan mengambil peranan dan fungsi orang tua dan lingkungan dalam mendidik anak. Tetapi sekolah bersama-sama orang tua dan semua faktor yang dapat mempengaruhi pendidikan anak secara bersama membantu proses pendidikan terhadap anak didik.

Secara informal, di rumah seorang anak mendapat pendidikan sesuai dengan batas kemampuan lingkungan keluarga, atau di tempat ia bergaul seorang anak didik mendapat pendidikan sejauh ia bermain atau bersosialisasi dan

kondisi tempat ia bergaul. Hal itu disebabkan karena kemampuan yang terbatas dan banyaknya tugas dan tanggung jawab lain yang harus dilaksanakan. Ini bukan berarti orang tua atau lingkungan lepas tanggung jawab. Keluarga menyerahkan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya kepada sekolah, kepada guru yang telah mempunyai tugas khusus untuk itu sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Ada beberapa hal yang bisa dikembangkan dari penjelasan di atas untuk lebih rinci menyebutkan kedudukan dan fungsi lembaga pendidikan formal sebagai berikut : *Pertama*, pelaksanaan tanggung jawab pendidikan orang tua bagi anak-anaknya. Tanggung jawab pertama dan utama pendidikan bagi anaknya adalah orang tua. Akan tetapi karena keterbatasan profesi, waktu, dan sebagainya yang dimiliki orang tua untuk mengembangkan potensi anaknya, maka tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya diserahkan kepada lembaga pendidikan formal untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap secara lengkap sesuai pula dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak sari keluarga yang berbeda (Langeveld, 1972: 153). Yang pada akhirnya bagaimana lembaga pendidikan formal tersebut itu diorientasikan pada penyediaan tenaga kerja yang memiliki "human resources" dalam rangka memenuhi tantangan dan tuntutan zaman yang selalu berubah. Penyediaan dalam hal ini terlihat dalam jumlah tenaga kerja yang dihasilkan serta kemampuan dan keterampilannya.

Kedua, lembaga pendidikan formal merupakan agen kemitraan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia.

Ketiga, lembaga pendidikan formal merupakan media pembinaan masyarakat secara profesional sesuai dengan tuntutan zaman.

Adapun unsur-unsur lembaga pendidikan formal terdiri dari: Pertama, bangunan sekolah. Salah satu perbedaan yang sangat mendasar dengan lembaga lain, adalah pendidikan formal dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Kalaupun ada yang di luar lingkungan sekolah Penulis berpendapat hal itu merupakan aplikasi Metodologi Pengajaran yang mengharuskan proses belajar mengajar dilakukan di luar pendidikan sekolah, namun keberadaan gedung sekolah dengan segala fasilitasnya merupakan suatu kemampuan yang tidak bisa lepas dari lembaga pendidikan formal.

Ada perbedaan antara sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dengan rumah atau tempat lain selain sekolah, baik dari segi suasana, tanggung jawab maupun kebebasan dan pergaulan. (Zakiah Darajat, 1996: 72).

Dari segi suasana, sekolah adalah tempat anak belajar, ia berhadapan dengan guru yang selalu berganti-ganti begitupun seorang guru akan menghadapi peserta didik yang berganti-ganti pula setiap tahunnya. Pertemuan antara siswa dengan guru walaupun secara kontinue namun sangat terbatas dengan jam pelajaran dan jumlah mata pelajaran, sangat berbeda dengan di rumah yang dihadapkan pada akhirnya sebagai seorang anak, mendapat kasih sayang yang lebih dari orang tuanya dan jam pertemuan pun lebih banyak ketimbang di sekolah. Kalaupun ada, seorang siswa yang kurang perhatian dari orang tuanya, Penulis berasumsi hal itu merupakan satu kasus yang tidak dialami semua anak didik.

Ditinjau dari sisi tanggung jawab, secara struktur formal, tanggung jawab pendidikan bagi anak-anak adalah orang tua anak tersebut, sedangkan secara struktur profesional tanggung jawab pendidikan adalah lembaga pendidikan sekolah, mengapa demikian ? Sekolah sebagai lembaga pendidikan profesional , tentu disiapkan segala komponennya secara professional juga. Berbeda dengan di rumah, maka

pendidikan bagi anaknya kurang bahkan disebut tidak disipkan secara profesional. Akan tetapi di rumah dengan di sekolah masing-masing punya tanggung jawab yang besar, perbedaannya barangkali hanya pada materi yang harus diterima oleh anak didik. Di sekolah selain tanggung jawab moral atau penanaman akhlak juga dituntut dengan penguasaan materi pelajaran tidak seperti di rumah, bahkan di sekolah seperti yang telah diuraikan di muka harus dapat memberikan keberhasilan dari siswa baik Kognitif, Afektif maupun Psikomotor.

Begitu juga dalam hal kebebasan dan pergaulan memperlihatkan-. perbedaan yang asasi antara sekolah dengan tempat lainnya, yang jelas semakin tinggi tingkat kebudayaan, maka tuntutan-tuntutan masyarakat bertambah pula untuk mengantisipasi hal tersebut di mana rumah dan lingkungan tidak mampu lagi mendidik anak-anak nakal dan sekolah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tentu saja dengan peraturan-peraturan yang tertentu pula.

Kedua, Guru dan Peserta Didik sebagai Subyek Matter. Ukuran keberhasilan dalam lembaga pendidikan formal adalah berkembangnya potensi peserta didik yang mewujudkan pada perilaku yang dipunculkannya. Keberhasilan pengembangan potensi peserta didik tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan gurunya, sehingga komunikasi antar guru dengan peserta didik sulit untuk dipisahkan dan sehingga ukuran keberhasilan pembelajaran dalam lembaga pendidikan formal ditentukan oleh dua unsur dominant tersebut.

Sebagaimana teori Barat, guru dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi afektif, potensi kognitif maupun potensi psikomotor (Ahmad Tafsir, 1992 :74).

Dengan asumsi tersebut guru dan peserta didik merupakan *subject matter* sebuah pendidikan. Dalam hal ini Lembaga Formal.

Ketiga, kurikulum. Dari sisi definisi, kurikulum mempunyai dua arti, yakni kurikulum dalam arti luas dan kurikulum dalam arti sempit. Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum dalam arti luas, yang di dalamnya mencakup tujuan, isi, metode atau Proses Belajar Mengajar dan evaluasi yang setiap kemampuan tersebut sebenarnya saling berkaitan, bahkan masing-masing merupakan bagian integral dari kurikulum tersebut. Dalam lembaga pendidikan formal, kurikulum tersebut terprogram secara berencana dengan acuan dan tujuan yang jelas.

Dengan adanya Pendidikan Formal, banyak sekali manfaat yang dirasakan, secara sempit dapat menolong tugas-tugas yang seharusnya diberikan oleh pendidikan informal akan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan. Seperti telah diulas dimuka bahwa pendidikan formal menghasilkan lulusan dengan dua tujuan yakni memasuki dunia kerja dan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Sekolah umum memang disiapkan untuk melanjutkan, tetapi sekolah kejuruan adalah untuk memasuki dunia kerja (Sutari Imam Barnadib, 1987: 85).

Ketimpangan-ketimpangan yang ada pada lembaga pendidikan formal adalah sebagai berikut: Pertama, materi umum dan materi profesi yang ada pada kurikulum sekolah kejuruan, masih berimbang. Kedua, kurangnya praktek yang dilakukan oleh murid-murid di sekolah kejuruan mengakibatkan mereka (lulusan) sekolah kejuruan tersebut tidak begitu berbeda dengan sekolah umum. Ketiga, ketidaksesuaian antara ketrampilan yang mereka dapat di sekolah dengan apa yang dibutuhkan oleh lapangan kerja (job

gap), atau terdapat jurang antara pekerjaan yang ada dengan tenaga kerja yang tersedia.

Selain keterbatasan tersebut menurut Sulaiman Yusuf (1986:68) pendidikan formal mengakibatkan manusia terus menerus berada dalam setting buatan, yang bersifat modern, yang terkadang membahayakan anak didik sendiri yakni " menjadi golongan manusia tersendiri dalam masyarakatnya " sehingga anak-anak menjadi kelompok eksklusif dari masyarakatnya.

Fenomena tersebut muncul dari adanya kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah kejuruan atau kalaupun masuk perguruan tinggi mereka cenderung memasukkannya pada diploma yang menyiapkan lulusan siap untuk kerja.

Dalam pendidikan formal sering dijumpai ketidak efektifan penggunaan/penfaatan sumber manusia dan finansial yang ditengarai oleh adanya murid yang mengulang atau drop out. (Muri Yusuf, 1986:66).

Banyaknya anak yang mengulang akan menimbulkan terbatasnya dan berkurangnya tempat yang tersedia bagi anak-anak yang naik kelas dan murid baru. Kecenderungan lain ialah tinggal kelas dan mengulang akan menyebabkan anak-anak tersebut drop out. Data dari UNESCO - Januari 1968 mengatakan: pada tahun 1968 setengan dari anak-anak yang memasuki sekolah di Amerika Latin tidak pernah sampai kelas 2, tiga perempatnya mengalami drop out sebelum mereka belajar membaca. Oleh karena itu mereka membutuhkan skill untuk mampu bekerja. Hal yang demikian dapat dilakukan melalui latihan dan training dalam program pendidikan non formal. (T.R. Barteem; 1974;104).

Lebih lanjut Reimer mengemukakan dalam bukunya "*School is Dead*" bahwa sekolah menciptakan diskriminasi sosial. Tidak mungkin setiap negara atau daerah dapat

menyediakan pendidikan untuk semua orang yang ingin bersekolah.

Barteen mengatakan ada celah yang timbul sebagai akibat kekakuan dan tidak fleksibelnya program pendidikan formal terhadap pola kehidupan masyarakat. Program yang ada kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bahkan ada yang tidak sesuai lingkungan anak didik disekitarnya, yang pada akhirnya terjadi "*expectation gap*" yakni terjadinya celah antara pengharapan dan kenyataan. Hal yang demikian sering ditandai dengan adanya "pengangguran terdidik". Seperti gap-gap tersebut merupakan fenomena yang sedang melanda dunia sekolah kendatipun hanya merupakan kasus per kasus dari suatu lembaga formal.

C. Rangkuman

Adanya pranata sosial pada dasarnya bertujuan untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai. Selain itu, pranata sosial juga untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebagai contoh, pranata keluarga mengatur bagaimana keluarga harus memelihara dan mendidik anak. Sementara itu, pranata pendidikan mengatur bagaimana sekolah harus mendidik anak-anak hingga menghasilkan lulusan yang handal.

Begitu pula dengan pendidikan formal yang semakin terperinci atau menghususkan menjadikan seseorang hanya menguasai bidang tertentu dan buta bidang-bidang lain. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menjadikan terobosan alternatif untuk melengkapinya yakni dalam bentuk lembaga non formal. Karena pendidikan non formal dianggap akan dapat membantu memberikan ketrampilan dan pengetahuan sesuai dengan "job marketing", antara lain dengan melatih kembali tenaga kerja terdidik yang belum bekerja dan tidak

mampu bekerja menjadi tenaga siap kerja tentu saja dalam hal ini pendidikan non formal hanya merupakan "Complement" untuk pendidikan formal.

D. Suggested Reading

Bacalah buku Koenjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

E. Daftar Istilah

Pranata sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat.

BAB XIII

PERUBAHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi, konsep dan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi.

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di lingkungannya.

B. Uraian Materi

Perubahan sosial terjadi karena adanya kehendak dan kesediaan anggota-anggota masyarakat untuk merubah pada unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang lama dan mulai beralih menyesuaikan dengan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang baru. Perubahan sosial ini melibatkan semua komponen masyarakat baik pada tingkat individual maupun pada tingkat kelompok yang lebih luas.

Hal-hal penting perubahan sosial menyangkut aspek-aspek sebagai berikut, yakni: perubahan pola pikir masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, perubahan budaya masyarakat, dan perubahan aturan-aturan hukum-hukum masyarakat. Pertama, perubahan pola pikir menyangkut pandangan, persepsi, paradigma, dan interpretasi mengenai realitas kehidupan yang dihadapinya. Setiap anggota masyarakat tentu tidak memiliki pola pikir yang sama, misalnya dalam memandang teknologi modern. Ada sebagian masyarakat yang setuju dan mendukung terhadap teknologi modern ada juga yang tidak setuju dan menolak terhadap penggunaannya.

Perubahan sosial terjadi tatkala anggota masyarakat mulai memahami bahwa penggunaan teknologi modern sangat bermanfaat dalam kehidupannya, contohnya dalam pertanian masyarakat mulai beralih dari pembajakan tanah dengan kerbau dan sapi ke pembajakan tanah dengan traktor dan doser.

Kedua, perubahan perilaku masyarakat menyangkut persoalan perubahan sistem-sistem sosial, di mana masyarakat meninggalkan sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial baru, seperti perubahan dalam memberikan penghargaan lebih baik dan lebih toleran terhadap kelompok lain dalam interaksi sosial.

Ketiga, perubahan budaya masyarakat menyangkut perubahan artefak budaya yang digunakan oleh masyarakat, seperti model pakaian, karya ilmiah, teknologi, dan sebagainya yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, perubahan aturan-aturan hukum-hukum masyarakat menyangkut bagaimana menerapkan aturan dan norma-norma yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Tidak sedikit aturan dan hukum yang berkembang dalam masyarakat akhirnya dirubah karena sudah tidak sejalan dan sesuai lagi dengan realitas sosial di masyarakat. Perubahan-perubahan aturan dan hukum ini berjalan searah dengan pola kehidupan masyarakatnya. Hukum-hukum yang dianggap kurang relevan akan ditinggalkan atau bahkan dirubah dengan hukum-hukum baru yang bisa lebih mengayomi dan melindungi masyarakat.

Teori Evolusi

Teori-teori evolusi tentang perubahan sosial menunjukkan bahwa masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Maka dapatlah dipahami bahwa dalam suatu kehidupan masyarakat terdapat

tingkatan-tingkatan, mulai dari masyarakat yang sederhana hingga masyarakat yang maju. Teori evolusi mendapatkan pendekatan ethnosentris yang menunjukkan bahwa gambaran masyarakat modern adalah lebih sempurna daripada masyarakat di masa lalu.

Teori-Teori Siklikal

Teori Siklikal atau teori lingkaran menunjukkan bahwa masyarakat berlangsung melalui perbedaan tingkat-tingkat, tetapi tingkatan tersebut dalam suatu lingkaran yang senantiasa kembali, sehingga bergerak maju lebih dari gerakan sebagaimana digambarkan dalam teori evolusi.

Teori Equilibrium

Teori Equilibrium menunjukkan bahwa masyarakat terbentuk oleh saling ketergantungan dari berbagai aspek sosial, yang memberi kontribusi yang berarti bagi kehidupan sosial. Jika perubahan sosial memutuskan bagian yang satu dari yang lainnya dalam masyarakat, maka terjadilah suatu keadaan yang tidak seimbang.

Teori konflik

Teori konflik menunjukkan bahwa masyarakat sebagai kelompok-kelompok tidak terlepas dari konflik.

Prinsip atau dasar untuk menentukan definisi perubahan sosila budaya adalah:

- Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, artinya selalu mengalami perubahan secara cepat maupun lambat.
- Perubahan yang terjadi pada pranata sosial tertentu akan di ikuti dengan perubahan-perubahan pada pranata sosial lain secara berantai.
- Perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi secara cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu

reorganisasi yang mencakup pemantapan unsur-unsur budaya lain yang baru.

Setiap masyarakat selalu berubah, artinya dari waktu ke waktu keadaan masyarakat selalu berbeda. Perbedaan keadaan yang menjadi perhatian sosiologi ialah perbedaan yang jelas yaitu jika struktur dan fungsi masyarakat mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga tidak bekerja lagi seperti sebelumnya.(pembuatnya), merupakan unsur atau bagian kebudayaan manusia. Unsur-unsur itulah yang ternyata mengalami perubahan.

Setiap perubahan sosial sebagai realitas yang menjadi sasaran pengkajian ini senantiasa membawa 3 aspek yaitu, manusia, waktu, tempat. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu dan lingkungan tertentu setiap perubahan digerakan oleh manusia. Oleh karenanya, studi tentang perubahan sosial budaya tidak boleh mengabaikan 3 aspek tersebut. Untuk memperoleh pemahaman yang memuaskan mengenai perubahan sosial dituntut penelitian yang cermat mengenai aspek-aspek tersebut.

Para tokoh sosiologi klasik menggolongkan perubahan sosial kedalam beberapa pola yaitu pola linier, pola siklus, dan gabungan keduanya. Pendapat Herbert Spenser tentang pola perubahan sosial budaya linier yang dikemukakan oleh Etzioni-Haveley bahwa “Perkembangan masyarakat dan kebudayaan mengikuti suatu pola yang pasti; kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang mengalami, pasti, sama, dan tidak direlakan.” Pengalaman sejarah menunjukkan perkembangan peradaban manusia berlangsung melalui tiga tahap:

- Tahap Teologis dan militer; tahap ini semua menghubungkan sosial budaya bersifat militeristik yang didasarkan atas dogmatis keagamaan. Suatu masyarakat bertujuan menundukan dan menguasai

masyarakat lain melalui kekuatan adikodrati yang dalam prosesnya sering kali mengatas namakan ajaran agama.

- Tahap metafisik dan Yuridis; pada tahap ini menunjukkan suatu kondisi yang menjembatani antara masyarakat militan dengan masyarakat industri. Demi mewujudkan dan memelihara keteraturan hidup bermasyarakat, mekanisme segala dalam aspek kehidupan didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.
- Tahap ilmu pengetahuan dan industri; pada tahap ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan dan berorientasi di bidang perindustrian mendominasi kehidupan manusia pada umumnya setiap anggota masyarakat berupaya meningkatkan kredibilitas dan keabilitasnya demi meningkatkan taraf kehidupan

Adapun perubahan sosial budaya menurut pola siklus bahwa “masyarakat dan kebudayaan berkembang seperti halnya sebuah roda yang berputar; kadang-kadang naik (diatas), kadang-kadang turun (dibawah).” Perjuangan yang terus menerus antara kelas kelas atau lapisan sosial dalam masyarakat untuk mendapatkan posisi paling tinggi, menggambarkan adanya sebuah siklus. Setelah suatu kelas sosial berhasil menjadi penguasa, golongan tersebut akan runtuh digantikan dengan golongan berikutnya.

Sementara pola perubahan yang ketiga, yakni gabungan pola linier dan pola siklus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kemasyarakatan serta factor-faktor yang mempengaruhinya, pola perubahan sosial budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat merupakan gabungan pola linier dan pola siklus. Dalam unsur-unsur kehidupan tertentu perubahan sosial budaya membentuk pola linier, namun dalam unsur yang

lain membentuk pola siklus. Contohnya :perkembangan ilmu pengetahuan teknologi (pola linier), dan sistim pemerintahan atau kepemimpinan (pola siklus).

C. Rangkuman/Ringkasan

Perubahan sosial terjadi karena adanya kehendak dan kesediaan anggota-anggota masyarakat untuk merubah pada unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang lama dan mulai beralih menyesuaikan dengan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang baru. Hal-hal penting perubahan sosial menyangkut aspek-aspek sebagai berikut, yakni: perubahan pola pikir masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, perubahan budaya masyarakat, dan perubahan aturan-aturan hukum-hukum masyarakat.

D. Suggested Reading

Bacalah buku Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2003. *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mahasiswa sebaiknya membaca perubahan sosial baik yang linier maupun siklikal.

E. Daftar Istilah

Social action adalah tindakan sosial bermakna berdasarkan makna subyektifnya yang diberikan individu-individu.

BAB XIV

SISTEM SOSIAL MASYARAKAT SIPIL

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan definisi serta konsep civil society. Mahasiswa juga diharapkan bisa menjelaskan perkembangan kajian civil society serta penerapannya dalam kehidupan sosial.

B. Uraian Materi

Selama ini, pembahasan *Civil Society* dapat dikategorikan pada tiga bentuk. *Pertama*, *Civil Society* yang lebih menekankan aspek horizontal, berupa hubungan di antara sesama masyarakat dan budaya. Bentuk demikian lebih mencerminkan pada aspek budaya yang berkembang dalam masyarakat. *Kedua*, *Civil Society* yang lebih mengarah pada bentuk vertikal dengan mengutamakan otonomi masyarakat terhadap negara dan erat dengan aspek politik. Dalam bentuk demikian istilah civil society bermakna citizen dan liberty. *Ketiga*, bentuk *Civil Society* gabungan antara bentuk yang horizontal dan vertikal. Namun dalam konsep *Civil Society* demikian masalah “equality” (intra *Civil Society*) kurang mendapat penekanan sehingga memerlukan pemikiran dan kebijakan tersendiri. Berikut ini disinggung penelusuran sejarah dan perkembangan *civil society*.

Pertama, tahun 384-322 SM. Pada masa ini istilah *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah *koinonia politike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah

koinonia politike yang dikumandangkan oleh Aristoteles ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Hukum sendiri dianggap *etos*, yakni seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan (*virtue*) dari berbagai interaksi di antara warga negara (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003).

Kedua, tahun 106-43 SM. Pada tahun-tahun ini wacana *civil society* sama arti dengan (berasal dari) istilah *societies civiles*, yakni sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Wacana ini dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero yang merupakan ikutan terhadap wacana yang dikembangkan sebelumnya oleh Aristoteles. Hanya saja wacana Cicero ini lebih menekankan pada konsep negara kota (*city-state*), yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi.

Ketiga, tahun 1588-1679 M. Pada era ini *civil society* dipahami dan dikembangkan Thomas Hobbes sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan mutlak. Hal ini diperlukan untuk mampu sepenuhnya mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (prilaku politik) setiap warga negara. *Keempat*, tahun 1632-1704. Pada era ini *civil society* dipahami dan dikembangkan oleh Jhon Locke sebagai organisasi yang dapat melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Konsekuensi logisnya dalam pandangan Locke inia dalam *civil society* tidak boleh absolut dan harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat dan memberikan ruang manusiawi bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara adil dan proporsional.

Kelima, tahun 1767. Pada era ini wacana *civil society* dikembangkan oleh Adam Ferguson dengan mengambil konteks sosio-kultural dan politik Skotlandia. Di sini *civil*

society ditekankan sebagai sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu. Melalui konsepnya ini, Ferguson berharap bahwa publik memiliki ruh semangat untuk menghadang lahirnya kembali despotisme, karena dalam masyarakat madani itulah solidaritas sosial muncul dan diilhami oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi serta saling mempercayai antara warganegara secara alamiah.

Keenam, tahun 1972. Pada tahun ini *civil society* dimunculkan dengan penekanan pada keharusan kuatnya atau seimbangannya posisi masyarakat terhadap posisi negara. Wacana ini dirintis-kumandangkan oleh Thomas Paine (1737-1803). Paine melihat *civil society* merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai anti tesis dari negara. Dengan itu, menurut Paine, negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. Dari titik itu, Paine berkesimpulan bahwa *civil society* sesungguhnya adalah ruang di mana dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan. Sehingga tercipta suatu ruang gerak yang menjadi domain masyarakat, di mana intervensi negara di dalamnya merupakan aktivitas yang tidak sah dan tidak dibenarkan.

Ketujuh, perkembangan *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh G.W.F. Hegel (1770-1831 M), Karl Marx (1818-1883 M), dan Antonio Gramsci (1891-1937 M). Ketiga tokoh ini mengembangkan wacana *civil society* dengan penekanan pada *civil society* sebagai elemen ideologi kelas dominan. Dengan penekanan model tersebut, berarti pandangan

ini lebih merupakan sebuah reaksi dari model pemahaman yang dipegang oleh Thomas Paine (yang menganggap *civil society* sebagai bagian terpisah dari negara). Berikut ini beberapa pemikiran *civil society* yang dikemukakan oleh para ilmuwan politik maupun ilmuwan sosiologi.

Sementara bagi Muhammad AS Hikam (1996) secara ringkas menyebut, bahwa sebagaimana dikonsepsikan oleh para pelopornya di atas, *civil society* paling tidak memiliki tiga ciri utama: (1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara; (2) adanya ruang public bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik; (3) adanya kemampuan untuk membatasi kuasa Negara agar ia tidak intervensionis.

Hefner beranggapan bahwa keberhasilan demokrasi sangat tergantung pada sumber daya kultural setempat. Dia juga tergantung pada pada tradisi dan organisasi yang mampu mentransformasikan hakikat demokrasi pada masyarakat. Karena itu menurut kemajuan demokrasi dapat dimengerti dengan mempelajari tiga unsur utamanya, yaitu: (1) reformasi negara dan institusi-institusinya, (2) peraturan dan undang-undang (*rule of law*), dan (3) kultur demokratis.

Namun demokrasi dianggap mendapat perlawanan dari munculnya etno-religius. Kritik tajam para ilmuwan yang menilai hubungan antara demokrasi dan kebangkitan etno-religius seringkali bersifat berlawanan, cukup kita pahami. Hal ini karena banyaknya kekerasan yang terjadi di wilayah muslim, seperti pembunuhan besar-besaran di Aljazair dan kebrutalan Taliban di Afganistan. Namun penilaian yang berlebihan mengenai hubungan antara demokrasi dan kebangkitan etno-religius yang berlawanan akan menimbulkan sikap pesimistis.

Pandangan ini membuat proses demokratisasi mengalami jalan terjal yang tak terhindarkan.

Gerakan-gerakan Islam dalam dunia kontemporer makin banyak melibatkan diri dalam isu demokratisasi dan *civil society*. Sementara pertanyaan dari banyak kalangan mengenai apakah ajaran-ajaran Islam selaras dan *compatible* dengan demokrasi semakin besar pula. Ada pula yang menggugat bahwa definisi demokrasi dirumuskan sangat sempit dari sudut pandang Barat semata. Dalam perbedaan pandangan yang demikian Hefner secara tajam menjelajahi dan memaknai Islam yang relevan dengan perdebatan kontemporer tentang demokrasi dan partisipasi rakyat.

Bagi Hefner, hubungan antara demokrasi dan kebangkitan etno-religius tidak selamanya berlawanan. Sebab demokrasi tidak hanya klaim Barat atau Eropa, tetapi berkembang dalam wilayah dan dimensi yang lebih luas dari dimana awal kemunculannya. Dan bantahan Hefner atas pandangan sempit demokrasi ini nampak pada pernyataannya yang mengutip sosiolog Perancis Alexis de Tocqueville bahwa pemisahan gereja dan negara di Amerika menempatkan pemerintah tidak berurusan dengan penyesuaian secara paksa, tetapi juga tidak menempatkan agama diluar kehidupan publik. Penataan kembali itu menempatkan agama tidak begitu banyak pada renungan pribadi individu yang terisolasi, tetapi pada wilayah sipil yang terasosiasi sukarela.

Pandangan Hefner seperti ini dapat memberi jalan keluar bagi kemungkinan terjadinya pemangkasan intelektual bahwa etno-religius adalah biang keladi demokratisasi. Sebab dalam transformasi sosial politik, agama memiliki peran signifikan di kalangan masyarakat. Disamping memiliki dimensi vertikal dalam ritual keagamaan (teologis), agama juga memiliki dimensi horizontal kemasyarakatan, dimana didalamnya mengatur masalah-masalah sosial, budaya,

ekonomi, dan politik. Oleh karena itu kehadiran institusi-institusi (kelompok-kelompok) Islam tidak mungkin dapat melepaskan dirinya dari dua dimensi tersebut.

Di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa adanya pemisahan antara negara dan agama. Dan hal ini cukup menakjubkan bagi Hefner, karena ternyata pada sinisme Barat terhadap Islam tidak benar adanya. Karena di Indonesia demokrasi dapat berjalan. Hanya saja ketika Orde Baru berkuasa ruang demokrasi cukup terbatas dan kalangan masyarakat tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi pemerintah represif dan dominatif. Tetapi hal itu tidak berarti mematikan ruang demokrasi, terbukti dengan adanya pro-demokrasi yang sebagian besar didukung oleh kalangan muslim pada bulan Mei 1998 berhasil memaksa mantan presiden soeharto mundur selama berkuasa 32 tahun.

Dalam wilayah perpolitikan, kelompok agama merupakan suatu dimensi dari kondisi politik, baik sebagai alat kekuasaan, jaminan legitimasi, maupun alat perjuangan politik. Ada tiga kemungkinan yang mendorong hubungan antara agama dan politik; *pertama*, bahwa norma-norma agama sangat berkaitan dengan norma-norma politik, agama dapat mengintegrasikan fungsinya dalam masyarakat dan membantu untuk mengurangi ketegangan dari proses pencarian yang terbatas dan mungkin karena ketiadaan penghargaan. *Kedua*, institusi politik mengasumsikan pengendalian terhadap agama bahwa semua agama dalam prakteknya menjadi instrumen lain yang memaksa, satu bagian dari organisme yang disebut negara. *Ketiga*, berkaitan dengan kemungkinan kedua, boleh jadi justru terjadi ketegangan yang tajam (*sharp tension*) antara agama dan politik. Sebab norma agama seringkali bertentangan dengan norma politik.

Sebagai seorang Indonesianis yang telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1970-an, Robert W. Hefner dapat

mengadaptasikan dirinya dengan budaya Islam masyarakat Indonesia. Keakrabannya dengan masyarakat-juga Islam-Indonesia menempatkan dirinya bersebrangan dengan kaum “esensialis” dalam melihat masyarakat non-Barat. Bagi Hefner tidak ada penjelasan yang tunggal dan mutlak dalam menerangkan Islam, masyarakat Islam, Indonesia, dan sebagainya. Sehingga kran pluralitas selalu nampak dalam setiap pembahasannya, baik mengenai demokrasi, Islam, maupun dunia non-Barat, termasuk Indonesia.

Dengan modal pengetahuan yang besar terhadap dinamika Islam di Indonesia Hefner dapat memahami karakteristik masyarakat lokal. Sehingga dari beberapa penjelasannya nampak kearifan metodologinya dalam menghindari berbagai sikap stereotif pada berbagai fenomena. Perkembangan demokrasi liberal di Amerika Serikat bersama kapitalisme-nya hanyalah satu fenomena, dan di dunia ini begitu banyak fenomena yang tidak tunggal. Sehingga kompatibilitas demokrasi bukan merupakan harga mati, sebagaimana digemborkan Fukuyama. Begitu pula dalam melihat Islam. Memang ada kelompok konservatif di sebagian dunia Islam yang secara konsisten menekankan bahwa demokrasi adalah institusi Barat yang bersebrangan dengan nilai-nilai Islam. Tetapi Bagi Hefner tidak semua dunia Islam menampilkan wajah yang sama, ada sebagian lainnya yang menunjukkan bahwa demokrasi beresonansi dengan nilai-nilai Islam, seperti yang terjadi di Indonesia.

Arena politik sebagai arena penyelamatan bangsa dapat berubah menjadi arena penegasan identitas kelompok bila mekanisme hubungan dibangun oleh kelompok politik yang menolak paham universalisme. Penegasan identitas semacam ini dapat mewujudkan diri dalam bentuk kekerasan negara (militerisme), kekerasan fundamentalisme agama, dan kekerasan lainnya. Oleh karena itu kepercayaan (*trust*) sebagai

jembatan yang menghubungkan berbagai macam kekuatan politik akan mengalami penciutan dan akhirnya kepunahan. Akibatnya ketidakpercayaan terhadap institusi negara (institusional distrust) muncul di arena politik sebagai reaksi atas dominasi kekerasan negara dalam membangun mekanisme distribusi sumberdaya seperti yang terjadi pada masa Orde Baru berkuasa.

C. Rangkuman/Ringkasan

Istilah *civil society* lahir dan mewacana jauh sebelum abad Masehi. Wacana ini ditumbuh-suburkan oleh pergolakan dan sejarah masyarakat Eropa klasik dan petengahan yang mengalami transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Jika ditelusuri akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana *civil society* dapat dirunut mulai dari Aristoteles dan Cicero sampai pada Antonio Gramsci dan de'Tocquville.

D. Suggested Reading

Bacalah tulisan Francis Fukuyama yang berjudul *Social Capital, Civil Society And Development*, *Third World Quarterly*, Vol 22, No 1, pp 7-20, 2001..

E. Daftar Istilah

Civil society adalah sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, Jack, “*MTV and Globalization of Popular Culture*”, dalam *Gazette: The International Journal of Communication Studies* Vol. 59, 1.
- Berger, Arthur Asa. 2000, *Media Analysis Techniques*. Second Edition, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- David Campbell, *Tike the Road to Creativity*, USA: Argus Communications, 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Djumberansyah Indar, *Filsafat Pendidikan*, Surabaya: Aditama, 1994.
- Dominick, Joseph R. *The Dynamic of Mass Communication*, International Edition: McGraw Hill, Inc. 1993.
- Fathiyah Hasan Sulaiman, *Sistem Pendidikan Versi al-Ghazali*, Terj. Fathur Rahman, Bandung: Al-Ma’arif, 1986.
- Ferdinan Zaviera, *Teori Kepribadian Simund Freud*, Yogyakarta: Prismasophie, 2007.
- H. Titus Harold, *Living Issues in Philosophy*, New York, 1996.

- Hilda Taba, *Curriculum Development, Theory and Practice*, New York: Harcourt Broce dan World Inc, 1962.
- John A. Perry dan Erna K. Perry, *Contemporary Society*, New York: HarperCollins Publisher, 1991.
- John S. Brubacher, *Modern Philosophy of Education*, New Delhi: Tata Mc. Brau Hill Publishing Company Ltd., 1978.
- Jumberansah Indar, *Filsafat Pendidikan*, Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- LA. Cook dan E.F. Cook, *A. Sociological Approach to Educational*, New York: Mc, Graw-Hill Book Co., Inc., 1953.
- Langeveld, MT, *Paedagogik Teoritis - Sistematis*, Bandung: Bursa Buku FIR FKIP Bandung, 1974.
- Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Terj. Sujono Sumargono, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996.
- Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, Diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons (New York: Oxpord University Pers, 1974).
- Michael Haralammbos and Martin Horborn, *Sociology Themes and Perspectives*, London: HarperCollin Publisher, 1995.

- Michael A. West, *Developing Creativity in Organizations*, USA: British Psychological Society, 1997.
- Peter Dicken, Global Shift, *Transforming the World Economy* Ed ke-3 (London: Paul Chapman, 1998).
- Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial*, Terjemahan Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Ralph Miliband, *The State in Capitalist Society* (New York: Basic Books Inc, 1969).
- Robert w. Richey, *Planning for Theaching an Introduction*, New York: Mc. Graw-Hill Book Coy, 1968.
- Stephen K Sanderson, *Sosiologi Makro*, Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 1991.
- T.R. Bartein
School and Community, alih bahasa Drs. Suryadi, Alumni Bandung 1974.
- William T McLoad, *The New Collins Dictionary and Theseaurus*, Glasgow : William Collins Son, 1989.
- Dominick, Joseph R. (1993). *The Dynamic of Mass Communication*, International Edition: McGraw Hill, Inc.
- Wirawan W, Sarlito. 1994, *Psikologi Remaja*. Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Herboenangin, Boentje, Sarjono Sukanto, dkk. 1993, *Mengenal dan Memahami Masalah Remaja*, Jakarta: Pustaka Antara.

Rakhmat, Jalaluddin. 1994, Psikologi Komunikasi,
Bandung: Remaja Rosdakarya.

BIODATA PENULIS

Dr. H. Moh. Dulkiah, M.Si: Lahir di Majalengka, 24 September 1975. Ia menempuh Pendidikan S-1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan pendidikan pascaarjananya (S-2 dan S-3) diselesaikan di Departemen Sosilogi FISIP Universitas Indonesia. Kini ia bekerja sebagai Dosen FISIP UIN SGD Bandung dengan mengasuh mata kuliah sosiologi, system Sosial Di Indonesia, Ilmu Sosial Dasar dan metodologi Penelitian.

Buku yang sudah diterbitkannya antara lain: Kamus Perempuan (CV. Q-Vision, 2006), Salah satu Penulis buku "Jaminan Produk Halal, Buku Panduan Departemen Agama (Jakarta: Depag, 2005); Penyusun buku "Wiranto dan Nurani Konvensi Partai Golkar; Catatan Demokratisasi Internal Partai (Jakarta: AdiNaf, 2004); Salah satu Penulis buku Sosiologi Politik (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Buku Sosiologi Kriminalitas (2019), dan Buku Sosiologi Pendidikan (2019). Beberapa artikel penulis juga pernah dimuat di beberapa media cetak baik local, seperti Harian Terbit, Harian Pikiran Rakyat dan Harian Republika.
